



UNIVERSITAS INDONESIA

**Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses
Integrasi Ekonomi ASEAN
(Studi Kasus 2000-2008)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains
(M.Si.) dalam Ilmu Hubungan Internasional**

**HAIYYU DARMAN MOENIR
0806438521**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
JAKARTA
2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

NAMA : Haiyyu Darman Moenir
NPM : 0806438521
Tanda Tangan :
Tanggal : 14 Juni 2010



HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh

Nama : Haiyyu Darman Moenir
NPM : 0806438521
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional, FISIP UI
Judul Tesis : Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN (Studi Kasus 2000-2008)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sosial pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Dewan Penguji

Ketua Sidang : Prof. Zainudin Djafar, Ph.D ()

Sekretaris Sidang : Andi Widjajanto, MS, M.Sc ()

Pembimbing : Dr. Makmur Kelit ()

Penguji Ahli : Dr. Tirta N. Mursitama ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 02 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah swt, karena berkat rahmat dan ridhoNya saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Sains Program Pascasarjana Ilmu Ilmu Hubungan Internasional pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa doa bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak adalah sangat sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu mohonkanlah saya mengucapkan terima kasih kepada :

- (1) Dr. Makmur Keliat, sebagai Ketua Program Pascasarjana, Departemen Hubungan Internasional, dan sekaligus pembimbing tesis penulis yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, masukan dan dorongan dari awal perkuliahan sampai dengan konsultasi dan bimbingan tesis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
- (2) Dwi Ardhanariswari Sundrijo, S.Sos.,MA,M.Phil, selaku staf pengajar dan pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan, pengarahan dan masukan-masukan agar penulis dapat penyelesaian studi dengan nilai yang cukup baik.
- (3) Bp Ade Padmo Sarwono, sebagai Direktur, Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, atas kesediaan tempat dan waktunya beberapa kali untuk di wawancarai oleh penulis, dan juga memberikan data-data yang sangat berguna bagi penyusunan tesis ini.
- (4) Bp S. Pushpanathan, sebagai *Deputy Secretary General ASEAN for ASEAN Economic Community ASEAN Secretariat*, Jakarta atas waktunya untuk diwawancarai secara singkat oleh penulis dalam memberikan masukan-masukannya.
- (5) Kedua orang tua saya, Ayahanda Darman Moenir dan Ibunda Darhana Bakar yang telah memberikan dukungan, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah

putus dan tidak akan pernah tergantikan. Tesis ini adalah usaha penulis sebagai seorang anak untuk memberikan kebanggaan kepada orang tua dan penulis akan terus berusaha membahagiakan, mewujudkan keinginan mereka berdua dan menjadi kebanggaan dalam keluarga.

- (6) Kepada adik-adik tercinta dan sangat penulis sayangi: Hoppla Darman Moenir, Tastafti Darman Moenir dan Asthwa Darman Moenir. Terima kasih penulis atas dukungan waktu dan pengertiannya yang terus menerus tanpa henti terhadap penulis dan tulisan ini adalah sebagai hadiah terindah untuk kalian semua. Semoga keberhasilan ini bias menjadi pelecut semangat kita bersama untuk selalu membahagiakan orang tua kita dan menjaga nama baik keluarga.
- (7) *To some one out there. Thanks for your love. You always are inspiring me. I dedicated this thesis for you.*
- (8) Terima kasih penulis khususnya bagi Ibuk Mona (yang juga merupakan teman perkuliahan satu angkatan-Angkatan XVI) beserta suami, Bapak Edwin yang telah penulis anggap sebagai orang tua sendiri, yang telah banyak memberikan bantuan kasih sayang, tenaga, waktu dan rumah kediamannya bagi penulis untuk dapat berkonsentrasi dalam penyelesaian penulisan tesis ini dari sejak awal sampai selesai, semoga bantuan yang sangat besar ini tidak akan pernah terlupakan.
- (9) Sahabat-sahabat penulis dari Angkatan XVI terutama grup SaTe (Salemba Tengah) yakni Nada, Yugo, Helmi, Uus, Desi, Diah dan lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang selalu diberikan selama penulis menjalani perkuliahan sampai dengan penghujung pembuatan tesis ini.
- (10) Untuk sahabat karib penulis, Anton, Faisal, Guntur, Nenek (mba Iin) terima kasih atas dukungan moral yang telah kalian berikan selama ini. Sahabat penulis di Siteba: Syukri, Ridho, Rio dan lain-lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga hubungan pertemanan kita bisa terus terjalin.

- (11) Para staf Sekretariat Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Indonesia, mba Ice, mba Lina, pak Udin yang selalu membantu dengan baik dan ramah selama saya menjalani perkuliahan di kampus Salemba ini.
- (12) Teman-temanku, serta pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas support dan pengertiannya yang tidak akan pernah terlupakan.

Akhir kata, saya panjatkan doa kepada Allah S.W.T agar dapat membalas semua bantuan moril dan materil yang telah diberikan kepada saya. Meskipun penulis merasakan masih banyak kekurangan dalam tugas akhir ini, penulis berharap penelitian tugas akhir ini dapat berguna bagi semua pihak dan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya yang lebih sempurna.

Jakarta, 14 Juni 2010

Penulis,

Haiyyu Darman Moenir

**HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Haiyyu Darman Moenir
NPM : 0806438521
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN (Studi Kasus 2000-2008)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 14 Juni 2010
Yang menyatakan,

(Haiyyu Darman Moenir)

ABSTRAK

Nama : Haiyyu Darman Moenir
Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak Kemajuan Ekonomi China-India Terhadap Proses Integrasi Ekonomi ASEAN (2000-2008)

Fokus dari penelitian ini menjelaskan mengenai dampak kemajuan ekonomi China-India terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN dalam kurun waktu 2000-2008. Secara internal ASEAN, kebangkitan ekonomi China-India dan persaingan yang lebih intensif dengan kekuatan ekstra regional yang lain, mendorong ASEAN untuk secara serius melakukan konsolidasi (*deepening*) ke dalam antara lain dengan membentuk *ASEAN Community* dan *ASEAN Charter*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi China-India merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Peluang, karena jikalau ASEAN bisa memanfaatkan setiap peluang kerjasama yang dibangun dengan China-India, maka akan terjadi peningkatan *economic skills* oleh negara-negara ASEAN. Dan juga merupakan tantangan, karena jikalau tidak ada penguatan dalam internal ASEAN terhadap berbagai sektor, maka perekonomian negara-negara ASEAN akan mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran.

Kata Kunci:

ASEAN, China, India, kemajuan ekonomi, integrasi ekonomi, komunitas ekonomi ASEAN.

ABSTRACT

Name : Haiyyu Darman Moenir
Studies Program : International Relations
Title : Impact of China-India Economic Progress Against Process
ASEAN Economic Integration (2000-2008)

The focus of this research explains the impact of the economic progress of China-India to the ASEAN economic integration process in the period of 2000-2008. Internally, ASEAN, China-India economic revival and more intensive competition with other regional extra strength, encourage ASEAN to seriously make statements (deepening) into, among others, by establishing the ASEAN Community and the ASEAN Charter. The results show that the economic progresses of China-India are the opportunities and challenges faced by the ASEAN. Opportunity, because of as if ASEAN can take the advantage of every opportunity built with the cooperation of China-India, then there will be economic improvement skills by the ASEAN countries. And it is also a challenge, because if there is no internal reinforcement in the ASEAN to various sectors, the economy of the ASEAN countries will be experiencing stagnation or even decline.

Keywords:

ASEAN, China, India, economic progress, economic integration, ASEAN economic community.

DAFTAR ISI

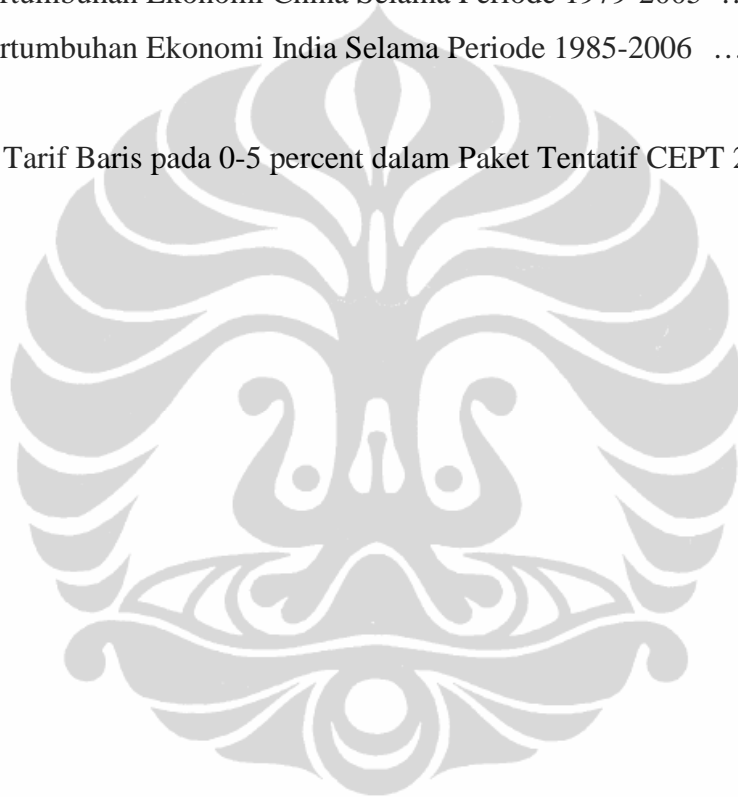
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI ILMIAH	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR TABEL	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Permasalahan Penelitian	12
1.3 Signifikansi Penelitian	12
1.4 Tinjauan Pustaka	13
1.5 Kerangka Konseptual	14
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Hipotesis	19
1.8 Model Analisis	20
1.9 Sistematika Penulisan	21
2. SEJARAH HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA-INDIA	22
2.1 Sejarah Hubungan ASEAN Dengan China	22
2.1.1 Perubahan Hubungan ASEAN Dengan China: Dari Permusuhan Menuju Pertemanan	23
2.1.2 Kepentingan China Terhadap ASEAN	31
2.2 Sejarah Hubungan ASEAN Dengan India	34
2.2.1 Kepentingan India Terhadap ASEAN	38
2.3 Posisi China dan India di Asia Tenggara	40

3. KEMAJUAN EKONOMI CHINA-INDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASEAN	45
3.1 China	45
3.1.1 Kebangkitan Ekonomi China	45
3.2 India	51
3.2.1 Kebangkitan Ekonomi India	51
3.3 Hubungan ASEAN Dengan China-India	56
3.3.1 Hubungan Kerjasama ASEAN Dengan China	57
3.3.2 Hubungan Kerjasama ASEAN Dengan India	64
3.4 Daya Saing ASEAN Terhadap China-India	72
4. INTEGRASI EKONOMI ASEAN	76
4.1 Perkembangan Regionalisme	76
4.1.1 Implikasi Ekonomi Dari Integrasi Regional	76
4.2 Dari ASEAN Menuju AFTA	78
4.2.1 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)	79
4.2.2 The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)	80
4.3 Dari AFTA Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN	88
4.4 Evolusi Dari Integrasi Ekonomi ASEAN Dalam Konteks Regional	93
4.4.1 Komunitas Ekonomi ASEAN: Tujuan Akhir Di Tahun 2015	94
4.4.2 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN	96
4.5 Open Regionalism	103
4.6 FTA ASEAN Dengan China-India	105
4.6.1 FTA ASEAN Dengan China (ACFTA)	105
4.6.1.1 Tujuan FTA ASEAN-China	106
4.6.1.2 Persetujuan Perdagangan Barang	107
4.6.1.3 Persetujuan Perdagangan Jasa	108
4.6.1.4 Persetujuan Investasi	109
4.6.1.5 Kerjasama Ekonomi	109
4.6.2 FTA ASEAN Dengan India (AIFTA)	110
4.6.2.1 Perdagangan Barang	111
5. KESIMPULAN	115

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GRAFIK

1.1 Tingkat pertumbuhan Dan Inflasi China (%), 1990-2003	4
1.2 Tingkat pertumbuhan Dan Inflasi India (%), 1980-2003	5
3.1 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi China Selama Periode 1979-2005	46
3.2 Tingkat Pertumbuhan Ekonomi India Selama Periode 1985-2006	52
4.1 Persentase Tarif Baris pada 0-5 percent dalam Paket Tentatif CEPT 2004	79



DAFTAR TABEL

2.1	Matriks Perbandingan Sejarah Hubungan ASEAN Dengan China-India	43
3.1	Matriks Perbandingan Kemajuan Ekonomi China-India	56
3.2	FDI China Yang Masuk Ke Asean Tahun 2000-2008 (US\$ juta)	61
3.3	Komoditas Ekspor ASEAN Ke China Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)	62
3.4	10 Komoditas Utama Ekspor ASEAN Ke China Tahun 2007	62
3.5	Komoditas Impor ASEAN Dari China Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)	63
3.6	10 Komoditas Utama Impor ASEAN Dari China Tahun 2007-2008	63
3.7	FDI India Yang Masuk Ke ASEAN Tahun 2000-2008 (US\$ juta)	67
3.8	Komoditas Ekspor ASEAN Ke India Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)	67
3.9	10 Komoditas Utama Ekspor ASEAN Ke India Tahun 2007	68
3.10	Komoditas Impor ASEAN Dari India Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)	69
3.11	10 Komoditas Utama Impor ASEAN Dari India Tahun 2007-2008	69
3.12	Matriks Perbandingan Hubungan Kerjasama ASEAN Dengan China-India	71
4.1	Rata-rata AFTA / Harga Tarif CEPT oleh Negara (%)	83
4.2	Unsur Penting Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN	99
4.3	FTA ASEAN Dengan China-India	104
4.4	Matriks Perbandingan Kesepakatan FTA ASEAN Dengan China-India	112

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang pada awal pembentukannya pada tahun 1967,¹ lebih ditujukan pada kerjasama yang berorientasi politik untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, dalam perjalanannya berubah menjadi kerjasama regional dengan memperkuat semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara, antara lain melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan budaya dengan tetap memperhatikan kesetaraan dan kemitraan, sehingga menjadi landasan untuk terciptanya masyarakat yang sejahtera dan damai.

ASEAN yang resmi terbentuk pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand adalah merupakan kerjasama regional didirikan oleh lima negara di kawasan Asia Tenggara yaitu; Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand berdasarkan kesepakatan "Deklarasi Bangkok" yang ditanda tangani secara bersama-sama dan isinya sebagai berikut :

*"Membentuk suatu landasan kokoh dalam meningkatkan kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara dengan semangat keadilan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perdamaian, kemajuan dan kemakmuran kawasan."*²

Sejak awal didirikan ASEAN bercita-cita mewujudkan Asia Tenggara bersatu sehingga keanggotaan ASEAN terus mengalami perluasan menjadi sepuluh negara anggota yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam tahun 1984, Vietnam tahun 1995, Laos tahun 1997, Myanmar tahun 1997, dan Cambodia tahun 1999. Pada saat yang bersamaan kawasan Asia Tenggara

¹ *ASEAN Declaration*, Bangkok, 8 Agustus 1967.

² *ASEAN Document Series 1967-1985*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 1985, hal 2.

menghadapi persoalan-persoalan baru yang muncul baik secara internal maupun eksternal.³

Pada awal tahun 1990-an, terdapat 3 dinamika eksternal yang mempengaruhi perkembangan ASEAN:⁴

1. Terdapat kecenderungan perubahan lingkungan strategis global yang menuntut Negara-negara di dunia untuk meningkatkan daya saingnya.

Kondisi eksternal perekonomian dunia yang semakin terbuka seiring era globalisasi sepanjang dekade 1980-an juga berimbas pada perekonomian negara-negara ASEAN. Di tengah iklim perekonomian global yang semakin liberal dengan hambatan perdagangan dunia yang semakin berkurang mendorong negara-negara ASEAN untuk menyesuaikan diri. Era proteksi industri substitusi impor ASEAN telah berlalu. Negara-negara ASEAN mulai melakukan penyesuaian terhadap orientasi kebijakan perdagangan yang semula berorientasi ke dalam menjadi keluar. Hasilnya, industri manufaktur ASEAN semakin berkembang dan memiliki peran yang sangat penting dalam struktur ekspor ASEAN. Seiring dengan itu tumbuh pula perdagangan intra-industri di ASEAN. Tuntutan untuk melakukan liberalisasi perdagangan di ASEAN juga tidak terlepas dari tekanan dunia internasional, khususnya IMF dan Bank Dunia.⁵

2. Melemahnya daya saing ASEAN akibat munculnya kekuatan baru China dan India

Perkembangan ekonomi dunia lainnya pada awal dasawarsa 1990-an yang juga mewarnai perjalanan ASEAN adalah bangkitnya perekonomian raksasa yang selama ini “tertidur” yaitu China-India. Dengan jumlah penduduk China dan India yang besar dan tenaga kerja yang murah dengan produktifitas yang tinggi, menjadi ancaman bagi ASEAN terutama sebagai pesaing dalam menarik investor asing dan tujuan pasar. Perlahan, beberapa investasi asing yang selama ini berada

³ *Ibid.*

⁴ Edi Yusuf, dalam seminar *Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya bagi Indonesia*, Departemen Luar Negeri RI, di Universitas Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2009.

⁵ Naya, S. Dan Imada, P. (eds). 1992. *AFTA The Way Ahead*, ISEAS, Singapore.

di ASEAN mulai melirik potensi kedua negara tersebut, yang dalam beberapa hal juga telah melakukan relokasi industri ke dua negara tersebut. Di samping itu integrasi ekonomi yang terjadi di Eropa (*Economic Union*) dan Amerika Utara (NAFTA) juga menjadi ancaman tersendiri bagi ASEAN yang menyebabkan kekhawatiran akan terjadinya pengalihan perdagangan dan investasi dunia dari ASEAN ke kawasan tersebut.⁶

Hal yang menarik untuk perlu dicermati negara-negara anggota ASEAN adalah tantangan yang harus dihadapi dengan munculnya China dan India sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia yang paling berpengaruh dalam sistem internasional. Pengaruh kekuatan ekonomi China tersebut semakin meningkat setelah China bergabung menjadi anggota *World Trade Organization (WTO)* pada tahun 2001.⁷ Pertumbuhan ekonomi yang cepat dari China tersebut membuka peluang bagi negara-negara di kawasan ASEAN mendapatkan akses pasar, teknologi, dan informasi dari negara-negara yang lebih maju. Peluang-peluang ini hanya akan dapat diraih jika ASEAN memiliki daya saing yang tinggi. Negara-negara ASEAN harus meningkatkan daya saing mereka antara lain dengan mengintegrasikan perekonomian Asia Tenggara menjadi satu entitas ekonomi yang secara kualitas dan kuantitas dapat bersaing di pasar internasional.

Hadirnya China sebagai anggota penuh dalam komunitas ekonomi global yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada tahun 2001 dan laporan dari majalah *Business Week* pada 8 Desember 2003, yang menandai untuk pertama kalinya India muncul pada sampul majalah utama Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi telah menimbulkan konstelasi baru dalam sistem ekonomi global. China dan India kini diakui luas sebagai kekuatan ekonomi dunia baru.

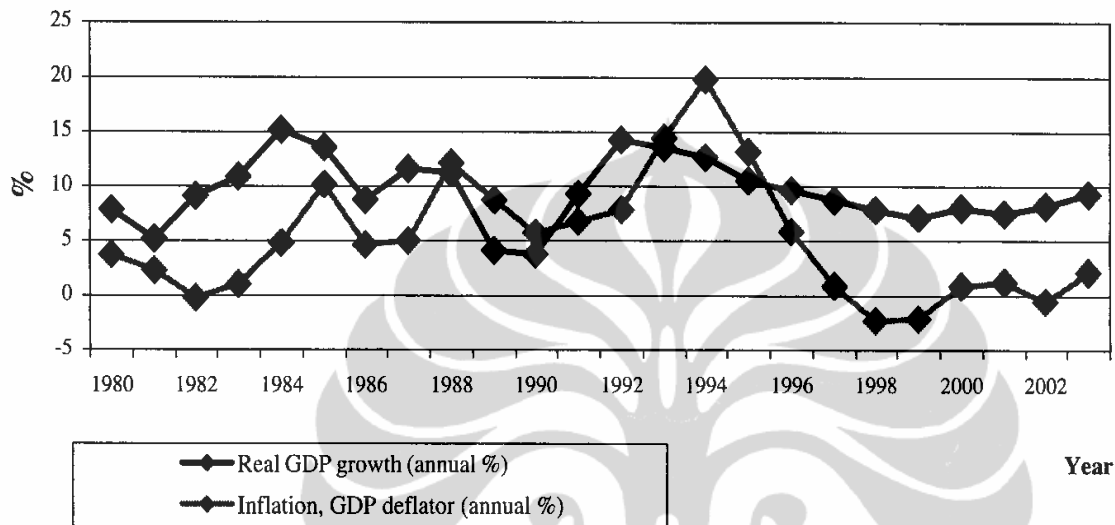
Globalisasi perdagangan mengakibatkan liberalisasi lintas barang dan jasa menjadi tidak terbatas. Dalam hal ini faktor tersebut bisa dimanfaatkan oleh

⁶ Chuyvers, Ludo dan Wisarn Pupphavesa. 1996. *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper No. 46.

⁷ Financial Times, dikutip oleh Chalmers Johnsons. "No Longer the 'Lone' Superpower: Coming to Terms with China". Japan Policy Research Institute Working Paper No.105, Maret 2005. http://www.jpri.org/publications/working_papers/wp_105.

China dan India sehingga mengakibatkan kedua negara tersebut menjadi pionir di dalam perdagangan Internasional khususnya dikawasan Asia.⁸

Grafik 1.1
Tingkat pertumbuhan Dan Inflasi China (%), 1990-2003



Source: CEIC and World Bank databases 2003

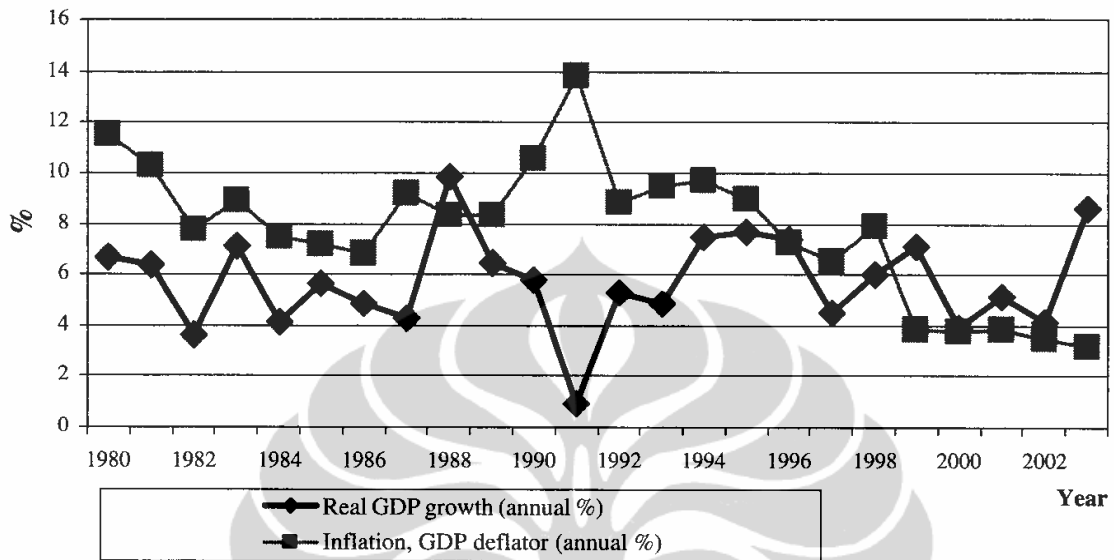
Ekonomi China tumbuh begitu cepat dalam perdagangan global dan manufaktur. Antara 1985-2003, Pertumbuhan ekonomi riil China tumbuh secara konsisten yaitu dengan rata-raa pertumbuhan 9% setiap tahunnya. Pada 2004, pangsa perdagangan global Cina mencapai sekitar 6%. Pada tahun 2005-China sudah melesat melampaui sebagian besar negara Eropa dalam ukuran ekonomi, dan mengambil alih peran Jepang sebagai pedagang tingkat dunia.⁹

Kebangkitan ekonomi China sebagai raksasa ekonomi dimulai sejak kepemimpinan Den Xiaoping pada tahun 1979. Setiap gerakan pembaharuan telah memicu gelombang baru “demam China” oleh perusahaan asing. Media internasional memberitakan tiap manifestasi baru dari kapitalisme China yang berwujud munculnya bisnis swasta, customer yang makmur pabrik-pabrik pengeksport yang mulai marak, dan pasar saham.

⁸ *Ibid.*

⁹ Pete Engardio, “*CHINDIA; Strategi China dan India menguasai Bisnis Global*”, Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, 2007, hal vii-viii.

Grafik 1.2
Tingkat pertumbuhan Dan Inflasi India (%), 1990-2003



Walaupun India memiliki demokrasi yang mapan dan sektor swasta yang amat besar, namun sektor ekonominya masih terbelenggu oleh kontrol birokrasi, dan sebagian besar industrinya tidak dapat dijangkau oleh investor luar negeri.

Ekonomi India telah tumbuh sebesar 6% pertahun selama periode tersebut, dan pertumbuhannya semakin melaju saat investasi meningkat dan semakin banyak sektor ekonomi yang terbuka terhadap persaingan.¹⁰ Dengan pertumbuhan substansial dalam dekade terakhir, India telah muncul sebagai salah satu perekonomian terbesar bukan hanya di Asia, tetapi seluruh dunia. Dengan PDB terbesar ketiga dan tingkat pertumbuhan 7-8 persen, India adalah *poised* untuk muncul sebagai kekuatan ekonomi besar di tahun-tahun yang akan datang. Dengan meningkatnya kelas menengah dan ekonomi, India memiliki potensi ekonomi yang besar dan memberikan banyak peluang bagi ekonomi di kawasan itu untuk berhubungan dengan kebangkitan ekonomi.

China dan India berusaha untuk memperluas kehadiran dan pengaruh strategis terhadap lingkungan dekat mereka sebagai akibat terhadap pertumbuhan kekuatan

¹⁰ *Ibid.*

ekonomi mereka. Keduanya mencari keterlibatan peran yang lebih luas dengan negara lain baik secara regional maupun global. Kebanyakan minat India dan China di Asia Tenggara didorong oleh pengejaran kepentingan dan memperoleh keuntungan.

Dengan kekuatan yang sedang meningkat, baik China dan India mencari peluang yang lebih besar melalui multilateralisme dan kerjasama regional. Mereka melihat ASEAN dan Negara-negara Asia Tenggara penting untuk kepentingan strategis mereka terutama dalam hal perdagangan dan investasi. Keterlibatan dan partisipasi dalam proses regional seperti ASEAN, *Asia-Europe Meeting* (ASEM), Forum Regional ASEAN (ARF), ASEAN Plus Tiga (APT) dan KTT Asia Timur (EAS) adalah sangat penting dengan tujuan untuk memperoleh manfaat dari kerjasama regional, membangun kekuatan yang lebih besar, memainkan peranan, serta menjaga keseimbangan.

China lebih mudah untuk terlibat dalam proses kerjasama dibandingkan dengan India, yang merupakan negara diluar wilayah Asia Timur. Lebih jauh lagi, China dipandang dengan ketakutan yang lebih besar di Asia Tenggara dibandingkan dengan India karena berbagai faktor. Termasuk sejarah pelaksanaan kekuasaan dan pengaruh China di wilayah ini; *image* negatif sebagai negara otoriter yang berkaitan dengan komunisme, dukungan China di masa lalu terhadap pemberontakan komunis di Asia Tenggara; teritorial klaim dan perselisihan dengan negara-negara regional, ukuran China yang lebih besar di China dan kedekatan geografis.¹¹

Hubungan dialog antara ASEAN dan China dapat ditelusuri kembali ke tahun 1991 ketika China pertama kali menghadiri sesi pembukaan 24th Pertemuan se-Tingkat Menteri Negara-negara ASEAN (AMM) di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tamu Pemerintah Malaysia. Selanjutnya, China menjadi mitra konsultatif

¹¹ Mohamed Jahwar Hassan, *The Resurgence of China and India, major Power Rivalry and The Response of ASEAN*, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), *The Inklusif Regionalist*, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, Indonesia, 2007. Hal. 139.

dan kemudian mitra dialog penuh pada pertemuan se-Tingkat Menteri Negara-negara ASEAN (AMM) Ke-29th pada bulan Juli 1996 di Jakarta, Indonesia.¹²

Sedangkan hubungan resmi antara India dan ASEAN didirikan pada tahun 1993 dalam bentuk dialog kemitraan sektoral. Kemudian, hubungan ASEAN-India mencapai langkah yang lebih jauh pada tahun 1995 ketika India menjadi mitra dialog ASEAN. Menyusul keputusan itu, India secara otomatis menjadi peserta ARF, dan menghadiri Forum Regional ASEAN Ke-Tiga dan Pertemuan Menteri ASEAN Ke-29 Meeting, yang diselenggarakan di Jakarta 16-24 Juli 1996. Sejak itu, ASEAN dan India bertemu setiap tahun di Forum Regional ASEAN (ARF) dan *Post Ministerial Conferences (PMCs)*. Dari mitra dialog, India menjadi mitra penuh kerjasama ASEAN.¹³

3. Pada tataran regional, terdapat gerakan kearah pengintegrasian kekuatan ekonomi yang berbasis pada pasar tunggal (*single market*) dan produksi tunggal yang terintegrasi (*single production*).

Kesepakatan integrasi regional (RIAs) telah menjadi isu penting dalam ranah integrasi ekonomi.¹⁴ Dalam integrasi ekonomi akan dijumpai dua kepentingan yang saling berlawanan yaitu antara mendorong perdagangan dan membatasi perdagangan pada saat bersamaan. Integrasi ekonomi dilakukan dengan melakukan liberalisasi perdagangan antara negara yang berpartisipasi dalam integrasi, namun pada saat yang sama juga menerapkan berbagai hambatan baik tarif maupun non-tarif kepada negara ketiga atau negara diluar anggota.

Kebijakan liberalisasi maupun kesepakatan integrasi tersebut digunakan sebagai alat untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas dan mendorong pertumbuhan dalam rangka meningkatkan kemakmuran. Didasari keyakinan

¹² Thongphane Savanphet, *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations (Summary Record of the Regional Seminar)*, by The Gioi Publishers, Vietnam, 2006. Hal. 33.

¹³ Nguyen Dy Nien, *ASEAN-India Dialogue Relations: Present and Prospects*, dalam *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization: Reflections by Eminent Persons*, Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries (RIS), India, 2002. Hal. 133.

¹⁴ Studi yang dilakukan oleh Sekretariat WTO (1995) menyimpulkan bahwa kesepakatan regional lebih merupakan upaya untuk saling melengkapi ketimbang sebagai alternatif usaha untuk menciptakan perdagangan dunia yang lebih bebas.

tersebut, sekaligus untuk memperkuat daya saing kawasan dalam menghadapi kompetisi global dan regional, negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam forum ASEAN telah menyepakati untuk meningkatkan proses integrasi diantara mereka melalui pembentukan *ASEAN Economic Community* (MEA) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.

Dorongan untuk mengintegrasikan perekonomian Asia Tenggara juga semakin kuat dengan adanya krisis finansial tahun 1997/98, dimana menurut persepsi para investor global perekonomian negara-negara di Asia Tenggara dianggap memiliki keterkaitan satu dengan lainnya, sehingga krisis di satu negara akan berdampak terhadap negara lain di kawasan. Timbulnya kesadaran bahwa setiap negara tidak dapat berdiri sendiri-sendiri lagi adalah salah satu faktor yang menyebabkan tren regionalisme semakin menguat. Pembentukan Eropa sebagai *common market* di awal 1993 memberikan pencerahan” bahwa suatu negara tidak dapat menghindar dari konsep kerjasama untuk dapat mempertahankan diri dari dampak negatif globalisasi.¹⁵

Sementara itu dari dalam, ASEAN terus mengupayakan langkah-langkah untuk mewujudkan ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas melalui pengurangan dan penghapusan hambatan perdagangan, baik tarif maupun non-tarif. Karena dengan cara demikian perdagangan di kawasan ASEAN diharapkan dapat meningkat karena arus barang tidak terhambat. Pada gilirannya kondisi tersebut akan menjadikan kawasan ASEAN sebagai kawasan basis produksi yang kompetitif (terutama dalam menarik investasi asing),¹⁶ sekaligus merupakan pasar potensial dengan sekitar 500 juta orang penduduknya.

Peningkatan ekonomi Cina dan India juga telah mendorong ulang realisasi untuk negara-negara ASEAN agar mereka dapat merestrukturisasi dan mengintegrasikan ekonomi dalam rangka untuk mempertahankan daya saing mereka.

¹⁵ Michael G.Plummer.” *Creating an ASEAN Economic Community: Lesson from the EU and Reflections on the Roadmap*” dalam Denis Hew,” *Roadmap to an ASEAN Economic Community*”. Institute of Southeast Asian Studies, Singapore.2005. hal 42-44.

¹⁶ *Op. Cit*, Paul Bowles, hal. 229.

Kehilangan daya saing ekonomi terhadap negara seperti China dan India telah menjadi pendorong utama dalam upaya ASEAN untuk mempercepat integrasi ekonomi. Suatu studi mengenai ASEAN yang dilakukan oleh *McKinsey and Co.* beberapa tahun lalu menemukan bahwa ASEAN telah kehilangan daya saing ke China.¹⁷ Ini menjadi semakin jelas dalam beberapa tahun terakhir, seperti China menyusul ASEAN sebagai negara berkembang peringkat utama untuk penanaman modal asing langsung (FDI). Sementara itu, jaringan produksi internasional dan rantai pasokan global berpikir ulang untuk memperhitungkan ekspansi ekonomi dan industrialisasi China yang tumbuh dengan pesat. India, pesaing utama lain yang potensial untuk ASEAN, telah menjadi penyedia utama layanan, seperti teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan telah memperkuat kemampuan manufakturnya. Perkembangan tersebut akan berakibat serius pada kesejahteraan ekonomi ASEAN dalam jangka panjang jika ASEAN tetap tidak kompetitif.¹⁸

Didorong oleh hal ini, sejumlah inisiatif untuk mendorong terhadap integrasi ekonomi lebih mendalam akhirnya mengarah pada pengadopsian cetak biru MEA ASEAN di KTT ASEAN November 2007 di Singapura. Cetak biru MEA pada dasarnya menjabarkan arah untuk mempercepat integrasi ekonomi dan mewujudkan MEA pada tahun 2015. Ini termasuk rencana tindakan, target dan batas waktu untuk memfasilitasi integrasi ekonomi dan memajukan proses MEA. Dalam Cetak Biru MEA, ASEAN bertujuan untuk menjadi: (i) pasar dan basis produksi tunggal, (ii) ekonomi kawasan yang sangat kompetitif; (iii) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata dan (iv) suatu kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

Integrasi ekonomi dapat dijadikan sarana untuk merevitalisasi perekonomian ASEAN. Mengingat bahwa negara-negara ASEAN yang sangat berbeda tingkat pembangunan ekonomi, keragaman perekonomian ini bisa menjadi keunggulan

¹⁷ A. Schwartz dan R. Villinger, “*Integrating Southeast Asian Economies*”, *The McKinsey Quarterly*, No. 1 (2004).

¹⁸ Denis Hew, *Toward an ASEAN Economic by 2015*, dalam *The ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2008. Hal. 16.

komparatif, karena akan memaksimalkan *complementarities* di antara negara-negara anggota ASEAN dan mendorong pengembangan jaringan produksi regional. Pasar terintegrasi dan basis produksi akan meningkatkan perdagangan intra-regional dan arus investasi di seluruh wilayah, sedangkan pasar konsumen ASEAN yang mencapai hampir 500 juta orang akan menjadi tempat yang menguntungkan bagi perusahaan untuk mendirikan toko dan melakukan bisnis.

Dengan perjalanan waktu dan dalam rangka menghadapi berbagai tantangan kerjasama regional-termasuk krisis ekonomi di 1997-para pimpinan negara ASEAN kembali memformulasikan “ASEAN *Vision 2020*” di Kuala Lumpur pada 15 Desember 1997 yang menjadi tujuan jangka panjang ASEAN, yaitu: “... *as a concert of Southeast Asian nations, outward looking, living in peace, stability and prosperity, bonded together in partnership in dynamic development and in community of caring societies.*”

Rencana jangka panjang pembentukan Masyarakat ASEAN ini terdiri dari tiga pilar, yaitu *Asean Economic Community* (AEC), *ASEAN Security Community* (ASC), dan *ASEAN Socio-Cultural Community* (ASCC).

Dari sisi kerjasama ekonomi, visi tersebut diwujudkan melalui strategi pengembangan ekonomi yang sejalan dengan aspirasi bangsa, dengan tujuan utama mencapai *pertumbuhan* ekonomi yang berkesinambungan dan merata, serta mendukung ketahanan individu negara anggota maupun kawasan. Konsep pelaksanaan dalam enam tahun pertama dipandu dengan *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang dikeluarkan pada 1998.¹⁹

Pada KTT ASEAN ke-12, para pemimpin ASEAN menegaskan komitmen yang kuat untuk mempercepat pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2015 sejalan dengan Visi ASEAN 2020 dan Bali Concord II, dan menandatangani *Cebu Declaration on Acceleration of Establishment of ASEAN Community by 2015*. secara khusus para Pemimpin sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dan mentransformasikan ASEAN menjadi

¹⁹ Operasionalisasi perumusan visi 2020 dilakukan pertama kali dalam *Hanoi Plan of Action* (HPA) yang kemudian menuangkan strateginya di dalam *Vientiane Action Programme* 2004-2010.

kawasan dimana terdapat aliran bebas barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil, serta aliran modal yang lebih bebas dan guna memperkuat daya saing ASEAN dalam menghadapi kompetisi global, terutama dari China-India.

Guna memperkuat langkah percepatan integrasi tersebut, ASEAN melakukan transformasi “cara” kerja sama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen negara ASEAN melalui penandatanganan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*) pada KTT ASEAN ke-13, 20 November 2007. Bersamaan dengan penandatanganan Piagam ASEAN, cetak biru yang merupakan arah panduan MEA dan jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian pilar juga disepakati. Selanjutnya komitmen tersebut menjadi arah pencapaian MEA ke depan baik bagi ASEAN secara kawasan maupun individu negara anggota. Masing-masing negara berkewajiban menjaga komitmen tersebut sehingga kredibilitas ASEAN semakin baik di masa depan.

Secara khusus ASEAN bertekad akan mengamankan kepentingan bersama yang dilakukan secara berkesinambungan dalam mengantisipasi pembentukan kelompok ekonomi negara-negara maju, terutama dengan mendorong pembentukan kawasan ekonomi terbuka dan merangsang kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN.

Dalam bidang ekonomi telah ditandatangani dua buah dokumen penting yang akan menjadi dasar bagi perkembangan ekonomi ASEAN di masa mendatang. Kedua dokumen yang ditandatangani oleh para menteri ekonomi ASEAN adalah *Framework Agreement on Enchanging ASEAN Economic Cooperation and Basic Agreement on the Common Effective Preferential Tarrif for the ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA)*. Framework kerjasama ini merupakan landasan baru bagi perekonomian ASEAN terutama kesepakatan untuk membentuk perdagangan bebas hambatan ASEAN yang berlaku penuh pada tahun 2008.²⁰ Dan melalui Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN, persetujuan CEPT-AFTA akan dikaji ulang dan ditingkatkan menjadi suatu perjanjian yang komprehensif dalam merealisasikan aliran bebas

²⁰ Lihat *framework Agreement on Enchanging economic Cooperation*, Singapore, 1992

barang, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan ASEAN untuk mempercepat proses integrasi ekonomi menuju tahun 2015.²¹

1.2 Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah: **Mengapa ASEAN melakukan kerjasama ekonomi dengan China-India?**

1.3 Signifikansi Penelitian

Sebagai dampak dari kebangkitan ekonomi China-India terhadap kawasan, khususnya di Asia Tenggara mengakibatkan bahwa munculnya keinginan oleh ASEAN untuk melakukan proses integrasi sehingga pada akhirnya ASEAN bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal terhadap diterapkannya integrasi menyeluruh bagi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN.

Oleh karena itu pembahasan dalam tesis ini akan berusaha untuk menguji sejauh mana pengaruh dari kemajuan ekonomi China-India terhadap ASEAN, dimana mengakibatkan kedua negara itu mempunyai *interest* terhadap kawasan Asia Tenggara, sehingga ASEAN perlu menyikapinya dengan membentuk hubungan kerjasama dengan kedua negara tersebut dan melakukan penguatan (integrasi) ekonomi yang lebih mendalam diantara negara-negara ASEAN guna meningkatkan daya saingnya.

Untuk ke depan, penelitian ini diharapkan akan membuka jalan terhadap diskusi dan analisa lebih lanjut mengenai peluang dan tantangan proses integrasi ASEAN yang telah berjalan yaitu dengan terbentuknya Komunitas Ekonomi ASEAN 2015.

²¹ Lihat *Cetak Biru Komunitas ekonomi ASEAN*, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN-DEPLU RI, 2009

1.4 Tinjauan Pustaka

Ide untuk penelitian ini berawal ketika penulis menghadiri dan membaca bahan seminar tentang *Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 dan Implikasinya Bagi Indonesia* yang diadakan oleh Departemen Luar Negeri Republik Indonesia di Kampus Universitas Indonesia pada tanggal 12 Februari 2009. Pada seminar ini dijelaskan bahwa salah satu dinamika eksternal terhadap faktor-faktor pendorong integrasi ekonomi ASEAN adalah munculnya kekuatan baru China dan India.

Kemudian untuk memperdalam kajian tentang hubungan China-India dengan ASEAN yang akan dibahas dalam tesis ini, maka penulis menelusuri literatur buku dan mendapatkan buku bacaan tentang hubungan China-ASEAN yaitu *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations* yang diterbitkan oleh Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACCS) 2006. Buku ini menjelaskan tentang sejarah perkembangan kemajuan ekonomi China dan hubungan dialog yang terjadi antara China dan ASEAN semenjak pertama kalinya ketika China hadir sebagai tamu Pemerintah Malaysia dalam Pertemuan Menteri-Menteri ASEAN (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur sampai terbentuknya hubungan kerjasama antara kedua negara.²²

Sedangkan untuk menjelaskan hubungan India-ASEAN, maka penulis mengambil referensi dari buku yang berjudul *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons* yang diterbitkan oleh Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India, 2004. dalam buku ini dijelaskan tentang kesempatan, tantangan dan peningkatan hubungan antara India-ASEAN semenjak India menjadi partner penuh dialog ASEAN pada Juli 1996.²³

Dan untuk menjelaskan tentang integrasi ekonomi ASEAN, maka penulis mendapatkan rujukan buku bacaan yang berjudul *The ASEAN Community; Unblocking the Roadblocks* yang dikeluarkan oleh Institute of Southeast Asean

²² *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACCS) Vietnam, 2006.

²³ *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons*, Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India, 2004.

Studies Singapore, 2008. buku ini menguraikan bahwa dalam perkembangannya semenjak ASEAN dibentuk, dibutuhkan integrasi ekonomi ASEAN yang lebih mendalam. Hal ini hanya dapat diwujudkan jika ASEAN mempunyai cetak biru dalam mewujudkan dan meningkatkan kerjasama ekonomi regional ASEAN yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.²⁴

1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini menggunakan konsep-konsep yang terkandung dalam kajian ilmu ekonomi-politik internasional yang menekankan pada konsep-konsep dalam perdagangan internasional, yaitu kerangka kerjasama regional.

Perdagangan kawasan, melalui kerjasama regional dan integrasi dalam bentuk perjanjian perdagangan regional (RTAs), meningkat secara global, namun Asia baru melakukan hal ini pada akhir-akhir ini. Integrasi ekonomi Asia adalah "pilihan terbaik kedua" yang mana pendekatan ini harus diikuti oleh negara-negara Asia. Dalam proses integrasi ini, Cina dan India, mengingat jumlah penduduk mereka, serta posisi strategis utama mereka dalam hubungan internasional dan regional, pasti akan memainkan peranan yang penting, dan kadang-kadang bahkan mendominasi.

Menurut Kym Anderson dan Richard Blackhurst, kerangka kerjasama regional (*regional arrangement*) dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengurangi otoritas politik nasional dalam suatu wilayah geografis tertentu.²⁵ Secara akademik tidak terdapat perspektif tunggal yang dapat diterima secara luas untuk menjelaskan motif-motif kerjasama regional. Marry Farrel, misalnya, menyatakan bahwa terdapat dua premis dasar untuk memahami regionalisme. *Pertama*, regionalisme dipandang sebagai tanggapan terhadap globalisasi dan juga suatu reaksi terhadap aspek-aspek yang sangat beragam dari proses globalisasi. *Kedua*, regionalisme dipandang sebagai

²⁴ *The ASEAN Community; Unblocking the Roadblocks*; ASEAN Study Centre report series, no. 1, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2008.

²⁵ Kym Anderson dan Richard Blackhurst, "Introduction and Summary" dalam Kym Anderson dan Richard Blackhurst, *Regional Integration and The Global Trading System* (Harvester Wheatsheaf, 1993), hal. 1.

produk dari dinamika internal dari suatu kawasan, berikut motivasi dan strategi-strategi dari aktor-aktor regional.²⁶

Winters, ketika membahas versus perdebatan *multilateralisme* dengan *regionalisme*, mendefinisikan regionalisme "seperti suatu bentuk kebijakan apa pun yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan antara negara bagian tidak peduli apakah negara-negara tersebut sebenarnya berdekatan atau bahkan dekat satu sama lain".²⁷ Menurut Lamberte, regionalisme mengacu pada "kerjasama ekonomi formal dan pengaturan ekonomi dari sekelompok negara yang bertujuan untuk memfasilitasi atau meningkatkan integrasi regional."²⁸ "Regionalisme harus dibedakan dari regionalisasi, dimana "integrasi yang didorong pasar, didorong oleh sepihak reformasi dalam perekonomian individu dalam suatu wilayah tertentu".²⁹ Berdasarkan literatur, regionalisasi juga mengacu pada tindakan membangun regionalisme melalui publik dan / atau usaha resmi. Menurut *Dictionary of Trade Policy* istilah yang dikembangkan oleh WTO, *regionalisme* digambarkan sebagai "tindakan oleh pemerintah untuk meliberalisasi atau memfasilitasi perdagangan secara regional, kadang-kadang melalui area perdagangan bebas atau serikat pekerja."³⁰ Berdasarkan inspirasinya ini, regionalisme ekonomi kira-kira dapat dipahami sebagai (a) langkah-langkah kerjasama ekonomi formal (b) dilakukan oleh pemerintah (c) memfasilitasi integrasi ekonomi regional (d) terbatas pada wilayah geografis. Dengan kata lain, regionalisme sekarang dapat secara luas dicirikan sebagai kecenderungan penciptaan pengaturan perdagangan preferensial antara jumlah negara yang terletak di tempat yang sama atau bahkan daerah yang berbeda, yang diskriminasi terhadap negara-negara ketiga.

²⁶ Lebih jauh lihat Marry Farrel, "*The Global Politics of Regionalism: An Introduction*", dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne (eds), *Global Politics of Regionalism* (London: Pluto Press, 2005), hal. 120.

²⁷ Alan Winters, "*Regionalism versus Multilateralism*", World Bank Policy Research Working Paper 1687 (Washington D.C.: The World Bank, 1996), hal. 2-3.

²⁸ Mario B. Lamberte, "An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia" in Asian Development Bank, *Asian Economic Cooperation and Integration: Progress, Prospects, and Challenges* (Manila: Asian Development Bank, 2005), hal. 4.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ WTO Secretariat, "Scope of RTAs", online: www.wto.org/english/tratop_e/region_e/scope_rta_e.htm.

Hal ini secara alami mengarah kepada definisi integrasi ekonomi. Bela Balassa, dalam karya *Teori Integrasi Ekonomi*, mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai suatu proses dan keadaan: "Dianggap sebagai proses, hal itu meliputi tindakan yang dirancang untuk menghapus diskriminasi antara unit-unit ekonomi milik negara nasional yang berbeda; dipandang sebagai suatu keadaan, dapat diwakili oleh tidak adanya berbagai bentuk diskriminasi antara ekonomi nasional".³¹

Dalam kedua literatur dan instrumen hukum integrasi ekonomi, istilah "pasar tunggal" menjadi semakin populer. Undang-undang Eropa Tunggal tahun 1987 secara resmi menciptakan Single Pasar di Eropa yang datang ke dalam operasi pada tanggal 1 Juli 1987.¹¹ Pada tahun 2003 Deklarasi Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Concord II (Bali Concord II), para kepala negara ASEAN mengadopsi tujuan bahwa "Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membuat ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi."³²

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi proliferasi bilateral dan perjanjian perdagangan bebas (FTA) regional di Asia Timur. FTA tampaknya menjadi cara terbaik untuk mempercepat proses liberalisasi perdagangan dalam menghadapi lambatnya proses pada Putaran Doha di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Disamping AFTA, ASEAN juga tertarik untuk membangun hubungan ekonomi dengan mitra dialog, melalui FTA ASEAN '+1'. ASEAN saat ini memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Cina, Jepang, Korea, India, Australia, dan Selandia Baru. Pada tahun 2015, ASEAN tidak hanya berniat untuk membentuk masyarakat ekonomi tetapi juga hubungan FTA kawasan.

Namun, proses liberalisasi perdagangan ini sangat berbeda dari proses yang dikendalikan pasar yang menjadi ciri khas daerah di masa lalu. Sampai akhir 1990-an, peningkatan ekonomi yang saling ketergantungan (sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan intra-regional dan investasi) di kawasan berlangsung tanpa kerangka formal kerjasama ekonomi. Tren baru FTA adalah preferensial di bidang dan tempat-

³¹ Bela Balassa, *The Theory of Economic Integration* (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1961), hal, 1.

³² The text of the Bali Concord II is available online at <<http://www.aseansec.org/15159.htm>>.

tempat yang lebih menekankan pada kerjasama ekonomi formal melalui perjanjian perdagangan antara dua atau lebih negara.³³

Langkah terbaik bagi ASEAN dalam menghadapi kebangkitan China-India sebagai kekuatan besar (ekonomi) yang mempunyai kepentingan strategis di kawasan adalah dengan mengembangkan regionalisme multilateral melalui berbagai forum seperti ARF, ASEAN Plus Three (APT), dan East ASEAN Summit. Langkah ini dimaksudkan untuk membentuk suatu regionalisme terbuka-*inklusif* (*open regionalism*) atas kerjasama fungsional.³⁴

Regionalisme terbuka adalah bagian integral dari keberhasilan RTAs yang merupakan blok pembangun sistem perdagangan multilateral. "Regionalisme terbuka" didefinisikan sebagai memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) keanggotaan terbuka, dengan keanggotaan diperluas, yang didasarkan pada hubungan timbal-balik; (2) komitmen anggota untuk menurunkan hambatan perdagangan eksternal sementara liberalisasi perdagangan secara internal pada dasar hubungan timbal-balik; (3) dorongan untuk melakukan liberalisasi *unilateral* oleh anggota kepada anggota lain atau bukan anggota.³⁵

Sebagai organisasi regional, ASEAN telah menjadi pelopor hubungan dialog dengan sejumlah negara dan tetangga dekat, termasuk Cina-India. Dan saat ini ASEAN lebih terbuka untuk ber-inisiatif membangun mitra dialog dalam kerja sama ekonomi dan sosial. Dalam bidang ekonomi, Cina-India dapat dihubungkan dengan AFTA melalui fasilitasi perdagangan.

ASEAN mencermati fakta ini dan sadar bahwa hal itu menjadi alasan yang logis untuk memasukkan China dan India dalam kerangka regional dan dengan demikian, ASEAN bisa memanfaatkan keuntungan dari bangkitnya kekuatan

³³ Denis Hew, *Realizing The ASEAN Economic Community by 2015*, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds), *The Inclusive Regionalist*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, Indonesia, 2007. Pages 278.

³⁴ Hadi Soesastro, *Implementing the ASEAN Economic Community Blueprint*, dalam *The ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2008, hal. 33.

³⁵ C. Fred Bergsten, "Open Regionalism" Working Paper 97-3 (Washington D.C.: Institute for International Economics, 1997), online: <http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=152>.

ekonomi kedua Negara tersebut. Salah satu tujuan dari Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Komprehensif yang ditandatangani adalah untuk "memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari negara-negara anggota ASEAN yang baru dan menjembatani kesenjangan pembangunan di antara kedua belah pihak".³⁶ Ada tumbuh kesadaran bahwa perbedaan regional perlu diatasi dan kerja sama harus ditingkatkan, untuk memperluas jangkauan negara-negara yang memperoleh manfaat dari pertumbuhan di wilayah ini.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan **pendekatan kualitatif** yaitu pendekatan yang menekankan pada penarikan kesimpulan berdasarkan interpretasi terhadap fenomena maupun fakta. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode **studi kasus** (*case study*); menurut Alan Bryman, studi kasus adalah "analisa yang seksama dan intensif terhadap sebuah kasus tunggal".³⁷ Metode ini biasanya mencoba untuk memahami kompleksitas dan sifat khas dari kasus yang diteliti; fokus penelitian adalah antara lain terhadap suatu komunitas, sekolah, keluarga, organisasi, individu, atau peristiwa tertentu.³⁸ Dalam konteks penelitian ini, studi kasus yang akan dilakukan mengikuti definisi Andrew Bennett yaitu sebuah "analisa dari sebuah aspek dari suatu peristiwa sejarah yang didefinisikan dengan baik".³⁹ Menurut Bennett, suatu peristiwa sejarah terdiri dari bermacam-macam variabel bebas (*independent*) maupun terikat (*dependent*) sehingga melalui studi kasus seorang peneliti dapat memfokuskan pada aspek-aspek yang menarik baginya.⁴⁰

³⁶ "Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations" ASEAN Official Website, <http://www.aseansec.org/15278.htm>, accessed on 16 November 2007

³⁷ Alan Bryman. *Social Research Methods* (2nd ed.). New York: Oxford University Press, 2004, hal. 48.

³⁸ *Ibid.*, hal. 48-49.

³⁹ Andrew Bennett. "Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages". *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*. Eds. Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004, hal. 21.

⁴⁰ *Ibid.*

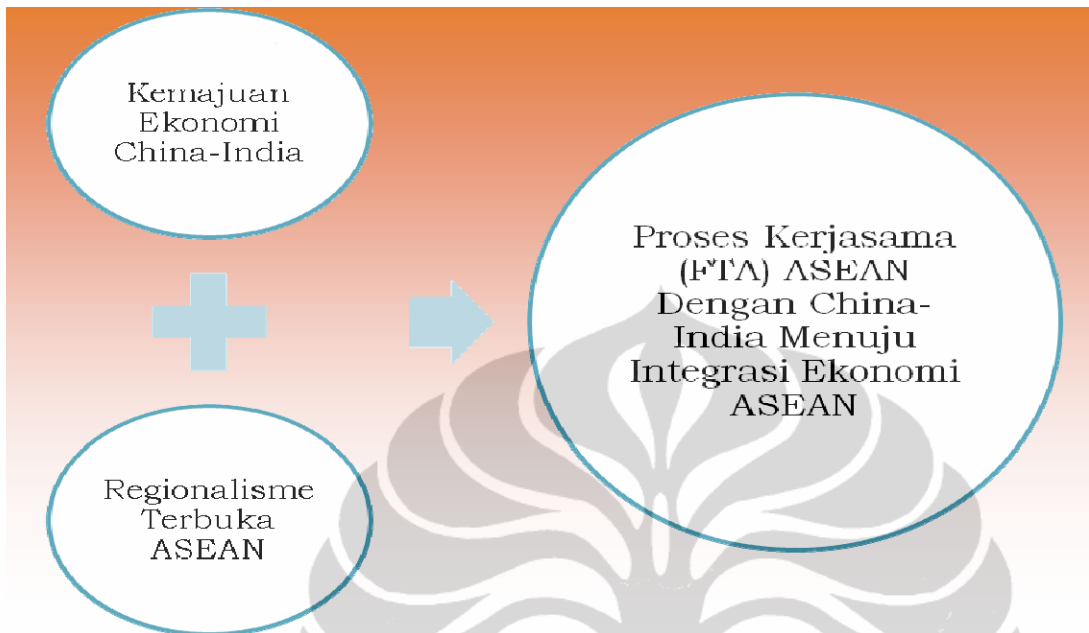
Kasus yang menjadi fokus analisa penelitian ini adalah dampak dari kemajuan ekonomi China-India terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN dengan rentang waktu jangkauan penelitian dari tahun 2000 sampai tahun 2008. **Variabel terikat** dalam kasus ini adalah kemajuan ekonomi China-India sementara **variabel bebas** dalam kasus ini adalah proses integrasi ekonomi ASEAN. Penelitian ini akan menganalisa hubungan sebab-akibat antara kedua variabel ini berdasarkan pengamatan terhadap fenomena dan fakta seputar kasus yang diteliti.

Analisa dampak dari kemajuan ekonomi China-India terhadap proses integrasi ekonomi ASEAN akan menggunakan teknik pengumpulan data yang terkait dengan studi dokumen serta metode pengumpulan data yang mengacu pada studi akademis mengenai hubungan kerjasama ekonomi China-India dengan ASEAN dan proses integrasi ekonomi ASEAN. Studi dokumen adalah teknik pencarian data yang mengandalkan dokumen resmi atau kebijakan terkait yang dikeluarkan pemerintah China-India dan institusi ASEAN, sedangkan studi literatur adalah teknik pengumpulan yang bersifat pada bentuk data teoritis atau data-data yang terdapat pada karya-karya ilmiah. Data yang dianalisa akan diklasifikasi atau dikelompokkan berdasarkan karakteristik masing-masing fungsi data, sesuai dengan tujuan penelitian. Data-data yang didapat merupakan hasil pencarian yang berbentuk dokumen, buku, artikel, jurnal, dan majalah, serta melalui situs internet. Data-data tersebut adapun didapat melalui berbagai tempat, seperti ASEAN Sekretariat, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Unit Perpustakaan dan Dokumentasi Hubungan Internasional (UPDHI) FISIP UI Depok, Perpustakaan FISIP UI Salemba, *website*, dan Jurnal Jstor, serta sumber-sumber lainnya.

1.7 Hipotesis

ASEAN menyikapi kemajuan ekonomi China-India dengan cara menjalin hubungan kerjasama (open regionalism), khususnya dibidang ekonomi untuk meningkatkan daya saing dalam usahanya mewujudkan integrasi ekonomi ASEAN.

1.8 Model Analisis



Kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan dalam batasan pertanyaan penelitian yang menjelaskan bahwa kemajuan ekonomi yang terjadi di China dan India disikapi oleh ASEAN dengan cara yang lebih terbuka, yaitu dengan cara memasukkan China dan India dalam kerangka kerjasama regional. Hal ini bisa dilihat dari fasilitasi perdagangan, baik berupa kesepakatan kerjasama ekonomi yang dibuat oleh ASEAN dengan China dan India untuk meningkatkan nilai perdagangan, nilai FDI, dan lain-lainya. Sehingga pada akhirnya memudahkan langkah ASEAN menuju integrasi ekonomi yang lebih mendalam.

1.9 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis ini akan dibagi dalam lima bab:

Bab pertama adalah latar belakang mengenai proses eksternal dari terbentuknya integrasi ekonomi sebagai dampak dari kemajuan ekonomi China-India dan pertanyaan penelitian yang diajukan, serta metodologi penelitian yang digunakan.

Bab kedua akan lebih banyak berbicara tentang sejarah hubungan antara ASEAN dengan China-India, proses terbentuknya jalinan hubungan kerjasama antara ASEAN dengan China-India, serta posisi China-India di kawasan Asia Tenggara.

Bab ketiga menguraikan tentang kemajuan ekonomi China-India, yang selanjutnya menguraikan tentang sejarah hubungan dan proses kerjasama ekonomi ASEAN dengan China-India. Proses tersebut melahirkan kerjasama perdagangan (FTA) antara ASEAN-China dan ASEAN-India.

Bab keempat akan lebih banyak menguraikan tentang sikap *open regionalism ASEAN*. Sikap ini muncul sebagai dampak dari terbentuknya proses regionalisme di kawasan Asia Tenggara pada periode setelah krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1997. Sikap ini menuntut ASEAN untuk membuka hubungan kerjasama dengan negara-negara diluar kawasan ASEAN dan pada akhirnya melahirkan wacana untuk membentuk integrasi ekonomi.

Bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan dari pertanyaan penelitian.

BAB 2

SEJARAH HUBUNGAN ASEAN DENGAN CHINA-INDIA

Bab ini merupakan sebuah tinjauan historis terhadap hubungan ASEAN dengan China-India. Bagian pertama dan kedua dari bab ini akan melihat sejarah hubungan ASEAN dengan China-India yang dimulai dari terbentuknya ASEAN pada tahun 1967, dan dalam bagian ini juga akan dipaparkan mengenai kepentingan kedua negara ini terhadap ASEAN. Bagian ketiga akan membahas tentang posisi China-India dikawasan Asia Tenggara. Tujuan dari bab ini adalah memberikan gambaran bagaimana proses perkembangan hubungan ASEAN dengan China-India, sehingga kedua negara ini memiliki peranan yang sangat penting bagi kawasan Asia Tenggara khususnya bagi ASEAN.

2.1 Sejarah Hubungan Asean Dengan China

Hubungan antara China dan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan negara-negara anggotanya telah mengalami perubahan yang signifikan selama 15 tahun terakhir. Ketika Beijing pertama kali membentuk kontak resmi dengan anggota asli-6 ASEAN pada tahun 1991, hubungan diplomatik dengan Indonesia susah untuk diperbaiki, namun China mulai menormalkan hubungan dengan Vietnam, dan hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Singapura. Ada kecurigaan yang kuat, serta kekhawatiran, diantara negara-negara anggota ASEAN atas meningkatnya kekuatan China dan niatnya ke Asia Tenggara. Berdasarkan sejarah, Beijing meng-klaim kedaulatan atas Kepulauan Spratly di Laut China Selatan, mengerahkan dan sesekali menggunakan kekuatan militernya untuk menegaskan klaim teritorial (dengan Vietnam Selatan pada tahun 1974, dan dengan Vietnam pada tahun 1988), membayangi negara-negara Asia Tenggara pada saat ketidakpastian komitmen AS yang melakukan penarikan militer di wilayah itu (misalnya, dengan ditutupnya pangkalan militer Subic dan Clark di Filipina pada tahun 1991). Secara eksternal

maupun internal strategi penyeimbangan ASEAN di awal 1990-an sangat banyak didorong oleh penilaian suram tersebut.

2.1.1 Perubahan Hubungan ASEAN Dengan China: Dari Permusuhan Menuju Pertemanan

Sejarah China dengan tetangganya Asia Tenggara selama terjadinya Perang Dingin adalah salah satu bentuk baik persahabatan dan permusuhan. Indonesia (April 1950) dan Burma (Juni 1950) adalah di antara beberapa negara yang pertama kali mengakui Republik Rakyat China (RRC). Dari awal 1950-an sampai pertengahan tahun 1960-an, Beijing menikmati kehangatan hubungan terutama dengan Jakarta, yang paling menonjol adalah ketika Konferensi Negara Asia Afrika di Bandung tahun 1955 dan berlanjut semasa pemerintahan Presiden Sukarno. Beijing juga mempertahankan hubungan dekat dengan rezim komunis di Vietnam Utara dan memberikan dukungan yang signifikan atas perlawanan mereka terhadap Perancis dan Amerika Serikat dari tahun 1950 hingga 1970-an, yaitu berupa bantuan secara material yang cukup besar dan bantuan tenaga manusia.¹

Tapi hubungan China dengan negara-negara Asia Tenggara non-komunis banyak yang tidak harmonis. Kekhawatiran atas potensi ancaman dari komunisme membuat beberapa dari mereka untuk berpartisipasi membentuk aliansi seperti organisasi regional (Southeast Asian Treaty Organization atau SEATO, 1954-1977; the Five-Power Defense Arrangements atau FPDA, 1971-) dengan kekuatan eksternal-Amerika Serikat khususnya-untuk melindungi kepentingan mereka. Ada kecurigaan mendalam atas motif dan kegiatan China, terutama karena mereka banyak berhubungan dengan masyarakat luar negeri China di negara-negara tersebut.² Dukungan publik Beijing terhadap pemberontak komunis

¹ Joyce K. Kallgren, Noordin Sopiee, and Soedjati Djiwandono, eds., *ASEAN and China: An Evolving Relationship*, Berkeley, California: Institute of East Asian Studies, University of California at Berkeley, 1988.

² Leo Suryadinata, *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*, Singapore: Singapore University Press, 1985.

di kawasan hanya memperkuat persepsi dan ketakutan mereka. Tidak mengherankan, banyak dari mereka tidak mau membangun hubungan diplomatik dengan Beijing sampai pertengahan tahun 1970-an (Thailand, Malaysia, dan Filipina), dan beberapa negara hanya menormalisasi hubungan dengan China pada 1990-an (Singapura dan Indonesia).³

Pemulihan hubungan Sino-Amerika di awal 1970-an menyebabkan pembentukan hubungan diplomatik antara China dan beberapa negara ASEAN. Kerjasama China-ASEAN muncul di akhir 1970-an, ironisnya sebagian besar didorong oleh keprihatinan bersama mereka atas keinginan Vietnam yang berusaha untuk mendirikan hegemoni di Indo-China, khususnya setelah invasi ke tetangga Kamboja. Thailand, yang berada di garis depan konflik Kamboja, berusaha mengembangkan hubungan keamanan dengan China. China juga berkoordinasi dengan ASEAN dalam mencari penyelesaian masalah politik Kamboja dan nantinya didukung oleh posisi pemerintah koalisi Kamboja yang dipimpin oleh Pangeran Sihanouk (bukan Hanoi-didukung rezim Heng Samrin) untuk mewakili Phnom Penh di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).⁴

Selama tahun 1980-an, kebijakan China ke Asia Tenggara mulai mengalami perubahan penting dalam dua hal. Beijing mulai menempatkan hubungan negara ke negara dalam ikatan hubungan ideologis dengan cara menghentikan dukungannya terhadap gerakan pemberontakan komunis di kawasan. Pada tahun 1989, juga mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan China terhadap warga negaranya yang tinggal diluar negeri yang butuh pengadopsian kewarganegaraan. Dengan mengambil dua langkah penting ini membuat hubungan bilateral China dengan sejumlah negara Asia Tenggara mulai membaik.

³ Reuben Mondejar and Wai Lung Chu, "ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions," in Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, eds., *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005, hal, 211-227.

⁴ Alice D. Ba, "China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st Century Asia," *Asian Survey*, Vol. 43, No. 4, September/October 2003, hal, 622-647; Wang Gungwu, "China and Southeast Asia: Changes in Strategic Perceptions," in Leong and Ku, eds., *China and Southeast Asia*, hal, 3-14.

Beijing tampak ingin membina hubungan yang lebih baik dengan tetangga Selatan, dan ini telah membuka jalan bagi perbaikan hubungan politik.⁵

Kontak resmi Beijing dengan ASEAN sebagai kelompok dimulai pada bulan Juli 1991 ketika Menteri Luar Negeri China Qian Qichen diundang untuk menghadiri upacara pembukaan Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24. Sejak saat itu China secara berurutan terus menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN. Pada tahun 1994, China berpartisipasi dalam Forum Regional ASEAN (ARF) dan menjadi mitra dialog konsultatif ASEAN. Status ini meningkat pada tahun 1996, ketika China menjadi mitra dialog penuh dengan ASEAN. Pada bulan Desember 1997, Presiden China Jiang Zemin dan pemimpin ASEAN mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Malaysia dan mengeluarkan pernyataan bersama mengumumkan keputusan mereka untuk membangun hubungan kemitraan yang lebih baik dan sikap saling percaya antara China dan ASEAN yang berorientasi pada abad ke-21. Pada bulan Oktober 2003, China dan ASEAN menandatangani "Deklarasi Bersama RRC dan Pemimpin Negara ASEAN-Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kesejahteraan."⁶

Perkembangan utama dalam hubungan ASEAN-China sejak berakhirnya Perang Dingin mungkin disebabkan karena saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh di antara keduanya. Bahkan, perdagangan dua arah telah berkembang pada tingkat 20 persen selama sepuluh tahun terakhir dan mencapai lebih dari US \$ 100 miliar pada tahun 2004, mencapai target satu tahun lebih cepat dari yang diperkirakan. Pada tahun 2005, tercatat peningkatan sebesar 23%, mencapai US \$ 130.4 milyar.⁷ Negara anggota ASEAN memperoleh manfaat dari pertumbuhan ekonomi China yang spektakuler sebagai raksasa Asia dan juga menghasilkan manfaat ekonomi bagi kawasan secara keseluruhan. Sebagai contoh, pada tahun

⁵ N. Ganesan, "ASEAN's Relations with Major External Powers," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 2, August 2000, hal, 264.

⁶ Wang Gungwu, "China and Southeast Asia: The Context of a New Beginning," in David Shambaugh, ed., *Power Shift: China and Asia's New Dynamics*, Berkeley, CA: University of California Press, 2005, hal, 187-204

⁷ Xinhua, "China-ASEAN Trade Soaring," January 17, 2006, english.sina.com/business/1/2006/0117/62228.html.

2004, ASEAN mencapai perdagangan yang surplus sebesar US \$ 20 miliar dengan China, sementara mitra dagang utama China lainnya memiliki defisit yang cukup besar.⁸

Para analis China telah membagi evolusi hubungan ekonomi ASEAN-China menjadi dua tahap. Yang pertama, dari tahun 1991, ketika Menteri Luar Negeri China Qian Qichen diundang untuk menghadiri Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN ke-24, untuk tahun 2001 ketika Presiden China Zhu Rongji mengusulkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, melihat kedua belah pihak memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan bilateral. Tahap kedua dimulai pada bulan November 2002, dengan penandatanganan *Agreement on Comprehensive Economic Cooperation* China-ASEAN menuju integrasi ekonomi regional. Selama bertahun-tahun, China dan ASEAN telah melembagakan 48 mekanisme reguler untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi yang lebih erat. Yang paling terkemuka antara mereka adalah mekanisme politik ASEAN+1, yang diluncurkan pada tahun 1997. Selain itu, ada lima kelompok kerja: Pertemuan Pejabat Senior China-ASEAN, Komite Kerjasama Bersama China-ASEAN, Komite Kerjasama Bersama Ekonomi dan Perdagangan ASEAN-China, Komite Bersama Sains dan Teknologi ASEAN-China (Juli 1994), dan Komite Beijing-ASEAN. Kedua belah pihak juga telah mengidentifikasi lima bidang utama kerjasama; pertanian, teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan sumber daya manusia, Pembangunan Sungai Mekong, dan investasi bersama.⁹

Pada KTT ASEAN ke-delapan di Phnom Penh, Kamboja, pada bulan November 2002, China dan ASEAN menandatangani *the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation*. Jika hal ini diimplementasikan, akan merupakan pasar umum bagi 1,7 miliar orang, dengan produk domestik bruto gabungan (PDB) sebesar US \$ 1,5-2 milyar. Kedua belah pihak berusaha

⁸ Wayne Arnold, "China Rise Not Doom for Others," International Herald Tribune, February 28, 2006. www.iht.com/articles/2006/02/28/business/asiaecon.php.

⁹ Zhang Haibing, "Zhongguo-dongmeng quyu jingji hezuo de xinjinzhan yu wenti" ["Progress and Problems in China-ASEAN Regional Economic Cooperation"], Guoji wenti luntan [International Review], No. 38, Spring 2005. www.sis.org.cn/gjwlt/2005/zhanghaibin.htm.

membangun kawasan perdagangan bebas (FTA) dalam waktu 10 tahun, pertama dengan ASEAN asli-6 pada tahun 2010, diikuti oleh seluruh ASEAN-10 pada tahun 2015.¹⁰ Inisiatif sebagian besar berasal dari China, seperti diakui bahwa selama ini negara anggota ASEAN merasa khawatir terhadap pertumbuhan ekonomi China, efek *crowding-out* arus investasi ke Asia Tenggara dan peningkatan persaingan ekonomi. Setelah Perdana Menteri Zhu mengusulkan ide FTA, an ASEAN-China Expert Group on Economic Cooperation didirikan untuk menindaklanjuti proposal Zhu, serta dampak dari bergabungnya China kedalam World Trade Organization (WTO) pada tahun 2001. Hal ini juga merupakan respon terhadap krisis keuangan Asia 1997 dan oleh karena itu perlunya pendekatan yang lebih regional untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Kerjasama juga meliputi proyek pembangunan Sungai Mekong Basin yang telah didukung oleh Asian Development Bank dan disahkan oleh ASEAN senilai US \$ 2,5 miliar untuk pembangunan jalur kereta api Trans-Asia Kunming dan Singapura.¹¹

Meskipun ada banyak alasan untuk melakukan integrasi ekonomi yang lebih besar, beberapa analis menunjukkan alasan strategis untuk mengembangkan FTA, terutama dari perspektif China. Untuk memulai, dalam menanggapi kemajuan ekonomi China yang terus meningkat, suatu perjanjian dapat dirancang guna menciptakan lingkungan keamanan kawasan yang damai. Kedua, untuk menanggapi kekhawatiran yang muncul di kawasan terhadap tumbuhnya kekuatan China adalah dengan cara mengintegrasikan diri dengan ASEAN, sehingga meminimalkan potensi konflik. Analis China menyarankan bahwa CAFTA harus dilihat dari perspektif strategis dan bagian dari penciptaan perdamaian. Geo-ekonomi dan interaksi ekonomi yang lebih luas dengan ASEAN

¹⁰ John Wong and Sarah Chan, "China-ASEAN Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations," *Asian Survey*, Vol. 43, No. 3, May/June 2003, hal. 507-526; Thitapha Wattanaputtipaisan, "ASEAN-China Free Trade Area: Advantages, Challenges, and Implications for the Newer ASEAN Member Countries," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 20, No. 1, April 2003, hal. 31-38; James Laurenceson, "Economic Integration between China and the ASEAN-5," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 20, No. 2, August 2003, hal. 103-111.

¹¹ Joseph Yu-Shek Cheng, "The ASEAN-China Free Trade Area: Genesis and Implications," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 2, June 2004, hal. 257-277.

akan mendukung tujuan-tujuan ini. Untuk mendahului strategi Taiwan yang melirik ke Asia Tenggara, China harus memberikan perhatian yang lebih besar bagi pengembangan wilayah barat daya (Yunnan dan Guangxi khususnya) untuk mengembangkan dan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara ASEAN.¹²

Ketiga, dengan mengambil peran utama dalam membentuk FTA, China juga berharap untuk dapat memainkan peran yang lebih menonjol sebagai pusat kawasan pertumbuhan ekonomi. Keempat, dengan berinvestasi lebih banyak di kawasan dan penerapan "Early Harvest Program," dapat memberikan perlakuan istimewa pada produk pertanian negara-negara Asean dalam hal penurunan tarif dan akses pasar- Beijing berupaya untuk mengatasi anggapan "ancaman China," tidak di area keamanan, tetapi dalam konteks persaingan ekonomi. Dan akhirnya, dengan memasukkan pengaturan perdagangan bebas berbasis-aturan, China juga ingin menunjukkan sikap penerimaan atas multilateralisme, menghormati norma-norma dan aturan. Untuk beberapa alasan negara anggota ASEAN berusaha untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi China yang dinamis, setidaknya tidak sampai tertinggal. Sebuah FTA juga dapat mendorong kekuatan eksternal lainnya untuk membuat pola kesepakatan yang sama, sehingga membuka lebih banyak peluang di bidang perdagangan dan investasi asing langsung (FDI).¹³

Sementara itu, perdagangan China-ASEAN tercatat mengalami pertumbuhan yang pesat selama dekade terakhir, keduanya menempati peringkat kelima sebagai mitra dagang, setelah intra-ASEAN, Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa (UE). Perkembangan di masa depan akan tergantung pada bagaimana keduanya bisa melengkapi, tidak saling bersaing di sektor manufaktur tenaga kerja intensif dan saling meningkatkan nilai investasi. Negara-negara ASEAN melihat peluang dari kemajuan China, tetapi mereka juga khawatir atas dampak

¹² Qiu Danyang, "Zhongguo-dongmeng ziyu maoyiqu: zhongguo heping jueqi de diyuan jingjixue sikao" ["China-ASEAN FTA: On the Geo-Economics of China's Peaceful Rise"], *Dangdai yatai* [Contemporary Asia-Pacific Studies], No. 1, January 2005, hal. 8-13.

¹³ Sheng Lijun, "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations," ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues Series No. 1, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003

jangka panjang kekuatan China dalam bersaing untuk mendapatkan investasi asing langsung, menggantikan mereka sebagai produsen produk tenaga kerja intensif dan sebagai basis manufaktur. Hal ini akan menyebabkan kemerosotan ekonomi yang parah di negara-negara ASEAN jika kurang mampu dalam bersaing dan melakukan penyesuaian.¹⁴

The CAFTA telah menghasilkan banyak minat pada kekuatan ekstra-regional lain yang menjalin hubungan FTA dengan ASEAN. Dengan CAFTA, ASEAN +1, dan forum regional lainnya, termasuk Pertemuan Asia Timur pada Desember 2005, mengidentifikasikan bahwa trend dari perkembangan regionalisme menuju pasar bersama, menumbuhkan saling ketergantungan ekonomi, dan bahkan berbagi ide tentang arsitektur keamanan regional yang harus dibentuk.¹⁵

Hubungan China-ASEAN telah berevolusi dari permusuhan dan kecurigaan untuk persahabatan dan kerjasama yang lebih besar pada berbagai isu. Setelah membangun suatu kemitraan strategis perdamaian dan kemakmuran, kerjasama kedua belah pihak mengarah pada hubungan yang stabil, dalam jangka waktu yang lama untuk masa depan. Selain keamanan antar kedua negara, jalinan hubungan ekonomi telah dimulai sejak reformasi pada akhir 1970-an, Partai Komunis China (PKC) telah berusaha untuk membangun dan memperluas hubungan dengan partai politik di Asia Tenggara. Saat ini, PKC memiliki hubungan resmi dengan 39 partai politik di kawasan, dengan alasan dan tujuannya adalah untuk mempromosikan saling pengertian, pembelajaran, keberhasilan ekonomi, dan pemerintahan (terlepas dari ideologi). Perkembangan ini jauh dari tahun 1960-an dan 1970-an ketika PKC

¹⁴ Mari Pangestu, "China's Economic Rise and the Responses of ASEAN," in Kokubun Ryosei and Wang Jisi, eds., *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo and New York: Japan Center for International Exchange, 2004, hal. 241-263.

¹⁵ Mark Beeson, "ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 2, August 2003, hal. 251-268

mendukung pergerakan partai-partai komunis sebagai bagian dari strategi gerakan revolusi di kawasan untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.¹⁶

Upaya Beijing untuk meyakinkan tetangga melalui yang disebut diplomasi baru telah berhasil mengembalikan kepercayaan dari tetangga Asia Tenggara, tapi hal itu tidak sepenuhnya menghapus perselisihan di antara mereka. Krisis keuangan Asian tahun 1997 adalah titik balik. China memberikan respon terhadap krisis, termasuk janji memberikan bantuan sebesar US \$ 1 milyar untuk membantu Thailand dan tidak menedevaluasi Renminbi, yang mana sangat membantu negara-negara ASEAN. Meskipun tetap hormat kepada ASEAN, Beijing jadi terlihat lebih percaya diri dalam memainkan potensi peran kepemimpinannya di kawasan.¹⁷

China mulai menerbitkan Buku Putih Pertahanan pada tahun 1998. Sekarang diterbitkan setiap 2 tahun, dokumen ini juga telah berubah dari sekedar eksposisi prinsip-prinsip umum menjadi beberapa penjelasan dasar tentang anggaran pertahanan, program modernisasi, dan isu-isu doktrinal. Meskipun masih jauh dari ideal, setidaknya beberapa langkah sederhana telah dibuat untuk meningkatkan transparansi. China juga mengemukakan "Konsep Keamanan Baru" (NSC) di the ARF Inter-Sectional Support Group (ISG) dalam mengukur tingkat kepercayaan yang dilakukan bersama dengan Filipina di Beijing, pada bulan Maret 1997. NSC menekankan pada kerjasama keamanan, membangun kepercayaan, resolusi damai atas sengketa, dan dialog multilateral.¹⁸ Pada bulan November 2004, China menjadi tuan rumah pertama Konferensi Kebijakan Keamanan ARF di Beijing. Dalam satu dekade, tumbuh rasa saling ketergantungan, dan keberhasilan diplomasi China telah membuat peningkatan yang stabil dengan meningkatnya tingkat kenyamanan antara

¹⁶ Jiang Shuxian and Sheng Lijun, "The Communist Party of China and Political Parties in Southeast Asia," Trends in Southeast Asia Series, Vol. 14, 2005, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, December 2005.

¹⁷ Jürgen Haacke, "Seeking Influence: China's Diplomacy Toward ASEAN after the Asian Crisis," Asian Perspective, Vol. 26, No. 4, 2002, hal. 13-52.

¹⁸ "Summary Report of the ARF ISG on Confidence Building Measures, Beijing, 6-8 March 1997," www.aseansec.org/3605.htm.

China dan ASEAN, yang memungkinkan Beijing untuk memperluas pengaruhnya yang lebih besar di kawasan.¹⁹

2.1.2 Kepentingan China terhadap ASEAN

Di balik retorika alih-alih kerjasama multi-polar, pemerintah China sekarang berbicara tentang integrasi multilateral, dengan slogan "*peaceful rise*" menjadi "*peaceful development*"-tidak lebih dari sekadar kamufase atas kebijakan yang tidak berubah secara mendasar. Ketergantungan terhadap investasi asing langsung, dan meningkatnya ketergantungan dengan struktur ekonomi internasional, dan pada impor sumber daya dan energi, China telah berangsur-angsur berubah menjadi hampir autarkic, ekonomi mandiri dengan ketergantungan ekonomi terbesar di dunia. Hal ini berdampak ganda terhadap kebijakan pemerintah China. Dimana pemerintah harus memastikan kerangka politik sedinamis mungkin untuk mencegah jatuhnya ketergantungan terhadap sistem ekonomi luar, tetapi pemerintah juga bergantung pada sistem ini untuk mempertahankan kekuatan dan legitimasinya sebagai partai yang berkuasa. Efek ganda ini mempengaruhi perilaku China dalam hubungan eksternalnya. China berusaha mencari ruang baru untuk memperluas pasar dan kemitraan baru untuk pengembangan, dengan tujuan ganda: untuk memastikan terus masuknya sumber daya dan modal, dan untuk melindungi kepentingan pasar dalam produksi ekspor.

Namun, kebijakan pemerintah China juga waspada terhadap usaha-usaha "campur tangan luar dalam urusan internal." Kebijakan-kebijakan ini diarahkan pada setiap inisiatif atau kegiatan di mana kepemimpinan melihat potensi ancaman terhadap dominasi, kekuasaan atau legitimasi. China terus-menerus mempertahankan statusnya sebagai negara berkembang, dan mengatakan bahwa sebagai proses dari transformasi, China akan mau menerima bantuan lebih lanjut.

¹⁹ Chairman's Summary of the First ASEAN Regional Forum Security Policy Conference, Beijing, November 4-6, 2004," from the ASEAN Secretariat website; Evan S. Medeiros and M. Taylor Fravel, "China's New Diplomacy," *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 6, November/December 2003, hal. 22-35; Brantly Womack, "China and Southeast Asia: Asymmetry, Leadership and Normalcy," *Pacific Affairs*, Vol. 76, No. 3, Winter 2003-2004, hal. 529-548; Roy, "Southeast Asia and China," hal. 309.

Retorika ini berkorelasi langsung pada kepentingan strategis China terhadap negara-negara mitranya di kawasan Asia dan Afrika.

Secara eksternal, China berusaha keras untuk meningkatkan reputasi dan *image*-nya sebagai agen yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan aktor dalam kerjasama antar negara. Dengan demikian, di bawah premis *non-interference*, China sedang bergerak menuju kerjasama multilateral, yang lebih atau kurang jelas-jelas diikat pada harapan-harapan tentang negara mitranya untuk memajukan tujuan-tujuan termasuk pembangunan ekonomi dan mempertahankan kelanjutan dari sistem politik sendiri. Secara umum taktik China untuk melakukan kerja sama, termasuk dengan menggunakan kebijakan yang lebih lunak (*soft power policy*) adalah untuk memperingatkan dunia tentang konsekuensi dari masalah transnasional yang tidak menguntungkan yang timbul dari dalam China- misalnya dalam sektor lingkungan-tapi pada saat yang sama, China menantang negara-negara mitra untuk ambil bagian dalam memecahkan masalah ini.

Beberapa mendorong peningkatan kerja sama yang erat dengan China dengan tujuan untuk dapat menekan kekhawatiran atas ekspansi imperialis China di Asia Timur. Pemikiran lainnya menunjukkan bahwa pragmatisme tentang China secara negatif dapat mempengaruhi kepentingan negara-negara kecil di kawasan, seperti dalam kasus Myanmar. Tentu saja hal ini akan merusak atau melemahkan upaya ASEAN untuk menciptakan pondasi politik yang satu dengan (misalnya) mendukung kolaborasi bilateral. Oleh karena itu timbul kecurigaan yang mendalam bahwa membangun kerjasama dengan China yang pragmatis ternyata bisa menjadi keputusan tergesa-gesa, misalnya jika krisis di Taiwan berkejolak, hubungan China dengan Amerika Serikat memburuk, pasokan energi terputus, atau stabilitas politik dalam negeri yang membahayakan.

Dengan demikian, dari sudut pandang eksternal, setiap negara pasti akan ragu dengan tidak adanya transparansi pada konsep jangka panjang kebijakan luar negeri dan regional China. Beijing mengumumkan kriteria yang sangat retorik tentang "hidup dan biarkan hidup," keadilan, tanggung jawab aktif, menahan diri dan tidak campur tangan-untuk beberapa nama-adalah sangat bertentangan

terhadap tindakan China yang sewenang-wenang untuk sebagian besar negara-negara di kawasan, kebijakan China saat ini dari selektif membuka atau menutup mata tergantung pada kepentingannya sendiri dan secara mendasar tidak sesuai dengan harapan eksternal.

Perwujudan peran kebijakan regional China yang bermacam-macam, dalam spektrum yang meragukan antara mempertahankan atau mengubah status quo di kawasan. Dalam setiap kasus, untuk setiap konvergensi antara peningkatan kekuatan China dan negara-negara ASEAN terletak pada sistem regional kolektif; kemampuan dalam bernegosiasi dan tanggung jawab yang berkelanjutan.²⁰

Ada beberapa faktor yang menyebabkan China membangun hubungan dengan ASEAN, khususnya dibidang ekonomi, yaitu:

1. Kebijakan reformasi yang dijalankan oleh pemerintah China.
2. Kebijakan China dalam hal berhubungan dengan tetangga secara bersahabat.
3. Kedekatan geografis dan sejarah serta budaya dengan ASEAN.
4. Keterbatasan bahan mentah di China dan kepentingan nasional China yang ingin menggantikan posisi hegemoni dalam perekonomian dengan Jepang.
5. Dan karena orientasi kebijakan ekonomi ASEAN yang memang berkeinginan kuat untuk menjalin hubungan ekonomi dengan China.

Namun faktor yang paling penting adalah perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah pendorong bagi pembangunan ekonomi China-ASEAN. Oleh karena itu China dan ASEAN berusaha untuk meningkatkan hubungan perdagangan luar negeri diantara mereka sejak memasuki tahun 1990-an. Pola perdagangan China-ASEAN memasuki dimensi baru dimana berkembangnya gejala interdependensi ekonomi membawa dampak pada meningkatnya hubungan ekonomi China-ASEAN. Sejak China resmi menjadi mitra dialog penuh ASEAN pada tahun 1996 dan keanggotaan China dalam ASEAN+3 sejak tahun 1997 semakin mempererat hubungan bilateral China-

²⁰ *Ibid*, Hans J. Giessmann, "ChIndia" and ASEAN: About National Interests, Regional Legitimacy, and Global Challenges, FES Berlin Briefing Paper 7, May 2007, hal, 3-4.

ASEAN yang secara otomatis semakin meningkatkan hubungan ekonomi khususnya perdagangan dan investasi antar kedua pihak.

2.2 Sejarah Hubungan ASEAN Dengan India

India telah menjalin hubungan dekat dengan negara-negara ASEAN sejak masa kemerdekaan dan mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara selama tahun 1950 dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melibatkan diri dalam krisis Indocina pada 1960-an. India juga menandatangani perjanjian persahabatan dengan Indonesia, Myanmar dan Filipina dan mengkonsolidasikan hubungan bilateral dan hubungan diplomatik dengan mereka. Namun, dengan penandatanganan “Perjanjian Kerjasama Perdamaian dan Persahabatan” antara India-Uni Soviet membuat hubungan antara India dan ASEAN mengalami penurunan.

Persepsi anggota ASEAN terhadap Uni Soviet pada waktu itu tidak terlalu ramah dan penandatanganan perjanjian itu membuat mereka curiga terhadap niat India.²¹ Selanjutnya, di bawah pengaruh Uni Soviet, India mengakui rezim Republik Rakyat Kampuchea yang bersandar di Vietnam pada Juli 1980 dan selama dekade itu, India membangun hubungan politik dan militer yang kuat dengan Vietnam. Ini bertentangan dengan pandangan ASEAN yang mengutuk rezim Kampuchean dan mengakibatkan memburuknya hubungan antara India dan ASEAN.²²

Selama tahun 1980-an, hubungan antara India dan ASEAN mengalami ketidakpastian dan diganggu oleh berbagai perbedaan politik dan diplomatik yang menghasilkan kompromi hubungan ekonomi antara mereka. Namun, dengan runtuhnya Uni Soviet, India mulai mengorientasikan kembali prioritas kebijakan luar negerinya. India memulai *Look East Policy* dan membina kembali hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara.²³ ASEAN juga menyadari pentingnya India sebagai perekonomian terbesar ketiga di Asia, sebagai kekuatan regional dan melihat arti

²¹ Mohammad Ayoob, *India and Southeast Asia: Indian Perceptions and Policies*. London: Rutledge, 1990.

²² Zhao Hong, “India’s Changing Relations with ASEAN: From China’s Perspective,” East Asian Institute Working Paper No. 133, October 2006.

²³ Ibid.

penting bagi politik dan ekonomi ASEAN di masa depan. Munculnya pandangan untuk saling melengkapi menyebabkan India diterima sebagai mitra sektoral ASEAN pada awal tahun 1992 dan diangkat menjadi mitra dialog penuh pada Juli 1996.²⁴

Pada tahun 1990-an terjadi kebangkitan regionalisme di Asia Tenggara. Pasca krisis ekonomi akhir 1990-an, terdapat penekanan yang kuat untuk melakukan integrasi ekonomi regional dengan menghasilkan proliferasi berbagai Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang melibatkan ASEAN dan negara-negara lainnya di kawasan. Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan kemunculan India sebagai salah satu aktor yang berpengaruh di kawasan itu, India juga menerapkan kebijakan untuk membentuk hubungan ekonomi dan strategis yang lebih erat dengan ASEAN. Pada KTT ASEAN-India kedua di Bali pada bulan Oktober 2003, India dan ASEAN menandatangani kesepakatan untuk membentuk Kawasan Perdagangan Bebas.

Kehadiran India pada Pertemuan KTT Asia Timur pada Desember 2005 dan dimasukkan dalam Komunitas Asia Timur, telah menjadi bukti terhadap tumbuhnya sinergi di antara mereka dan menunjukkan prospek yang cerah terhadap terwujudnya integrasi yang lebih besar di kawasan di masa yang akan datang.

Peningkatan hubungan India-ASEAN terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000. Pada tahun 1998, Perdana Menteri India, Mr. Atal Bihari Vajpayee bermaksud untuk mempercepat penerapan *Look East Policy* India.²⁵ Konsep tentang 'extended neighborhood' dipopulerkan oleh para pemimpin India seperti I.K. Gujral dan Jaswant Singh.²⁶ Dalam sebuah kuliah di Institut Studi Strategis di Singapura pada tahun 2000, Jawant Singh menjelaskan, parameter keamanan India dengan jelas berfokus pada batas-batas nyaman, meskipun masih banyak dipertanyakan tentang definisi geografis di Asia Selatan.

²⁴ Syed Hamid Albar, "ASEAN-India Partnership: Opportunities and Challenges," *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization*. New Delhi: Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries. 2002.

²⁵ Zhao Hong. *Op.Cit.*

²⁶ Malla VSV Prasad, "Political and Security Cooperation between India and ASEAN," in Kumar, Sen and Mukul Asher (eds.), *India-ASEAN Economic Relations: Meeting the Challenges of Globalization*. Singapore: Institute of Southeast Asian Countries. 2006.

Asia Selatan selalu berada dalam posisi meragukan dalam kerangka untuk menempatkan paradigma keamanan India. Mengingat ukuran, lokasi geografis, hubungan perdagangan dan ZEE, keamanan lingkungan India dan kekhawatiran potensi berkisar dari Teluk Persia ke Selat Malaka di Barat, Selatan dan Timur, Asia Tengah di Northwest, Cina di Timur Laut dan Asia Selatan demikian.²⁷ India sedang berusaha mengembangkan hubungan dengan negara-negara di luar lingkungan terdekatnya, seperti negara di Asia Timur dan Asia Timur Laut dan negara-negara ASEAN.²⁸

Salah satu langkah konkrit pertama yang diambil oleh India adalah pembentukan Kerjasama Proyek Sungai Mekong-Ganga tahun 2000 yang meliputi India dan lima negara ASEAN (termasuk empat anggota baru ASEAN-Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar dan Thailand). India menyadari bahwa kerjasama ekonomi dengan ASEAN akan tergantung pada seberapa cepat negara-negara ASEAN baru bisa menyatu dengan negara ASEAN lainnya dan dimaksudkan untuk menyediakan mereka bantuan secara teknis dan ekonomi.²⁹

Pelembagaan hubungan ASEAN-India Pertama kali terjadi ketika Pertemuan pertama ASEAN-India di Phnom Penh pada tanggal 5 November 2002 dan dianggap sebagai keberhasilan dari penerapan *Look East Policy* India. Keberhasilan ini dianggap sebagai pengakuan atas kemunculan India sebagai *key player* di kawasan Asia Pasifik.³⁰ Terobosan ini muncul setelah sebuah usaha panjang dan melelahkan sebagai bagian dari diplomasi India untuk meyakinkan negara-negara ASEAN untuk menyelenggarakan KTT ASEAN-India yang terpisah. Sentimen ini bergema dalam sebuah artikel di sebuah surat kabar terkemuka India yang menyatakan bahwa “Pertemuan Pertama ASEAN-India di Phnom Penh, Kamboja, langkah maju bagi India untuk bergerak maju dalam mengembangkan kemitraan strategis yang luas dengan negara-negara Asia Tenggara”. Sementara para pemimpin politik India terus-

²⁷ *Ibid*, hal. 270.

²⁸ *Ibid*.

²⁹ Zhao Hong, Op.Cit.

³⁰ Man Mohini Kaul. 20 November 2002. “Time for a Great Leap Eastwards,” *The Indian Express*. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/20o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

menerus berbicara tentang bagaimana mereka akan mengakhiri kemiskinan, para pemimpin di Asia Timur dan Asia Tenggara berbicara tentang bagaimana mereka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka.³¹

Ada pengakuan jelas dalam lingkaran strategis politik India akan pentingnya ekonomi ASEAN untuk kepentingan nasional India. Pada Kuliah Tahunan di Singapura pada tahun 2002, Perdana Menteri India Mr. Atal Bihari Vajpayee menyatakan, "kawasan Asia Tenggara adalah salah satu titik fokus kebijakan luar negeri asal India, pilihan strategis untuk kepentingan ekonomi".³² Lokasi kawasan ASEAN yang strategis di antara sebagian besar tempat-tempat penting wilayah di dunia. Dengan masuknya Myanmar kedalam ASEAN, India kini memiliki batas wilayah dengan ASEAN, selain dengan berbagi batas-batas maritim dengan Indonesia, Thailand dan zona ekonomi eksklusif (ZEE) dengan Malaysia.³³

India menganggap ASEAN sebagai inti kawasan Asia Timur dan percaya dalam meletakkan penekanan pada interaksi dengan ASEAN. Dengan kekhawatiran yang mendalam mengenai pengaruh Cina di kawasan, India mengajak ASEAN untuk membina keamanan multilateral di kawasan Asia-Pasifik.³⁴ Pada saat yang sama, seperti yang dijelaskan oleh Hong, "dari perspektif ASEAN dan Jepang, India dianggap sebagai penyeimbang terhadap dominasi China di Asia Tenggara, namun secara publik, India menghindari peran itu."³⁵ Sebenarnya daripada bersaing, India ingin mengembangkan hubungan komplementer dengan China. Ada perasaan bahwa India tidak harus bersaing dengan China, tapi harus mempersiapkan diri untuk menghadapi persaingan yang ketat dan kemungkinan konflik di masa mendatang.³⁶

³¹ G Parthasarathy. "The Gains of Looking East," *The Pioneer*, 21 November 2002. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/21o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

³² AB Vajpayee, "India's Perspectives on ASEAN and the Asia Pacific Region", 9 April 2002. India's Ministry of External Affairs Website, <http://www.mea.gov.in/sshome.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)

³³ Malla VSV Prasad. *Op.Cit.*

³⁴ Amitabh Mattoo, "ASEAN in India's Foreign Policy," in Frédéric Grare and Amitabh Mattoo (eds.), *India and ASEAN: the politics of India's look east policy*. New Delhi: Manohar. 2001.

³⁵ Zhao Hong. *Op.Cit.* hal. 12.

³⁶ Amitabh Mattoo, *Op.Cit.*

2.2.1 Kepentingan India terhadap ASEAN

Sejak awal dari liberalisasi ekonomi, ekonomi India telah ditandai dengan tingkat pertumbuhan stabil sekitar tujuh persen, tak kurang dari tingkat pertumbuhan di China. Tidak seperti China, bagaimanapun, transformasi ekonomi India belum dipenuhi oleh euforia global yang dramatis seperti kebangkitan China. Alasan yang paling penting untuk fenomena ini adalah kenyataan bahwa India telah menjadi negara demokrasi yang disegani dan pemain global sebelum memulai liberalisasi ekonomi. Karena transformasi menjadi kompetitif, teknologi tinggi ekonomi, pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, dan yang paling baru-baru ini, tergabung sebagai anggota resmi dari "klub nuklir", posisi global India yang semakin menguat tidak muncul dengan begitu saja. Konsekuensi dari proses liberalisasi bisa lebih baik dibandingkan secara global, bukan di kawasan Asia Timur, karena secara kawasan-ketika berbicara tentang kepentingan keamanan India, banyak negara-negara di Asia masih sangat *concern* dengan kepemilikan nuklirnya (bersama dengan Pakistan) dan memicu terjadinya beberapa disintegrasi yang mengarah pada kekerasan dan terorisme.

Strategi "*Look East*" baru, yang telah dilaksanakan sejajar dengan posisi India sebagai satu aktor global, belum secara jelas didefinisikan. Pada kenyataannya, India tidak dinyatakan dalam memproyeksikan kepentingan kekuasaan atau pengaruhnya pada negara di sekitarnya. Harus disadari bahwa posisi geopolitik India- sebagai quasi-pulau di sub-benua - adalah kerugian strategis India pada *setting-an* kelembagaan ASEAN karena posisi India berada di pinggiran, dan tidak termasuk dalam kawasan ASEAN. Aspek lain adalah terkait dengan potensi kekuatan eksplosif konflik sosial di negara yang akan segera memiliki populasi terbesar di bumi. Potensi konflik tidak hanya ada di Kashmir, tetapi sekarang juga tidak kurang dari empat titik masalah lain (provinsi) di daerah timur, dengan kemungkinan akan menyebar ke provinsi yang lain di masa depan.

Masalah ketiga untuk India, tentu saja, adalah China. Meskipun terlihat tanda-tanda kemajuan (yaitu, penyelesaian sengketa perbatasan, peningkatan perdagangan), hubungan India dengan tetangga terbesar itu dianggap sangat

penting, walaupun masih sangat sensitif dan rapuh. India lebih berharap untuk lebih mengkonsolidasikan hubungan, karena India tidak ingin dan tidak akan mampu bersaing dengan China untuk memperebutkan hegemoni di Asia Tenggara. Namun hubungan ini jauh dari harapan untuk menjadi aliansi strategis yang saling menguntungkan bagi kedua negara ini di panggung dunia.

Hasil yang lebih mendesak dari *"Look East"* strategi India adalah akses ke forum multilateral ASEAN dan ASEM. India sangat memperhatikan hal ini, karena India digunakan oleh lembaga ASEAN sebagai penyeimbang China. Tidak seperti China, India menunjukkan minat yang kurang untuk aktif terlibat dalam kerjasama politik. Sejauh menyangkut kerjasama keamanan, India fokus pada keamanan maritim untuk jalur laut di semenanjung Samudera Hindia (yaitu Hormuz dan Malaka).

Perubahan yang paling penting dalam kebijakan regional India adalah kurangnya peranan untuk lebih berbicara di kawasan Selatan atau negara berkembang. India berbicara dan bertindak dalam kapasitas sendiri, mengacu pada kepentingannya sendiri dan memilih peran yang berpusat untuk semua kegiatan. Ironisnya, kebijakan India telah demikian menjadi lebih "China": sedikit mengandalkan nilai, lebih pragmatis dan lebih mengedepankan pencapaian kepentingan. Tentu saja ini mungkin termasuk perilaku yang kurang bertanggung jawab di bidang hubungan internasional pada tahun-tahun yang akan datang. Tidak seperti China, yang telah memilih untuk lebih dekat dan juga kerjasama politik, India menganggap perannya lebih ad-hoc, lebih tergantung pada kepentingan tertentu, lebih di satu bidang. Hal yang paling penting bagi India adalah harapannya untuk pemenuhan pasokan energi dan kebijakan ekspor yang menguntungkan ke pasar berkembang, Asia Tenggara.

Berkenaan dengan pendekatan baru ini, India menghadapi masalah serius. Hubungan ekonomi dengan ASEAN relatif lemah; India bergantung pada peningkatan ekspor (hampir 50 persen per tahun). Anggota ASEAN merasakan tekanan ekspor ini dari India, merasa tidak mendapat balasan yang menjanjikan, begitu juga dengan Kekecewaan tentang kebijakan "economisasi" regional India.

Beberapa ahli khawatir bahwa target India di Asia Tenggara bukan didasarkan pada kepentingan yang nyata, tetapi lebih sekedar untuk mendapatkan posisi yang lebih kuat vis-à-vis China.³⁷

Alasan kepentingan India untuk menjalin kemitraan yang lebih dekat dengan ASEAN disebabkan karena:

1. Pendapatan per kapita ASEAN dua kali lipat dari India dan memiliki peluang pasar yang cukup terbuka.
2. ASEAN memiliki basis sumber daya alam yang kaya.
India melirik kesempatan untuk dapat mengintegrasikan perusahaan multinasionalnya untuk dapat berkembang di ASEAN.
3. Selain itu, negara-negara seperti Malaysia, Singapura dan Thailand menjadi investor utama di India, khususnya dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan modal ventura.

Dengan meningkatnya persaingan, kebutuhan untuk tetap maju dalam era ekonomi global yang berbasis pengetahuan, ASEAN-India harus memperluas dan memperdalam hubungan ekonomi mereka. ASEAN-India harus bekerja sama di bawah Perjanjian Kerangka Komprehensif Kerjasama Ekonomi dan merealisasikan potensi ekonomi mereka di bidang perdagangan barang dan jasa dan investasi secepat mungkin. Dengan demikian, ASEAN dan India dapat meningkatkan daya tarik masing-masing sebagai tujuan FDI dan meningkatkan daya saing mereka sebagai produsen, eksportir dan penyedia layanan di pasar global.

2.3 Posisi China dan India di Asia Tenggara

Sebagian besar Negara di Asia Tenggara mempunyai pandangan yang berbeda terhadap India. Pada satu sisi, citra India diuntungkan dengan wilayah yang tidak terbebani oleh warisan kolonial atau dengan persaingan untuk perebutan pengaruh hegemoni. Di sisi lain, India tidak memainkan peran penting di kawasan Asia Selatan

³⁷ *Ibid*, Hans J. Giessmann, hal, 4-5.

sampai saat ini. Jumlah perdagangan timbal balik yang dapat diabaikan sampai satu dekade yang lalu telah berubah sejak awal pertumbuhan ekonomi India pada akhir 1990-an.

Tidak hanya ASEAN yang memiliki defisit perdagangan luar negeri dengan pertumbuhan India dari tahun ke tahun, tapi kenaikan impor India dari daerah lain di dunia juga telah berkembang lebih cepat daripada peningkatan impor dari Asia Tenggara. Namun, situasi terlihat berbeda dari satu negara ke negara. Program Pengembangan Kapasitas untuk negara-negara CLMV (Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam) dianggap berguna, karena India kontribusi kepada Dana Pembangunan ASEAN dan investasinya ke dalam infrastruktur dari negara-negara CLMV.

Anggota ASEAN mengeluhkan tentang proteksi India terhadap barang-barang impor dari Asia Tenggara. Sementara kisaran tarif impor ASEAN, rata-rata, antara sepuluh dan dua belas persen, India mengenakan tarif hingga 29 persen terhadap barang-barang impor dari Asia Tenggara. Ketidakseimbangan ini telah meletakkan beban yang luar biasa terhadap kinerja ekspor yang sangat bergantung pada usaha BUMN dan juga menjadi sulit karena India telah memperlambat dan menunda perundingan mengenai pelaksanaan pelaksanaan *Free Trade Area* hingga pada tahun 2011. Kenyataan bahwa India telah memperluas perdagangan timbal-balik dengan Myanmar namun kurang terlibat dengan anggota ASEAN lainnya secara umum dianggap sebagai tanda kurangnya prioritas kepentingan India di wilayah ASEAN secara keseluruhan.

Tapi tidak seperti China, yang dianggap oleh ASEAN secara skeptis dengan berbagai harapan, para anggota tidak begitu peduli dengan aktifitas politik yang lebih aktif yang dilakukan oleh India. India tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan berpotensi sebagai aktor penyeimbang dan stabilisator.

Kebangkitan China dianggap sebagai kesempatan yang penuh dengan risiko. Semua anggota ASEAN berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin dari keterbukaan ekonomi China. Di sisi lain, dalam hal keamanan, negara-negara ASEAN sangat ingin pro-aktif memelihara atau memperbaharui hubungan koalisi dengan Amerika Serikat untuk proses destablisasi. Secara simultan, negara-negara

ASEAN berusaha mencoba untuk tidak terjepit dan tidak mau menjadi subjek persaingan bilateral di antara rivalitas China dan India.

Sebenarnya, inti rasional kebijakan ASEAN tidak berada dalam posisi netral melainkan dengan harapan untuk mendapatkan yang terbaik dari hubungan dengan keduanya. Anggota ASEAN melihat China sebagai tantangan, bukan ancaman. China yang paling baru-baru ini menunjukkan kebijakan konstruktif dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut China Selatan (di atas Kepulauan Spratley) telah mendorong penilaian positif di antara negara anggota ASEAN, meskipun keprihatinan mengenai keberlanjutan ofensif ancaman China hampir tidak memudar. Dalam rangka untuk meminimalkan berbagai keprihatinan ini, bertujuan sebagai langkah pembendungan, ASEAN memperluas kerjasama multilateral dengan China pada level regional dan sub-regional serta memasukkan China ke dalam mekanisme lintas sektoral regional ASEAN.

Dalam analisis kasus-per-kasus, perspektif anggota ASEAN vis-à-vis China tidaklah sejalan, namun lebih banyak didasarkan atas faktor kedekatan geografis dan kepentingan ketergantungan ekonomi. Semakin dekat jarak dan semakin besar ketergantungan ekonomi berarti akan semakin besar harapan ekonomi dan perhatian politik.

Geopolitik dan asimetri strategis menyebabkan sikap yang berbeda untuk pembangunan kerangka kerjasama antara China dengan anggota ASEAN. Misalnya, kebijakan Malaysia dan Indonesia yang banyak dipengaruhi oleh keberadaan mayoritas Muslim. Kedua Negara mempertimbangkan keberadaan China sebagai aktor penyeimbang yang berpotensi untuk mengurangi tekanan dari Amerika Serikat dalam perang melawan teror. Keduanya juga melihat China sebagai pasar dan sebagai mitra untuk investasi, perdagangan dan kerjasama. Mereka mencoba untuk menggunakan kerjasama yang lebih erat untuk melindungi kepentingan mereka urusan internasional. Untuk Filipina dan Singapura, yang tertarik untuk membina hubungan yang stabil dengan China, memilih koalisi militer mereka dengan Amerika Serikat sebagai tameng dari kebijakan keamanan mereka. Peran Amerika Serikat pada

kedua negara ini sangat kuat sebagai penyeimbang dari peningkatan kekuatan China di kawasan.³⁸

Tabel 2.1
Matriks Perbandingan Sejarah Hubungan ASEAN Dengan China-India

China	India
Persahabatan	
1. Indonesia dan Burma pertama kali mengakui kemerdekaan RRC pada tahun 1950 2. Mempertahankan hubungan dekat dengan rezim komunis di Vietnam Utara dan memberikan dukungan yang signifikan atas perlawanan mereka terhadap Perancis dan Amerika Serikat (Tahun 1950-1970)	India telah menjalin hubungan dekat dengan ASEAN sejak masa kemerdekaan dan mulai memperluas pengaruhnya di kawasan Asia Tenggara selama tahun 1950 dengan mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia dan melibatkan diri dalam krisis Indocina pada tahun 1960-an.
Permusuhan (Ketidak harmonisan)	
Ketidak harmonisan hubungan China dengan negara-negara Asia Tenggara yang non-komunis, karena Beijing mendukung pemberontakan komunis di Asia Tenggara.	Namun mengalami penurunan ketika India menandatangani perjanjian 'Kerjasama Perdamaian dan Persahabatan' dengan Uni Soviet.
Normalisasi	
Kebijakan China ke Asia Tenggara mulai mengalami perubahan penting dalam dua hal: 1. Pada tahun 1980-an, Beijing menghentikan dukungannya terhadap gerakan pemberontakan komunis di kawasan. 2. Pada tahun 1989, mengeluarkan undang-undang tentang kewarganegaraan China terhadap warga negaranya yang tinggal diluar negeri yang butuh pengadopsian kewarganegaraan.	Dengan runtuhnya Uni Soviet, India mulai mengorientasikan kembali prioritas kebijakan luar negerinya. India memulai Look East Policy dan membina kembali hubungan ekonomi dengan Asia Tenggara.

³⁸ *Ibid*, Hans J. Giessmann hal, 5-6.

Kesimpulan

China dan India sedang berusaha untuk memperluas kehadiran strategis dan pengaruh mereka di sekitar sebagai konsekuensi atas kekuatan ekonomi mereka. Kedua negara berusaha mencari keterlibatan yang lebih luas dengan negara-negara lainnya baik secara regional maupun global. Dalam hal ini, perlu dicatat bahwa baik China dan India telah mengambil langkah-langkah penting untuk meningkatkan kerjasama satu sama lain. Kebanyakan dari kepentingan China dan India di Asia Tenggara didorong berdasarkan kepentingan mereka dan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dibidang ekonomi.

China menemukan cara yang lebih mudah untuk terlibat dengan ASEAN dibandingkan dengan India. Karena China dipandang dengan ketakutan yang lebih besar di Asia Tenggara dibandingkan dengan India karena berbagai faktor, diantaranya sejarah kekuasaan dan pengaruh China di wilayah ini; *image* negatif yang berkaitan dengan kekuasaan komunisme, dukungan China terhadap pemberontakan komunis di Asia Tenggara dimasa lalu, klaim teritorial dan sengketa dengan negara-negara regional, dan karena ukuran wilayah China yang lebih besar serta kedekatan wilayah dengan kawasan Asia Tenggara.

Dalam bab selanjutnya akan lebih banyak diceritakan tentang bagaimana proses perkembangan kemajuan ekonomi yang dialami oleh China dan India, serta implikasinya terhadap kawasan Asia Tenggara.

BAB 3

KEMAJUAN EKONOMI CHINA-INDIA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP ASEAN

Bab ini akan membahas kemajuan ekonomi China dan India dan implikasinya terhadap ASEAN. Sub-bab pertama dan kedua akan membahas bagaimana proses kemajuan ekonomi yang dialami oleh China dan India, sub-bab ketiga akan membahas tentang analisa hubungan kerjasama ASEAN dengan China dan India, sementara sub-bab keempat adalah analisa daya saing ASEAN terhadap China dan India.

Bukan rahasia lagi kalau kekuatan China-India mengalami peningkatan yang dinamis dan berusaha meningkatkan pengaruh dan kekuasaannya dalam ranah hubungan internasional. Gabungan ukuran populasi mereka, yang mencapai lebih dari sepertiga dari penduduk dunia, dengan prestasi ekonomi yang meningkat selama satu dekade membuat kedua negara ini menjadi pusat hubungan ekonomi di kawasan Asia dan menyebabkan timbulnya peningkatan rasa percaya diri nasional / kesadaran diri dan kemauan politik untuk lebih aktif berpartisipasi dalam tatanan internasional.

3.1 China

China dikenal sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah populasi mencapai 1.314.48 milyar jiwa.¹ Keajaiban ekonomi China, didukung oleh barang-barang manufaktur, yang saat ini hampir tidak ada negara lain yang mampu menyainginya.

3.1.1 Kebangkitan Ekonomi China

Bagi banyak pengamat, munculnya China sebagai raksasa ekonomi dimotori oleh Partai Komunis China (PKC) dan dikendalikan pusat aparatur negara untuk menghadapi masalah legitimasi klimaks yang dihasilkan dari

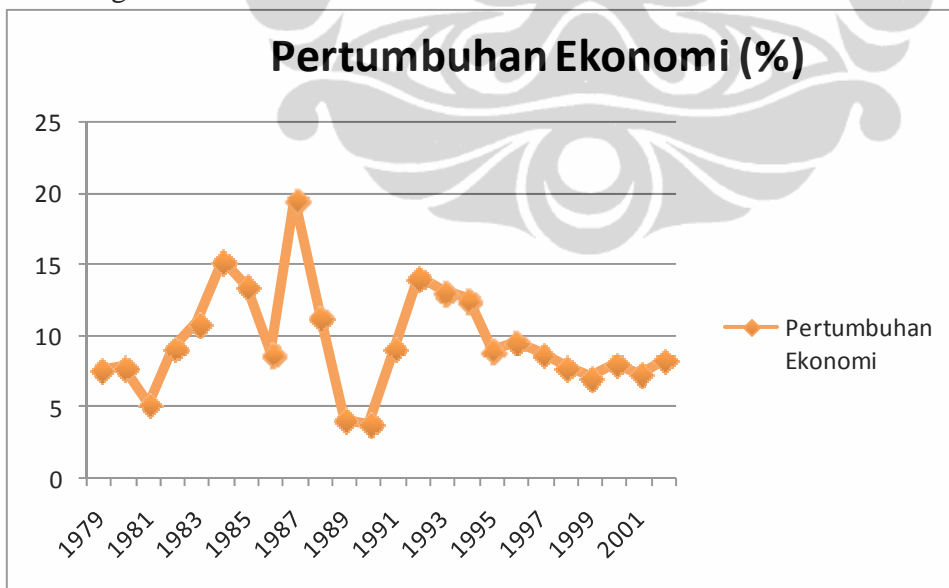
¹ National Bureau of Statistics, data 28 Februari 2007

pemerintahan satu partai dalam sistem ekonomi pasar. Stabilitas domestik China secara efektif bergantung pada kemampuan PKC untuk memecahkan masalah ini dan memegang kendali terhadap kekuatan sentrifugal yang timbul di dalam masyarakat China.

Pada tahun 2004, China terus mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan total PDB senilai 1.3561.5 miliar RMB (Rp 1650.7 milyar). Ini membuat China menjadi peringkat kekuatan ekonomi terbesar ke-6 di dunia. Dengan tingkat pertumbuhan tahun lalu sebesar 9,5 persen,² menjadikan China sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia.

Sejak peluncuran agenda reformasi, China telah membukukan tingkat pertumbuhan tinggi ekonomi tahunan yang tinggi secara dalam beberapa tahun belakangan. Diperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan rata-rata tercatat dalam "10th Rencana Pembangunan Lima tahun" adalah sebesar 8,8 persen, jauh lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebelumnya sebesar 7 persen.

Grafik 3.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi China Selama Periode 1979-2005



Sumber: Laporan Tahunan yang dikeluarkan oleh China Department General of Statistics

² China's Statistics Department-General: "Official gazette on the statistics on the national socio-economic development of the People's Republic of China in 2004", released on 28 February 2005 (People's Daily) Beijing.

Sejak memasuki abad ke-21, perekonomian dunia telah mengalami beberapa peningkatan dan penurunan,. Dimulai dengan penurunan tajam dari 4,7 persen di tahun 2000 menjadi 1,2 persen pada tahun 2001, lalu mencatat sedikit peningkatan pada tahun 2002 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,7 persen. Kecenderungan perbaikan terus terjadi dengan pertumbuhan \ tarif terdaftar pada tahun 2003 dan 2004 sebesar 2,8 persen dan 4 persen dan tahun 2005 diperkirakan sebesar 3-2 persen.³ Pada saat yang sama, kenaikan terendah China yang pernah terdaftar beberapa tahun lalu adalah 7,3 persen (tahun 2003). Tidak diragukan lagi bahwa China selalu menempati peringkat pertama dalam hal tingkat pertumbuhan ekonomi di dunia.

Alasan utama di balik pertumbuhan ekonomi China yang mengesankan adalah disebabkan oleh reformasi dan kebijakan yang terbuka. Selama periode 26 tahun reformasi dan membuka diri, berdasarkan karakteristik dari era baru dan situasi dalam negeri, China telah menemukan jalan perkembangan baru untuk menghadapi globalisasi ekonomi dan mempertahankan pemerintahan sendiri dan kemandirian dalam membangun China-yang bercirikan sosialisme, yang dijuluki oleh China sebagai “pembangunan damai”. Peningkatan pertumbuhan ekonomi China bisa disebabkan dua faktor utama berikut:⁴

Pertama, China secara konsisten melakukan kebijakan reformasi. Rapat Dewan Komite Eksekutif Pusat Partai Komunis China ketiga yang diadakan pada bulan Desember 1978 meluncurkan reformasi dan kebijakan membuka diri, menghilangkan hambatan dan keterbatasan yang ditimbulkan oleh model perencanaan pusat dan melakukan liberalisasi produksi untuk memajukan pembangunan. Metode reformasi yang telah diterapkan oleh China tampaknya sangat efektif dalam menangani hubungan trilateral antara reformasi,

³ Wu Kangping: “Three major characteristics and challenges of the contemporary world economy”, *Globe Times*, April 2005, Beijing

⁴ Prof. GuWaosong, *China's Peaceful Development and ASEAN-China Relations*; dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACs) Vietnam, 2006. hal, 22-23.

pembangunan dan stabilitas, sehingga menjamin pembangunan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan China.

Sejak diluncurkannya reformasi dan kebijakan membuka diri, China terus melanjutkan upaya pengembangan ekonomi yang berorientasi pasar-sosialisme, menetapkan dan melaksanakan reformasi menyeluruh yang berorientasi ekonomi pasar-sosialisme, dan mempromosikan pembangunan ekonomi-sosial nasional secara progresif dan komprehensif. Reformasi komprehensif di bidang ekonomi dan sosial tidak hanya membuka jalan bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan dan cepat tetapi juga berkontribusi untuk mempromosikan keadilan dan kemajuan sosial, dengan demikian meletakkan dasar bagi pembangunan berkelanjutan.

Kedua, China menerapkan diplomasi perdamaian, kemerdekaan, pemerintahan sendiri, membuka kebijakan luar negeri dan aktif dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama ekonomi eksternal, dan partisipasi dalam globalisasi ekonomi juga merupakan faktor penting yang memberikan kontribusi pada pengembangannya yang cepat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Memperluas, memperdalam reformasi ekonomi dan membuka diri telah menghasilkan perubahan besar dalam perdagangan luar negeri China. Perdagangan luar negeri telah menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Volume total perdagangan pada tahun 2004 adalah senilai USD 1154.8 miliar, tercatat peningkatan 35,7 persen secara tahunan, dimana volume ekspor mencapai Rp 593.4 miliar dan volume impor sebesar USD 561.4 miliar, meningkat 35,4 persen dan 36 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya,. Menurut statistik awal Departemen Jenderal Bea dan Cukai China selama 10 bulan pertama tahun 2005, tercatat total volume perdagangan sebesar USD 1148.61 miliar, ditandai dengan peningkatan 24 persen setiap tahun. Total ekspor China pada periode ini diperkirakan mencapai USD 614.49 miliar dan total impor sebesar USD 534.12 milyar, 31,1 persen dan 16,7 persen lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun lalu. Cadangan valuta asing

mencapai Rp 609.9 miliar pada akhir 2004 atau Rp 206.7 miliar lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004, China menarik FDI total sebesar USD 153.5 miliar, tingkat pertumbuhan 33,5 persen secara tahunan, dengan aliran FDI baru senilai USD 60.6 miliar, meningkat 13,3 persen.⁵ Sampai dengan Januari 2005, jumlah perusahaan investasi asing yang terdaftar di China berjumlah 5.125.504 dan modal investasi mencapai USD 1109.445 miliar, dengan realisasi FDI sebesar USD 566.196 miliar.

Pada tahun 2005, total PDB China mencapai 14 triliun RMB (Rp 1,6 triliun) atau lebih dari dua kali lipat PDB gabungan dari Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Perkapita GDP China sekarang yang di sekitar USD 1.300 adalah sama dengan Indonesia tetapi lebih tinggi dari Filipina. Dengan total jumlah nominal PDB, China menduduki peringkat ke-5 perekonomian terbesar di dunia. Dari segi paritas daya beli (PPP), perekonomian China saat ini merupakan kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat.⁶

Sebagai akibat dari kemajuan industrialisasi yang cepat, China melesat menjadi basis manufaktur terkemuka di dunia. Pada tahun 2004, China memproduksi 273 juta ton baja, 970 juta ton semen, 73 juta set TV warna, 66 juta AC, 30 juta lemari es, dan 45 juta PC. Pada tahun 2004, China juga menjadi produsen mobil ketiga terbesar dunia, dengan total output sebesar 5,1 juta unit, setelah Amerika Serikat dan Jepang.⁷ Pada tahun 2003, China melampaui Amerika Serikat sebagai pangsa telepon terbesar dunia (263 juta jaringan tetap ditambah 269 juta ponsel (290 pada pertengahan 2004)).⁸ Juga, pada pertengahan tahun 2005, jumlah pengguna internet yang terdaftar di

⁵ *Op.cit.*, China's Statistics Department-General, released on 28 February 2005 (People's Daily) Beijing.

⁶ National Bureau of Statistic, "Statistical Communiqué of the People's Republic of China on National Economic and Social Development in 2004" (in Chinese), February 28, 2005. "China now second most wired nation on the globe", China Daily (July 21, 2004).

⁷ "The Talk of the Town at Davos; China", International Herald Tribune, January 26, 2004.

⁸ "Asia's next crisis: 'Made in China'", The Straits Times (Singapore, August 2, 2001).

China ("netizens") telah melampaui 100 juta sehingga membentuk "Web populasi" terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.⁹

Pesatnya pertumbuhan ekonomi China mendorong mereka melakukan ekspansi pasar besar-besaran. Ekspansi pasar meski terkesan dilakukan dengan hati-hati, cukup meresahkan negara-negara tetangga, Jepang, Korea Selatan, dan negara ASEAN, karena diikuti basis pertumbuhan ekonominya yang kuat. China telah tampil sebagai *the new miracle of Asia*, sejajar dengan negara-negara *the big economic of Asia* seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, dan Hongkong, yang pernah disebut-sebut sebagai pusat keajaiban ekonomi Asia.

Dibandingkan dengan Jepang yang tengah menjalankan program *zero growth*, pertumbuhan ekonomi China saat ini mencapai 8 persen. Kesuksesan ini merupakan bagian dari strategi market economy yang menjadi orientasi China pasca-Jiang Zemin. Reformasi Partai Komunis China (PKC) dalam Kongres November 2001, dengan memasukkan kelas kapitalis (*shehui qita fangmian de youxiu fenzi*) ke dalam unsur PKC, tidak hanya bertujuan merombak total hubungan majikan-pekerja dalam tradisi komunis China, tetapi juga memperkuat basis pendukung kapitalis China melakukan ekspansi pasar guna mempercepat pertumbuhan ekonominya.

Sejak dua tahun lalu China memberi ruang lebar kepada pihak swasta melakukan gebrakan ke pasar global. Pasar-pasar negara ASEAN menjadi incaran pertama pengusaha swasta China. Pasar ASEAN dinilai amat potensial. China bahkan ingin menjalin perdagangan yang intens dengan negara-negara ASEAN melalui ASEAN Free Trade Area (AFTA).

Dalam pertemuan ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, 2 September 2003, para politisi China coba mendekati negara-negara ASEAN dan menyampaikan keinginannya bergabung dengan AFTA sehingga menjadi ASEAN Plus Three. ASEAN sejak awal tahun 2003 telah menjadikan AFTA sebagai Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Potensi pasar ASEAN sendiri termasuk besar

⁹ Charles Stein, "The Rise of China Inc", Boston Globe (August 19, 2003).

karena didukung 530 juta penduduk yang memiliki tingkat daya beli yang cukup tinggi, dan beberapa negara, di antaranya Malaysia, Thailand, Indonesia, dan Filipina, mulai bangkit dari krisis ekonomi yang mereka alami tahun 1997.¹⁰

Strategi baru perekonomian China, seperti kata Presiden China Hu Jianto, adalah bagaimana menjadikan China sebagai pusat produksi, sedangkan distribusi dan konsumsi diupayakan diserahkan sepenuhnya ke pasar-pasar internasional. Indonesia dan ASEAN merupakan negara-negara yang diprioritaskan China menjadi target utama barang-barang produksinya.¹¹

3.2 India

India dikenal sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, dengan jumlah penduduk 1.080.264.388 (Juli 2005). Situasi China sangat berbeda dari India yang terikat secara demokratis, booming ekonomi yang luar biasa sebagian besar terjadi berkat layanan yang kompetitif secara global dan sektor teknologi informasi (TI).

3.2.1 Kebangkitan Ekonomi India

India mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang lamban selama beberapa dasawarsa, rata-rata hanya 3,0 persen setahun. Baru pada akhir pemerintahan Rajiv Gandhi, akhir 1980-an, terutama setelah 1991 saat Manmohan Singh, menteri keuangan meluncurkan program reformasi ekonomi yang luas, ekonomi India mulai tumbuh lebih pesat.

Kinerja perdagangan India sejak tahun 1980-an mengalami kemajuan yang sangat pesat. Antara tahun 1978 dan 2005 nominal ekspor dan impor, dinilai berdasarkan harga sekarang, secara keseluruhan ekonominya tumbuh dua kali lebih pesat. Dari sekitar US \$ 10 miliar pada tahun 1978, ekspor dan impor barang dan jasa India masing-masing mencapai US \$ 164 miliar dan

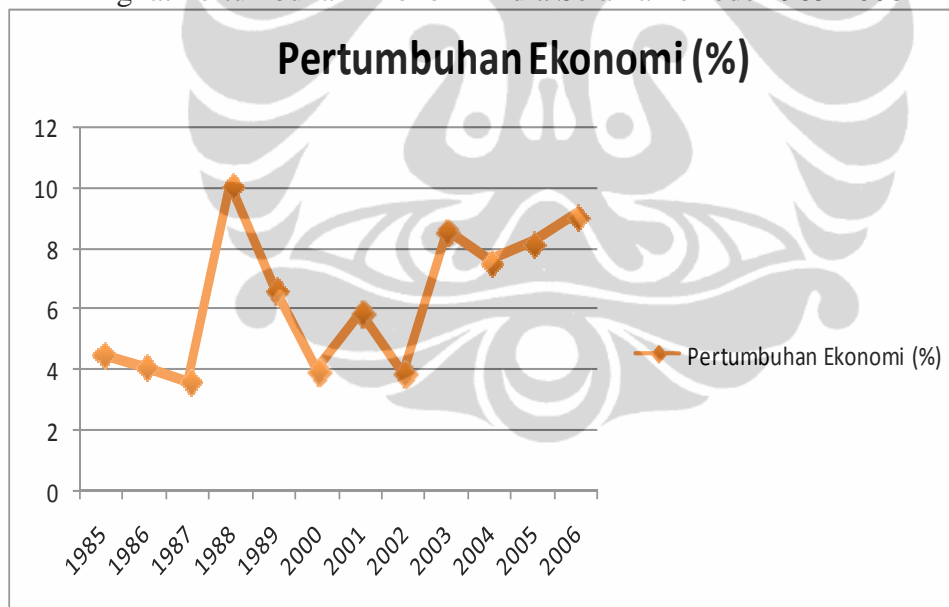
¹⁰ *Kompas*, 3 September 2003.

¹¹ *Kompas*, 3 Januari 2004

US \$ 188 miliar 2005, atau setara dengan 20% sampai 25% dari angka Cina. Pertumbuhan perdagangan India juga mengalami peningkatan sejak tahun 2001. Nominal pertumbuhan ekspor dan impor meningkat 28% dan 30,2% antara tahun 2001 dan 2005, dibandingkan dengan 9,1% dan 8,3% untuk periode antara 1978 dan 2001.¹²

Pertumbuhan ekonomi India untuk beberapa tahun setelah 1984 di tunjukkan pada Tabel 2.2 di bawah. Pertumbuhan ekonomi India yang rata-rata di atas 8,0% terjadi setelah tahun 2002. Pertumbuhan yang secara konsisten tinggi ini sebenarnya berkaitan erat dengan perkembangan sektoralnya dan dengan dengan langkah-langkah reformasi ekonomi yang telah dilakukan sejak tahun 1984.

Grafik 3.2
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi India Selama Periode 1985-2006



Sumber: Economywatch.com

Catatan penting yang patut digarisbawahi dari kemajuan India terletak pada tiga hal yaitu liberalisasi dan reformasi ekonomi, kekuatan internal dan

¹² Sarah Y. Tong , *Comparing Trade Performance Of China And India*, EAI Background Brief No. 398, Date Of Publication: 20 August 2008

dukungan lingkungan eksternal. Sejak liberalisasi ekonomi awal 1990-an, India muncul sebagai negara utama dalam teknologi informasi (TIK) dan komunikasi dan BPO (*Business Process Outsourcing*), yang berhasil meningkatkan pertumbuhan rata-rata 6,0 persen setahun. Pertumbuhan ekonomi kian pesat, terutama sejak 2002 membuat India disejajarkan dengan China, dua negara adidaya ekonomi Asia.

Program reformasi ekonomi ini meliputi deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung yang amat restriktif. Dampak kumulatif program reformasi kebijakan ekonomi berhasil mendorong investasi swasta langsung, termasuk swasta asing, sehingga meningkat 7-8 persen dari produk domestik bruto (PDB) India dalam 4-5 tahun.¹³

Sejak merdeka tahun 1947 sampai tahun 1990, aktivitas ekonomi India berjalan sangat lamban. Kondisi ini akibat kebijakan ekonominya tidak pro pasar, campur tangan pemerintah yang sangat kuat dan mengandalkan substitusi impor. Namun sejak terjadi kesulitan neraca pembayaran tahun 1991 memaksa India harus melakukan reformasi di berbagai bidang baik ekonomi maupun non ekonomi. Perubahan paradigma ini ternyata berdampak positif pada ekonomi India tercermin dari peningkatan perdagangan luar negeri, aliran modal asing mengalir deras baik dalam bentuk PI (Portfolio Investment) maupun FDI (Foreign Direct Investment) dan aktivitas ekonomi yang mulai bergairah. *Progress* kebijakan liberal yang diterapkan dalam hal ini telah menyebabkan meningkatnya aliran masuk investasi asing di negeri ini, baik dalam hal investasi langsung (FDI), serta portofolio investasi. Agregat tahunan arus masuk investasi asing bervariasi antara US \$ 4 menjadi 6 miliar selama periode 1993-94 sampai 2001-2002.¹⁴

¹³ *Kompas*, Selasa 17 November 2009

¹⁴ Abdurahim Okhunov Abduraxmonovich, *Economic Cooperation between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan*, RIS DISCUSSION PAPERS, RIS-DP # 53/2003, June 2003. Hal 8-9.

India selama ini dikenal sebagai negara yang relatif tertutup dan pasarnya sulit ditembus oleh pihak asing. Faktor dominan adalah menisbikan kekuatan pasar diikuti semangat swadesi (memenuhi kebutuhan sendiri) yang kental. Peran pemerintah sangat dominan yaitu mengatur segalanya. Strategi ini ternyata tidak ampuh menjadi kekuatan pembangunan bahkan hasil yang diperoleh kemiskinan semakin merajelela. Di bawah kepemimpinan PM PV Nashimha Rao dan Menteri Keuangan Manmohan Sigh (kini menjabat PM) sejak tahun 1991 India mulai membuka diri dengan melakukan liberalisasi ekonomi. Pemerintah mulai melucuti Lisensi Raja (dalam hal investasi, industri dan lisensi impor), mengakhiri monopoli negara di banyak sektor, dan mengizinkan investor asing menggeluti bisnis domestik. Perubahan paradigma pada kekuatan pasar dan sentuhan asing membawa India menjadi kekuatan dunia.¹⁵

Dua sektor yang luput dari campur tangan pemerintah yaitu bidang teknologi informasi dan industri film ternyata malah menjadi kekuatan besar India di kemudian hari. Kemajuan IT (Information Technology) India sangat fenomena, bahkan kota Bangalore telah menjadi pusat IT dunia. Hampir semua industri IT raksasa membuka kantor di kota ini dari Microsoft, IBM, Infosys dan Wipro. Kesemuanya itu didukung oleh kualitas pendidikan teknologi informasi yang memiliki reputasi internasional. Industri film di India merupakan industri layar lebar terbesar di dunia bahkan telah mengalahkan Hollywood dalam jumlah produksi film. Industri film ini mempunyai peran yang sangat besar dalam menyerap tenaga kerja. Sebanyak 2,3 juta orang India bekerja di sektor ini.

Salah satu langkah krusial yang menjadi awal kebangkitan India adalah besarnya perhatian pemerintah pada kualitas pendidikan. Sistem dan kualitas pendidikan di India mempunyai standar dunia. Bahkan India dikenal sebagai pemasok pekerja ahli di dunia. Sebagai gambaran pada tahun 1990 an dari 150.000 pekerja asing yang bekerja di perusahaan IT Amerika Serikat

¹⁵ *Ibid.*

sebanyak 60.000 diantaranya adalah para pakar software dari India. Kemajuan teknologi yang pesat menakutkan negara-negara maju lainnya. Menurut analisis JP Morgan, dengan penduduknya yang mayoritas berusia muda dan berpendidikan tinggi, maka dalam 20-30 tahun mendatang India diunggulkan dalam pelayanan teknologi informasi atau berbasis pengetahuan dengan layanan jarak jauh.

Kemajuan para entrepreneur India sudah mengglobal. Sejumlah perusahaan India dikenal sebagai pemain kelas dunia seperti Tata, Infosys, dan TVS Motor Company. Sepak terjang Tata bahkan telah menjadi pemain dunia yang patut diperhitungkan. Saat ini kiprah Tata telah beroperasi di 40 negara dengan 90 perusahaannya. Diversifikasi bisnis Tata sangat luas dari otomotif, baja, TI dan komunikasi, jasa, consumer products dan pertanian.

Di bidang farmasi India juga dikenal sangat spektakuler dan diperhitungkan di arena global. India memasok 40% kebutuhan dunia untuk obat-obatan curah (bulk). India dewasa ini mampu memproduksi obat-obatan jauh lebih murah dari negara manapun yaitu hanya separuh biaya produksi di Amerika Serikat. Dengan modal intelektual yang sangat kuat, India mampu memproduksi hingga 10 obat generik dalam setahun, sementara produsen asing hanya maksimal 2 produk. India saat ini juga mengincar pasar pelayanan medis. Dengan ongkos 80% lebih rendah di banding di AS, beberapa perusahaan di AS sedang menjajagi jasa perawatan kesehatan di India.¹⁶

¹⁶ Heri Ispriyahadi, *Kemajuan Iptek Mendongkrak Kebangkitan Ekonomi India*; dalam India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi), Editor; Irwan Suhandi, PT Kompas Media Nusantara, 2007.

Tabel 3.1
Matriks Perbandingan Kemajuan Ekonomi China-India

China	India
Program	
Reformasi dan kebijakan yang terbuka pada tahun 1978 di masa pemerintahan Den Xiao Ping.	Reformasi ekonomi oleh Menteri Keuangan Manmohan Singh pada periode 1991 yang meliputi: Deregulasi sektor keuangan dan liberalisasi kebijakan perdagangan yang proteksionis dan kebijakan investasi asing langsung restriktif.
Perdagangan	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volume Perdagangan tahun 2004 mencapai USD 1154.8 Miliar. ➤ Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 9% per tahun. ➤ FDI Income 153,5 miliar 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Volume Perdagangan tahun 2005 mencapai USD 164 miliar. ➤ Tingkat pertumbuhan ekonomi rata-rata 6-8% per tahun. ➤ FDI income 14 miliar
Kelebihan	
Sebagai akibat dari kemajuan industrialisasi, China melesat menjadi basis manufaktur terkemuka dunia seperti: Baja, semen, TV, AC, mobil, dll.	India dikenal dengan kemajuan informasi teknologi dan komunikasi (ICT) dan dibidang layanan (service)

3.3 Hubungan ASEAN dengan China-India

Kegiatan eksternal ASEAN pada umumnya adalah untuk mengembangkan hubungan dan kerjasama yang baik dengan mitra dialog-nya, dialog mitra sektoral, para pengamat, organisasi-organisasi sub-regional dan lembaga internasional.

Beberapa negara dialog atau mitra ASEAN: Australia (Sejak 1974), Selandia Baru (1975), Kanada (1997), UNDP (1977), Jepang (1997), AS (1997), Komisi Eropa

/ Uni Eropa (1980), Republik Korea (1991), India Desember 1995), China (Juli 1996), dan Rusia (Juli 1996).¹⁷

3.3.1 Hubungan Kerjasama ASEAN dengan China

ASEAN dan China adalah tetangga dan mitra yang terjalin berdasarkan kedekatan geografis, hubungan historis, sosial, budaya dan agama. Baik ASEAN dan China menghadapi peluang dan tantangan yang sama, dan saling berbagi aspirasi untuk mendapatkan kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hubungan ASEAN-China telah melalui proses evolusi dari sikap curiga, kemudian mengarah kepada hubungan dialog, kerja sama dan kemitraan strategis.

Hubungan dialog antara ASEAN dan China dapat ditelusuri kembali ke tahun 1991 ketika China pertama kali menghadiri sesi pembukaan Pertemuan se-Tingkat Menteri ASEAN (AMM) ke-24 di Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tamu Pemerintah Malaysia. Selanjutnya, China menjadi mitra konsultatif dan kemudian Mitra Dialog penuh pada AMM ke-29 pada bulan Juli 1996 di Jakarta, Indonesia.¹⁸

Meskipun hubungan dialog ASEAN-China dimulai pada tahun 1991, namun dorongan untuk memperkuat hubungan baru terjadi ketika diadakannya KTT ASEAN-China pertama pada bulan Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia. Pada KTT tersebut, para pemimpin ASEAN dan China mengeluarkan pernyataan bersama untuk membuat arah masa depan kerjasama ASEAN-China menuju abad ke-21. Sejak itu, hubungan ASEAN-China telah berkembang pesat, substantif, dan komprehensif. Kedua belah pihak telah menikmati hubungan politik yang baik, peningkatan kerjasama

¹⁷ Sobanh Srithirath, *ASEAN-India Partnership Towards the Next Millennium*; dalam *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons, Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India*, 2004. Hal, 118.

¹⁸ Thongphane Savanphet (ASEAN Secretariat), *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*; dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACCS) Vietnam, 2006. Hal, 33.

ekonomi dan pengembangan kerjasama diberbagai sektor dengan cara memperkuat mekanisme untuk memfasilitasi kerjasama.

Kerjasama ASEAN-China sekarang mencakup politik dan keamanan, perdagangan, investasi dan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, kejahatan transnasional, dan kepemudaan. Selain itu, ASEAN-China Business Council membantu meningkatkan kerjasama antara sektor bisnis swasta ASEAN dan China, sedangkan Komite Beijing ASEAN, yang terdiri dari Duta Besar Negara-Negara Anggota ASEAN di Beijing, membantu untuk mempromosikan hubungan ASEAN-China atas nama Standing Committee ASEAN.¹⁹

Hubungan ini telah diangkat ke tingkat yang lebih tinggi dengan penandatanganan Deklarasi Bersama Kepala Negara / Pemerintah ASEAN dan Republik Rakyat China pada Kemitraan Strategis untuk Perdamaian dan Kesejahteraan pada KTT ketujuh ASEAN-China tanggal 8 Oktober 2003 di Bali, Indonesia. Deklarasi memberikan arah bagi pengembangan substantif, dan kemitraan komprehensif yang saling menguntungkan antara ASEAN dan China, berdasarkan kesetaraan bersama, kepercayaan dan manfaat.

Pada KTT ketujuh ini, Premier Wen Jiabao menegaskan bahwa dalam konteks internasional dan regional baru, China akan memperkuat kerjasama dengan ASEAN di enam bidang sebagai berikut:

Pertama, meningkatkan dialog politik dan saling percaya. ASEAN dan China lebih lanjut akan mempromosikan pertukaran kunjungan tingkat tinggi, membangun dialog penuh dan mekanisme konsultasi pada berbagai tingkat dan lebih memperkuat hubungan politik dan dasar hukum bagi kerjasama antara kedua belah pihak. *Kedua*, memperdalam perdagangan dan hubungan ekonomi untuk kepentingan pembangunan kedua negara. Meningkatkan perdagangan bilateral dan berusaha untuk mewujudkan target Rp 100 miliar volume perdagangan pada tahun 2005.²⁰ Mempercepat negosiasi mengenai

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Target tercapai pada tahun 2004.

FTA ASEAN-China untuk mewujudkan FTA sesuai jadwal, dan memperdalam kerjasama dalam bidang keuangan, pelayanan, investasi, pertanian dan informasi. *Ketiga*, memperkuat kerjasama keamanan demi perdamaian dan stabilitas di kawasan itu. *Keempat*, meningkatkan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi secara komplementer, terutama di bidang ICT, bio-teknologi, teknologi sensor, seismologi, oseanografi dan penelitian tentang sumber daya hayati tropis. *Kelima*, meningkatkan kerjasama komprehensif untuk manfaat dari China dan masyarakat ASEAN seperti pengembangan cekungan Mekong, pembangunan kereta api trans-Asia, memperkuat kerjasama dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, kesehatan masyarakat, kebudayaan dan pendidikan; mewujudkan Pertemuan Menteri Pemuda ASEAN-China dan mengadakan pertemuan Bisnis dan Investasi ASEAN-China. *Keenam*, meningkatkan kerja sama di berbagai tingkatan, menuju perkembangan hubungan yang stabil.

Pertemuan ASEAN-China kedelapan pada tanggal 29 November 2004 di Vientiane, Lao PDR menandatangani Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja pada Kerjasama Ekonomi Komprehensif antara ASEAN dan China dan Persetujuan Mekanisme Penanganan Sengketa. Perlu dicatat bahwa dalam perjanjian tersebut, ASEAN mengakui China sebagai pangsa pasar ekonomi. Berbagai perjanjian mencakup berbagai "area kerja sama menunjukkan kerja sama antara kedua belah pihak memasuki tahap baru: pembangunan kerjasama komprehensif".

Bisa dikatakan bahwa pembangunan China sejalan dengan perkembangan hubungan China-ASEAN, terutama persahabatan dan kerjasama antara kedua belah pihak, sehingga menciptakan lingkungan untuk pengembangan bersama dan saling menguntungkan.²¹

Di bidang ekonomi, ASEAN dan China merupakan wilayah ekonomi dengan sekitar 1,85 miliar konsumen, dengan PDB gabungan Rp 2,48 triliun di tahun 2004. Ekonomi China tumbuh sebesar 9,4 persen pada tahun 2004

²¹ Op.cit, Prof. GuWaosong, *China's Peaceful Development and ASEAN-China Relations*, hal, 30-31.

dibandingkan dengan 9,1 persen pada tahun 2003, sementara ASEAN membukukan PDB gabungan sebesar 6,1 persen pada tahun 2004, lebih tinggi dari tahun pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya sebesar 5.2 persen. Pada bulan September 2004, seluruh negara Anggota ASEAN dengan suara bulat mengakui status ekonomi pasar China.²²

Proses pembentukan ACFTA dibawah Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Komprehensif, yang ditandatangani pada November 2002, berjalan dengan baik. *The Early Harvest Programmed* (EHP) telah dilakukan sejak 1 Januari 2004. Setelah satu setengah tahun implementasi EHP, pengenaan tarif sebesar 4,9 persen dari total laju tarif telah dieliminasi. Lebih jauh, perdagangan roduk ASEAN-China yang tercakup dalam EHP telah meningkat sebesar 29 persen pada tahun 2003 dari nilai sebesar USD 1,55 milyar menjadi USD 2 miliar pada tahun 2004. Perjanjian perdagangan barang dan mekanisme penyelesaian konflik di bawah Perjanjian Kerangka Kerjasama Ekonomi Komprehensif telah ditandatangani pada bulan November 2004. Implementasi terhadap Persetujuan Perdagangan Barang telah dimulai sejak 20 Juli 2005, dan negoisasi antara ASEAN dan China akan berlanjut pada masalah kesepakatan perdagangan jasa dan investasi.

²² Thongphane Savanphet (ASEAN Secretariat), hal 35.

Table 3.2
FDI China Yang Masuk Ke ASEAN Tahun 2000-2008 (US\$ juta)

(US\$ million)

Source Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2000-2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Brunei Darussalam	-	-	0.2	0.2	3.0	0.1	4.8	17.2	-	25.5
Cambodia	-	2.9	49.2	26.2	33.0	102.8	130.1	164.9	76.9	586.1
Indonesia	-2.8	-1.5	0.0	-0.4	294.6	299.5	123.6	117.2	380.2	1,210.3
Lao PDR	9.1	11.8	1.3	1.8	0.1	4.5	5.3	1.7	42.9	78.5
Malaysia	0.7	16.9	13.2	1.8	2.0	1.0	-6.7	4.6	56.5	90.0
Myanmar	-	0.5	4.8	-	108.1	1.2	1.5	1.7	349.2	467.1
Philippines	0.0	0.1	-	0.0	-0.2	-0.2	2.3	-0.1	-0.2	1.7
Singapore ^d	-168.6	91.5	-170.9	131.7	212.6	69.2	616.7	594.2	478.0	1,854.4
Thailand	7.2	-2.5	20.9	23.8	-3.8	11.6	49.9	73.7	69.0	249.8
Viet Nam	21.0	24.2	9.4	1.5	85.6	48.2	88.7	251.8	44.6	574.9
ASEAN^d	-133.4	144.0	-71.9	186.6	735.0	537.7	1,016.2	1,226.9	1,497.3	5,138.4

Sumber: ASEAN Secretariat-ASEAN FDI Database 15 Juli 2009

Membaca tabel di atas terlihat bahwa nilai FDI China yang masuk ke ASEAN semenjak tahun 2000-2008 selalu mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2000 dan 2002 nilai FDI China yang masuk ke ASEAN mengalami penurunan yang mencolok yaitu mencapai US\$ -133,4 juta dan US\$ -71,9 juta. Namun pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan, bahkan nilai FDI China yang masuk ke ASEAN tahun 2004 menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan mencapai nilai US\$ 735 juta dan pada tahun 2008 mencapai US\$ 1.497,3 juta.

Perdagangan bilateral antara kedua belah pihak tumbuh sebesar 25 persen pada semester pertama tahun 2005, China terus menjadi mitra dagang keempat terbesar ASEAN dan sebaliknya. Untuk volume perdagangan enam bulan pertama tahun 2005 telah diposting sebesar USD 59.76 miliar. Perdagangan bilateral tahunan tumbuh pada tingkatan sebesar 38,9 persen untuk periode 2002-2004, dan mencapai angka USD 105,9 miliar pada tahun 2004.

Tabel 3.3
Komoditas Ekspor ASEAN Ke China Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)

Negara Tujuan	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
China	14.179	14.516	19.547	29.060	41.352	52.257

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2006

Area ekspor ASEAN ke China naik hampir empat kali lipat dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Pada tahun 2000 ekspor ASEAN 70 persen lebih tinggi daripada Cina. Namun, lima tahun kemudian, pendapatan ekspor Cina (US \$ 762.3 milyar) adalah seperlima lebih besar dari ASEAN (US \$ 626.9 miliar) dan sepuluh kali lipat dibandingkan satu dekade yang lalu. Tabel 3.2 berikut menunjukkan 10 komoditas ekspor ASEAN ke China pada tahun 2007:

Tabel 3.4
10 Komoditas Utama Ekspor ASEAN Ke China Tahun 2007

2007			
HS	Komoditi	Nilai	Saham
85	Mesin electric, peralatan dan suku cadang, peralatan suara, peralatan televisi	22.107,4	28,4
84	Reaktor nuklir, ketel uap, mesin dan peralatan mekanis; suku cadangnya	12.584,9	16,1
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan; bahan aspal, mineral lilin	8.226,5	10,6
40	Karet		
15	Sayuran Lemak dan minyak hewani dan produk disosiasinya; lemak nabati; mineral hewani atau nabati	5.221,6	6,7
29	Kimia organik	4.447,6	5,7
39	Plastik	3.618,4	4,6
74	Tembaga	3.549,0	4,6
26	Bijih, terak (ampas biji), dan abu	1.420,7	1,8
90	Optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau instrumen bedah / peralatan; suku cadang dan aksesoris	1.203,3	1,5
		1.013,2	1,3
	10 Komoditas Utama	63.392,5	81,3
	Lainnya	14.552,5	18,7
	Total	77.945,0	100,0

Sumber: ASEAN Trade Statistics Database, ASEAN Statistical Yearbook 2008

Adapun nilai impor ASEAN dari China juga mengalami peningkatan terutama sejak tahun 2002. Pada tahun 2005, nilai komoditas ekspor China ke ASEAN mencapai USD 61.136 juta.

Tabel 3.5
Komoditas Impor ASEAN Dari China Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)

Negara Asal	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
China	18.137	17.399	23.212	30.557	47.714	61.136

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2006

Dalam table 3.6 akan dijelaskan 10 komoditas impor ASEAN dari China pada tahun 2007 dan 2008.

Tabel 3.6
10 Komoditas Utama Impor ASEAN Dari China Tahun 2007

2007			
HS	Komoditi	Nilai	Saham
85	Mesin electric, peralatan dan suku cadang, peralatan suara, peralatan televisi	27.697,4	29,7
84	Reaktor nuklir, ketel uap, mesin dan peralatan mekanis; suku cadangnya	20.472,5	22,0
72	Besi dan baja	6.767,1	7,3
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan; bahan aspal, mineral lilin	3.913,0	4,2
73	Barang dari besi dan baja	2.736,7	2,9
39	Plastik	1.811,9	1,9
90	Optik, fotografi, sinematografi, pengukur, pemeriksa, presisi, medis atau instrumen bedah / peralatan; suku cadang dan aksesori	1.648,9	1,8
29	Kimia organic	1.484,8	1,6
28	Kimia anorganik, atau senyawa organik anorganik logam mulia, dari logam bumi yang langka, dari unsur radioaktif	1.467,5	1,6
31	Pupuk	1.189,1	1,3
	10 Komoditas Utama	69.189,2	74,3
	Lainnya	23.983,5	18,7
	Total	93.172,7	100,0

Sumber: ASEAN Trade Statistics Database, ASEAN Statistical Yearbook 2008

3.3.2 Hubungan Kerjasama ASEAN dengan India

India menjadi mitra sektoral ASEAN pada awal 1993 di bidang perdagangan, investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari bahwa India merupakan kekuatan besar dan memiliki potensi besar diberbagai bidang, pada KTT kelima ASEAN di Bangkok pada Desember 1995, para pemimpin ASEAN sepakat untuk menaikkan status India menjadi salah satu mitra dialog, sehingga India satu-satunya negara dari wilayah selatan Asia yang sekarang menikmati status ini.²³

Pada saat yang sama, ASEAN berpendapat bahwa dialog kemitraan ASEAN-India akan lebih konsolidasi pada abad berikutnya. Saya berharap bahwa presentasi saya hari ini²⁴ akan memberikan kontribusi yang sederhana untuk keuntungan besar yang telah kita capai sejak dialog kemitraan penuh India dengan ASEAN pada tahun 1995, khususnya melalui berbagai mekanisme penting, seperti Konferensi Pos Kementerian tahunan (PMC) yang dikenal sebagai ASEAN + India atau 10 + 1, Forum Regional ASEAN, G-77, ASEAN-SAARC, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Gerakan Nonblok dan badan-badan internasional lainnya. Layak untuk dicatat bahwa kita telah berhasil mempertahankan momentum kemitraan ASEAN -India.

Apa yang membuat dialog kemitraan ASEAN-India di abad berikutnya akan lebih terkonsolidasi?

1. Sejak berdirinya, ASEAN telah secara aktif dan konsisten membangun kegiatan eksternal dalam mengembangkan hubungan baik dan kerjasama dengan mitra dialog-nya, mitra dialog sektoral, pengamat, organisasi-organisasi sub-regional dan lembaga internasional. Sementara di sisi India, berturut-turut setiap pemerintahan di India telah mendukung "*Look East Policy*" yang dimulai sejak tahun 1991.
2. ASEAN memiliki hubungan peradaban yang kuat dengan India, seperti yang disebutkan di atas, berdasarkan kedekatan geografis. Hal ini juga

²³ *Ibid*, Sobanh Srithirath, Hal, 118.

²⁴ Text of the India-ASEAN Lecture delivered in New Delhi on November 22, 1999.

dipertegas oleh kehadiran ribuan warga negara India atau warga asal India di Asia Tenggara, khususnya di Malaysia, Singapura, Indonesia, Myanmar, Thailand, Laos, dan Kamboja. Empat batas wilayah pantai anggota negara-negara ASEAN-Myanmar, Thailand, Malaysia dan Indonesia - dibatasi oleh Samudera Hindia.

3. ASEAN dan India memiliki kesamaan konvergensi politik dan strategis. Keduanya tidak memiliki riwayat sengketa teritorial, maupun konflik kepentingan strategis. Mereka juga mempunyai nilai sistem politik yang sama berdasarkan penghormatan penuh terhadap prinsip-prinsip integritas kedaulatan teritorial, non-interferensi dalam urusan internal negara, penyelesaian sengketa secara damai dan penolakan dari ancaman atau penggunaan kekerasan. Negara-negara anggota ASEAN bersama dengan India menjadi anggota Gerakan Non-Blok. Mereka juga termasuk anggota kelompok G-77 (Kelompok negara-negara selatan).
4. ASEAN dan India juga berbagi keprihatinan mereka atas lingkungan politik dan keamanan regional, khususnya di Semenanjung Korea dan di Laut China Selatan, yang akan mempengaruhi baik ASEAN dan India, pada potensi konflik.
5. Juga diyakini bahwa hubungan baik ASEAN dan India dalam berbagi pandangan mereka tentang multi-polaritas pada skala regional dan global, menjadi garansi terbaik untuk pencapaian perdamaian, keamanan dan stabilitas.
6. ASEAN dan India membentuk aliansi alami. Mereka tidak memiliki pangkalan militer asing atau diluar wilayahnya. Namun, pada saat yang sama, keduanya memiliki posisi geo-politik yang penting.
7. Pemerintah dan masyarakatnya menghadapi masalah yang sama dalam hal berjuang untuk keamanan nasional dan pembangunan ekonomi di dunia yang semakin interdependen. Secara terpisah, mereka rentan terhadap manipulasi dan eksploitasi oleh kekuatan-kekuatan eksternal. Secara bersamaan, beberapa negara anggota ASEAN saat ini mengalami

perbedaan sehubungan dengan garis demarkasi perbatasan mereka, seperti halnya India dengan beberapa tetangganya. Masalah-masalah tentang isu minoritas dan agama juga menjadi keprihatinan untuk beberapa negara ASEAN dan India.

8. Sehubungan dengan area perdagangan dan ekonomi, ASEAN dan India juga mengikuti kebijakan keterbukaan dan liberalisasi.

Ini adalah beberapa contoh umum dan fakta kesamaan antara ASEAN dan India yang menjadi landasan yang kuat untuk dialog kemitraan ASEAN-India. Namun, harus diakui bahwa walaupun ASEAN dan India secara kolektif masih tidak kuat, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengatasi masalah melalui kerjasama dan belajar dari setiap pengalaman mereka. Dialog kemitraan ASEAN-India dalam perkembangan menuju arah konsolidasi.

Di bidang ekonomi, India dapat dihubungkan dengan AFTA melalui pengaturan fasilitasi perdagangan. Perdagangan antara India dan ASEAN memiliki banyak ruang untuk ekspansi dan nilai investasi juga secara substansial dapat diperbesar.

Table 3.7
FDI India Yang Masuk Ke ASEAN Tahun 2000-2008 (US\$ juta)

(US \$ million)

Source Country	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2000-2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Brunei Darussalam	0.23	0.28	1.46	0.64	1.22	3.80	0.52	0.23	-	8.38
Cambodia	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	0.03
Indonesia	-15.9	-17.6	-0.4	-5.3	-1.0	1.15	1.35	-345.3	0.26	-382.7
Lao PDR	0.11	-	0.13	0.35	-	0.04	0.02	-	0.03	0.67
Malaysia	0.12	-1.9	1.96	0.80	4.01	4.99	-1,067.0	5.54	-55.8	-1,107.4
Myanmar	-	-	-	-	0.20	-	-	-	-	0.20
Philippines	-	-	-	-	-	-	0.70	0.0	0.05	0.75
Singapore ¹	91.00	46.80	88.10	96.00	84.50	378.80	615.80	825.20	375.00	2,601.20
Thailand	1.81	1.28	3.27	10.13	-7.0	2.53	-4.6	33.58	38.50	79.50
Viet Nam	2.15	0.10	-	-	-	-	5.40	15.33	82.59	105.57
ASEAN²	79.5	28.9	94.5	102.4	81.9	391.3	-447.8	534.6	440.6	1,306.1

Sumber: ASEAN Secretariat-ASEAN FDI Database 15 Juli 2009

Nilai FDI India, dibandingkan dengan tahun 2000 dengan FDI yang masuk ke ASEAN sebesar US\$ 79,5 juta, pada tahun 2001 mengalami penurunan level US\$ 28,9 juta. Penurunan nilai FDI India juga terjadi pada tahun 2004 ke level US\$ 81, 9 juta, bahkan pada tahun 2006 mengalami penurunan yang sangat tajam sebesar US\$ -447,8 juta. Namun pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan, hingga mencapai US\$ 440,6 juta pada tahun 2008.

Tabel 3.8
Komoditas Ekspor ASEAN Ke India Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)

Negara Tujuan	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
India	6.447	6.211	8.418	8.453	10.939	15.048

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2006

Area ekspor ASEAN ke India antara 2000-2005 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 ekspor ASEAN ke India sebesar USD 6.447

Juta dan mengalami peningkatan hamper 3 kali kali lebih besar di tahun 2005 menjadi USD 15.048 juta. Tabel 3.9 berikut menunjukkan 10 komoditas ekspor ASEAN ke India pada tahun 2007:

Tabel 3.9
10 Komoditas Utama Ekspor ASEAN Ke India Tahun 2007

2007			
HS	Komoditi	Nilai	Saham
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan; bahan aspal, mineral lilin	5.251,4	21,1
	Barang dari besi dan baja		
84	Reaktor nuklir, ketel uap, mesin dan peralatan mekanis; suku cadangnya	4.351,1	17,5
85	Mesin electric, peralatan dan suku cadang, peralatan suara, peralatan televisi	3.067,3	12,3
			4,2
15	Sayuran lemak dan minyak hewani dan produk disosiasinya; lemak nabati; mineral hewani atau nabati	2.598,8	10,5
29	Kimia organik	1.233,9	5,0
72	Besi dan baja	951,1	3,8
39	Plastik	801,7	3,2
26	Bijih, terak (ampas biji), dan abu	582,6	2,3
44	Kayu dan barang dari kayu; arang kayu	566,5	2,3
07	Sayur-sayuran, akar dan umbi-umbian	463,7	1,9
	10 Komoditas Utama	19.868,1	80,0
	Lainnya	4.971,7	20,0
	Total	24.839,8	100,0

Sumber: ASEAN Trade Statistics Database, ASEAN Statistical Yearbook 2008

Begitu juga dengan nilai ekspor India ke ASEAN antara 2000-2005 juga selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 ekspor India ke ASEAN sebesar USD 3.210 juta dan mengalami peningkatan hamper dua setengah kali lebih besar di tahun 2005 menjadi USD 7.952 juta.

Tabel 3.10
Komoditas Impor ASEAN Dari India Kurun Waktu 2000-2005 (US\$ juta)

Negara Asal	Tahun					
	2000	2001	2002	2003	2004	2005
India	3.210	3.672	3.696	4.060	6.730	7.952

Sumber: ASEAN Statistical Yearbook 2006

Dalam table 3.11 akan dijelaskan 10 komoditas impor ASEAN dari India pada tahun 2007.

Tabel 3.11
10 Komoditas Utama Impor ASEAN Dari India Tahun 2007

2007			
HS	Komoditi	Nilai	Saham
27	Bahan bakar mineral, minyak mineral dan produk penyulingan; bahan aspal, mineral lilin	3.337,0	26,9
71	Barang dari besi dan baja		
	Mutiara alam atau budidaya, batu mulia atau semi mulia, logam mulia dan logam beserta perangkat pakaian dan barang; perhiasan imitasi; koin	1.014,9	8,2
29	Kimia organik	899,6	7,3
85	Mesin elektrik, peralatan dan suku cadang, peralatan suara, peralatan televisi	882,4	7,1
74	Tembaga	677,0	5,5
84	Reaktor nuklir, ketel uap, mesin dan peralatan mekanis; suku cadangnya	573,3	4,6
72	Besi dan baja	568,3	4,6
76	Aluminium	481,8	3,9
23	Residu makanan industri dan limbah; pakan ternak	428,6	3,5
02	Daging dan sisa daging yang dapat dimakan	247,0	2,0
	10 Komoditas Utama	9.109,8	73,5
	Lainnya	3.285,2	26,5
	Total	12.395,1	100,0

Sumber: ASEAN Trade Statistics Database, ASEAN Statistical Yearbook 2008

Kerjasama ASEAN-India bergerak ke tahap yang lebih lanjut setelah diadakannya *Joint Cooperation Meeting (JCC)* ASEAN-India kedua pada

bulan Maret 2000 di New Delhi. Kerjasama dalam pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan kontak *person to person* diberikan prioritas oleh kedua belah pihak. India menunjukkan komitmennya dengan memperluas teknis negara dan program ekonomi untuk negara-negara anggota ASEAN. Pada JCC ASEAN-India ketiga (21-22 Maret 2000) di New Delhi, kedua belah pihak setuju untuk pengembangan lebih lanjut.

Namun, perdagangan, kerjasama ekonomi dan investasi antara ASEAN dan India belum sesuai dengan harapan dan potensi pada kedua belah pihak. Jalur perdagangan dua arah pada tahun 1999 mencapai di sekitar US \$ 7 miliar, sekitar 1 persen dari total perdagangan ASEAN. Pada kuartal pertama tahun 2000, nilainya meningkat 24 persen menjadi USD 7.021 miliar. ASEAN dan India telah mendirikan Kelompok Kerja ASEAN-India di bidang perdagangan dan investasi untuk menyikapi rendahnya volume perdagangan dan arus investasi.²⁵ Bersamaan dengan itu, sebuah studi bersama tentang hubungan AFTA-India untuk meningkatkan Hubungan Perdagangan dan Investasi dalam melayani dokumen pedoman bagi kerjasama ekonomi ASEAN-India di masa depan telah dilakukan. Studi Bersama yang dimulai pada bulan Februari 2001 dan selesai pada akhir bulan Agustus difokuskan untuk mengidentifikasi area kritis kerjasama, kelompok produk yang akan dipromosikan, mekanisme untuk berbagi informasi serta cara dan sarana untuk meningkatkan akses pasar untuk produk ASEAN dan India di setiap pasar kedua negara.

Sehubungan dengan kerjasama pembangunan, saat ASEAN mulai dialog sektoral dengan India pada tahun 1993, tiga bidang kerja sama telah diidentifikasi, yaitu perdagangan dan investasi, pariwisata, ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, ketika India diangkat untuk menjadi mitra penuh dialog pada tahun 1995, bidang kerjasama diperluas untuk mencakup area yang lebih fungsional, khususnya pengembangan sumber daya manusia.

²⁵ Nguyen Dy Nien, *ASEAN-India Dialogue Relations: Presents and Prospects*; dalam *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons*, Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India, 2004. hal, 134-135.

Dalam Program Pelatihan Sumber Daya Manusia ASEAN-India, India telah menawarkan 100 slot berbagai kursus (dalam waktu satu tahun) untuk ASEAN yang ada di bawah program ITEC. Proyek dalam pengembangan sumber daya manusia, khususnya di pelatihan IT, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan pelatihan bahasa Inggris untuk ASEAN telah terbukti sangat efektif dan bermanfaat. Kerjasama antara ASEAN dan India di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga ditingkatkan. Bidang kerja sama seperti bahan maju, bioteknologi dan teknologi informasi juga mencapai kemajuan penting.²⁶

Tabel 3.12
Matriks Perbandingan Hubungan Kerjasama ASEAN Dengan China-India

China	India
Perkembangan utama dalam hubungan China ASEAN-China sejak berakhirnya perang dingin disebabkan karena saling ketergantungan ekonomi yang tumbuh diantara keduanya.	Peningkatan hubungan India-ASEAN terjadi pada akhir 1990-an dan awal 2000. Pada tahun 1998, Perdana Menteri India, Mr. Atal Bihari Vajpayee bermaksud untuk mempercepat penerapan Look East Policy India dengan menerapkan konsep 'extended neighborhood'
<p>Para analis China telah membagi evolusi hubungan ekonomi ASEAN-China menjadi dua tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dari tahun 1991, ketika Menlu China Qian Qichen diundang menghadiri Pertemuan Menlu ASEAN ke-24. Tahun 2001 Presiden China Zhu Rongji mengusulkan kawasan perdagangan bebas ASEAN-China, guna memperluas dan memperdalam hubungan perdagangan bilateral. 2. Bulan November 2002, Penandatanganan Agreement on Comprehensive Economic Cooperation China-ASEAN menuju 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelembagaan hubungan ASEAN-India Pertama kali terjadi ketika Pertemuan pertama ASEAN-India di Pnhom Penh pada tanggal 5 November 2002 dan dianggap sebagai langkah maju bagi India untuk mengembangkan kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara. 2. Pada pertemuan ASEAN-India ke-dua tahun 2003, disepakati the ASEAN-India Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation. Dan persetujuan the ASEAN-India Trade in Goods (TIG) baru dilaksanakan pada 1 Januari

²⁶ *Ibid.*

integrasi ekonomi regional (ACFTA). Selama bertahun-tahun, China dan ASEAN telah melembagakan 48 mekanisme reguler untuk memfasilitasi kerjasama ekonomi yang lebih erat. Diantaranya: ASEAN+1, Pertemuan Pejabat Senior China-ASEAN, Komite Kerjasama Bersama Ekonomi dan Perdagangan ASEAN-China, Komite Bersama Sains dan Teknologi ASEAN-China (Juli 1994) 2010.

3.4 Daya Saing ASEAN Terhadap China-India

Sejak didirikan tahun 1967 sampai pada pertengahan tahun 1990-an, ASEAN telah dianggap sebagai salah satu kelompok regional yang paling berhasil di dunia. Selama periode 1980-97, ASEAN mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan hampir semua wilayah lain. Namun, realitas ekonomi telah berubah secara dramatis dalam 10 tahun terakhir dengan diawali krisis finansial Asia pada tahun 1997 dan munculnya China dan India sebagai raksasa ekonomi di Asia sejak pertengahan tahun 1990-an.

Tanggapan atas keprihatinan yang berkembang terhadap daya saing setelah Krisis Keuangan Asia 1997,²⁷ mengakibatkan terjadinya peningkatan retorika oleh para pemimpin politik ASEAN tentang perlunya integrasi ekonomi ASEAN yang lebih besar. Pada KTT 2003 di Bali, Pemimpin ASEAN mendeklarasikan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020 (kemudian dimajukan menjadi 2015). Ini adalah salah satu dari tiga pilar dari visi kolektif ASEAN - Komunitas ASEAN.²⁸ Tujuan AEC adalah untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran dan daya saing kawasan ekonomi ASEAN ketingkat yang tingkat lebih tinggi dari integrasi ekonomi regional (seperti yang telah digariskan dalam Visi ASEAN 2020), dan dengan tujuan akhir menjadi pasar bersama di ASEAN, seperti

²⁷ McKinsey & Company, ASEAN Competitiveness Study, McKinsey & Company, 2003

²⁸ 2 pilar lainnya adalah Komunitas Keamanan ASEAN dan Komunitas Sosial dan Budaya ASEAN; ASEAN Secretariat, ASEAN Baseline Report: *Measurements to Monitor Progress Towards The ASEAN Community*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2005

Uni Eropa. AEC dipertimbangkan menjadi pasar tunggal dan basis produksi dengan aliran bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja terampil, dengan pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial.²⁹

Manfaat, kebutuhan dan pembicaraan menuju integrasi ekonomi ASEAN yang lebih besar (menghasilkan AEC pada tahun 2015) ditekankan pada Pertemuan Keempatpuluh Menteri Ekonomi ASEAN (AEM) pada tanggal 25-26 bulan Agustus 2008, dan Simposium Tingkat Tinggi terhadap Integrasi Ekonomi Asia pada tanggal 4 September 2008 di Singapura.³⁰

Setelah mengalami penurunan tajam dalam kinerja ekonomi selama 1997-98 sebagai akibat dari krisis finansial Asia, ASEAN sebagai suatu kelompok melakukan *rebound* dalam periode berikutnya, tetapi tidak pernah bisa pulih kepada posisi daya saing semula dalam perekonomian dunia. Tidak hanya perolehan GDP ASEAN, nilai perdagangan dan investasi asing langsung (FDI) yang masuk menurun antara tahun 1997 dan 2006, pertumbuhan produktivitas ASEAN, yang diukur dengan pertumbuhan PPP PDB riil per kapita pada periode 1997-2006 juga mengalami penurunan (bila dibandingkan dengan periode sebelumnya 1980-97). Secara khusus, menurunnya kinerja daya saing ASEAN pada dekade setelah krisis keuangan Asia 1997 sangat kontras dengan peningkatan pesat pangsa pasar dunia dan pertumbuhan produktivitas China dan India.

Variasi yang signifikan juga ditemukan diantara masing-masing negara anggota ASEAN dalam hal kinerja daya saing. Secara khusus, di antara negara-negara berpenghasilan rendah, Vietnam telah mencapai peningkatan yang signifikan dalam dekade terakhir, sementara Indonesia menunjukkan performa yang cukup baik. Meskipun sudah menjadi negara yang berpenghasilan tinggi, Singapura mampu mengungguli Thailand dan Malaysia dalam dekade terakhir.

²⁹ Hew, D., & Das, S. B., *ASEAN Economic Community and CLMV Countries*. Workshop on Production Networks, Industrial Clusterings and Industrialisation Strategy in Less Developed Southeast Asia. Singapore: ISEAS, 2008.

³⁰ Business Times Singapore, "Asean seen on track for economic integration", 5 September 2008.

Sewaktu Asia memasuki abad ke-21, media global menyoroti dekade terakhir abad ke-20 sebagai “dekade yang hilang” untuk ekonomi terbesar di Asia yaitu Jepang. Dan munculnya mega dua negara Asia - China dan India - telah memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan relatif ASEAN dalam memperluas ekonomi global. Namun hampir semua ekonom berpendapat bahwa lambatnya integrasi ekonomi dan liberalisasi di antara negara-negara anggota ASEAN telah menjadi faktor penting dalam penurunan posisi kompetitif ASEAN dalam perekonomian dunia. Selama dekade terakhir, perdagangan intra ASEAN telah berada di atau di bawah seperempat dari total perdagangan negara ASEAN, jauh lebih kecil daripada dalam kasus Uni Eropa (sekitar dua pertiga di antara EU25), dan NAFTA (lebih 40%). Selama persaingan global terus terjadi, kita hanya bisa berharap bahwa ASEAN akan mampu mengejar ketertinggalan dengan mempercepat proses integrasi ekonomi dalam dekade berikutnya.

Sebagai kesimpulan, temuan hasil pertama menyatakan bahwa, walaupun ASEAN mengalami peningkatan pangsa ekonomi dunia 1980-1997, lalu mengalami penurunan drastis akibat krisis 1997-1999, dan telah mengalami beberapa pemulihan, akan tetapi nilai (*share*) ASEAN di dunia ekonomi tahun 2006 pada umumnya lebih rendah dibandingkan dengan tahun 1997.

Temuan kedua adalah bahwa secara mutlak dan relatif, kinerja pertumbuhan ASEAN telah melambat selama 10 tahun terakhir.

- Dalam sepuluh tahun terakhir, pertumbuhan PDB riil perkapita (PPP) dari ASEAN6 mengalami penurunan tidak hanya Asia Timur dan Pasifik, Asian NIEs, China dan India, tetapi juga terjadi pada negara berpendapatan menengah ke bawah, dan atas negara berpendapatan menengah. Bahkan, meskipun pertumbuhan PDB riil per kapita (PPP) dari ASEAN4, 5 dan 6 adalah sedikit di atas rata-rata seluruh dunia 1998-2006, namun jika jangka waktu Krisis Keuangan Asia diperhitungkan (1997-2006), kinerja negara-negara ASEAN berada di bawah rata-rata dunia.

- Kinerja negara-negara ASEAN relatif lebih baik pada pertumbuhan GDP dari pada pertumbuhan GDP per kapita bila dibandingkan dengan negara-negara yang lebih maju, karena pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi di kawasan ini.
- China dan India (gabungan) meningkat khususnya kuat selama 10 tahun terakhir - periode ketika peningkatan kinerja ASEAN melambat. Pada tahun 2000, per kapita PPP PDB riil China telah melampaui pendapatan rata-rata ASEAN. Seperti yang dikemukakan oleh beberapa para ahli, sistem perdagangan global bukan *zero-sum game*, dalam penurunan pangsa pasar ekspor produk jadi ASEAN ke negara-negara maju dapat dikompensasi dengan cara peningkatan ekspor komponen ASEAN ke China - yang muncul menjadi basis produksi global untuk berbagai macam barang-barang manufaktur.³¹ Memang, semakin pentingnya China untuk ASEAN dapat dilihat dari kenyataan bahwa ASEAN telah menjadi pasar ekspor terbesar ke-5 China dan impor pemasok terbesar ke-4 dari China pada tahun 2006. Selain itu, China diberi oleh Indonesia, Malaysia Singapura dan Thailand sebagai salah satu dari 5 pasar ekspor mereka dan sumber impor negara pada tahun 2006.

Kesimpulan

Pengamatan di atas memberikan gambaran bahwa peningkatan yang pesat dari China dan India pada dekade terakhir ini secara relatif telah mengurangi pangsa ASEAN dalam perekonomian dunia, khususnya, penurunan pangsa ASEAN dalam penerimaan FDI global yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan pesat dari China dan India sebagai tujuan FDI .

Pada bab selanjutnya akan dibahas tentang integrasi ekonomi ASEAN, dimana dalam proses perjalanannya ASEAN mengalami perubahan visi, dari yang berorientasi pada kerjasama yang berorientasi politik untuk mencapai perdamaian dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, dalam perjalanannya berubah menjadi kerjasama regional dengan memperkuat semangat stabilitas ekonomi dan sosial di kawasan Asia Tenggara.

³¹ J.Ravenhill, "Is China an Economic Threat to Southeast Asia?" In Asian Survey, Vol. 46, Issue 5, University of California, 2006, hal, 653-674.

BAB 4

INTEGRASI EKONOMI ASEAN

Bab ini akan membahas analisa tentang proses integrasi ekonomi ASEAN. Sub-bab pertama membahas tentang perkembangan regionalisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Sub-bab kedua dan ketiga adalah analisis proses perkembangan ASEAN, yang berawal dari pembentukan AFTA menuju integrasi ekonomi yang lebih mendalam. Sub-bab keempat mengenai evolusi dari integrasi ekonomi ASEAN dalam konteks regional, sub-bab kelima membahas tentang sikap *open regionalism* ASEAN serta sub-bab keenam akan membahas mengenai implikasi dari sikap *open regionalism* ASEAN, yaitu dengan cara membentuk FTA dengan China dan India.

4.1 Perkembangan Regionalisme

Regionalisme telah menjadi fitur yang menonjol dari sistem perdagangan global untuk beberapa tahun belakangan, sebagian terjadi karena relatif lebih lambat proses negosiasi perdagangan multilateral yang telah dilakukan di bawah Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan (GATT) / World Trade Organization (WTO). Perkembangan baru-baru ini perjanjian perdagangan regional (RTAs) dan bentuk-bentuk kerjasama regional, dipicu oleh integrasi pasar Uni Eropa (UE) yang sejauh ini merupakan contoh integrasi ekonomi regional yang paling sukses, telah menarik perhatian pada kebutuhan negara-negara untuk memperkuat hubungan mereka dengan negara-negara lain dengan memberikan manfaat ekonomi menuju integrasi regional.

4.1.1 Implikasi Ekonomi Dari Integrasi Regional

Diakui secara luas, argumen yang paling mendukung dalam integrasi regional adalah manfaat memperluas pasar dan mempromosikan kompetisi dengan menghilangkan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota. Kesejahteraan ekonomi meningkat ketika sumber daya yang sebelumnya dipakai dalam produksi dalam negeri yang mahal secara efisien

dialokasikan kembali ke arah keuntungan komparatif negara dan menghasilkan produktivitas yang lebih besar (efek penciptaan perdagangan). Perluasan pasar regional juga dapat dilihat oleh negara-negara di luar kawasan sebagai peningkatan peluang perdagangan.

Namun, integrasi regional juga memiliki potensi risiko. *Pertama*, dapat menimbulkan kerugian kesejahteraan jika "efek penciptaan perdagangan" dibayangi oleh "efek pengalihan perdagangan", yaitu jika penghapusan hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota menyebabkan perdagangan lebih efisien dengan negara-negara non-anggota dibandingkan jika dialihkan ke negara anggota yang kurang efisien. *Kedua*, akan menyebabkan "pengalihan efek investasi" dimana investasi sumber daya yang terbatas dialihkan ke pasar terpadu dengan skala yang lebih besar. Ketiga, ada kekhawatiran terhadap "efek mangkuk mie" ("noodle bowl effect"), mengacu pada potensi masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari kurangnya koherensi antara perbedaan perjanjian yang tumpang tindih. Tumbarello mengutip perjanjian bilateral yang dinegosiasikan oleh beberapa anggota dari masing-masing negara ASEAN dengan negara-negara non-ASEAN, bahkan ASEAN sendiri sedang melakukan negosiasi dengan negara yang sama.¹ Karena ada sedikit usaha untuk mencapai konsistensi dan harmonisasi dalam perjanjian yang dinegosiasikan, muncul aturan yang membatasi dan inkonsistensi dari aturan awal yang merumitkan sistem perdagangan. Sebuah contoh yang diberikan pada perbedaan pada aturan awal adalah bahwa dari Selandia Baru-Singapura dan ASEAN Free Trade Area (AFTA) yang menggunakan kriteria 40 persen nilai tambah, sedangkan ASEAN-India, Singapura-India dan Jepang-Singapura memberlakukan beberapa perubahan dari kriteria tarif awal atau ketentuan yang lebih kompleks lainnya.

¹ Patrizia. Tumbarello, "Are Regional Trade Agreements in Asia Stumbling or Building Blocks? Implications for the Mekong-3 Countries", IMF Working Paper WP/07/53, March 2007, International Monetary Fund.

4.2 Dari ASEAN Menuju AFTA

Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967, ketika 5 asli anggota-Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand menandatangani Deklarasi Bangkok. ASEAN sekarang terdiri dari 10 negara anggota, dengan bergabungnya Brunei Darussalam (1984), Vietnam (1995), Laos (1997), Myanmar (1997) dan Kamboja (1999). Namun ASEAN Sekretariat baru didirikan pada tahun 1976, tepat setelah akhir Perang Vietnam dan hampir sepuluh tahun setelah pendirian ASEAN itu sendiri. Sekretariat ASEAN berkantor di Jakarta, Indonesia.²

Pada awalnya, ASEAN didirikan untuk tujuan politik, mengupayakan perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara. Dengan melihat ke belakang, karena rasa saling percaya diantara negara-negara anggota, kita dapat mengatakan bahwa ASEAN sesungguhnya telah berkontribusi untuk menjaga stabilitas di seluruh Asia Tenggara. Dari akhir 1970-an dan seterusnya, negara-negara ASEAN mulai memikirkan untuk mengembangkan kerjasama ekonomi, tapi hal ini sulit untuk diwujudkan dalam waktu yang lama. Meskipun *Preferential Trading Agreement* (PTA) telah disepakati pada tahun 1977, namun dampaknya terbatas: konsesi tarif yang diberikan negara-negara ASEAN dalam kerangka PTA terlalu kecil, atau terkait dengan produk yang hanya mewakili sebagian marjinal perdagangan intra-ASEAN.³

Pada saat itu, negara-negara ASEAN tidak siap untuk membuka diri lagi, terutama karena kesenjangan pembangunan yang ada antara negara-negara anggota dan dikarenakan kenyataan bahwa beberapa anggota memilih menerapkan strategi substitusi impor. Selain itu, tingkat pertumbuhan ekonomi di kawasan cukup tinggi, sehingga anggota ASEAN tidak merasa perlu untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan. Barulah pada paruh kedua tahun 1980-an liberalisasi

² G.O.Pasadilla, (2004), *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

³ L. Cuyvers, and W. Puppaves, *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper, No.6, September 1996.

perdagangan mulai serius berjalan di ASEAN-6.⁴ Pada saat itu, negara-negara ASEAN telah mendapatkan cukup percaya diri dan juga merasa meningkatnya tekanan eksternal yakni dari IMF dan Bank Dunia untuk mempercepat upaya liberalisasi perdagangan. Akhirnya, anggota ASEAN juga ingin melindungi diri terhadap blok perdagangan baru yang dikembangkan oleh NAFTA dan Uni Eropa, karena mereka khawatir terhadap nilai ekspor mereka ke pasar-pasar besar ini.⁵

4.2.1 ASEAN Free Trade Agreement (AFTA)

Diawali oleh munculnya regionalisme global dengan berbagai potensi, manfaat dan pandangan yang secara umum pesimis terhadap inisiatif perdagangan multilateral di bawah WTO, ASEAN memulai beberapa inisiatif menuju konvergensi ekonomi regional, salah satunya dengan membentuk *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA). AFTA adalah langkah besar pertama yang diberlakukan tahun 1992.

Pada bulan Januari 1992, para pemimpin ASEAN memutuskan untuk melakukan upaya liberalisasi perdagangan mereka ke tingkat yang lebih tinggi, dengan mendirikan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Pada 1995 mereka juga mewujudkan ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan pada tahun 1998, menteri-menteri ASEAN mendirikan Area Investasi ASEAN (AIA) yang pada akhirnya berfokus pada perjanjian AFTA.

Perjanjian AFTA selangkah lebih jauh daripada pembentukan PTA tahun 1977: perjanjian baru ini bertujuan untuk mengurangi tarif pada berbagai macam produk, juga diupayakan penghapusan hambatan non-tarif, pembatasan kuantitatif dan tindakan lintas-batas lainnya.⁶ Dengan menghilangkan hambatan tarif antara anggota ASEAN, AFTA akan mengubah ekonomi

⁴ “ASEAN-6” ditujukan untuk 6 negara pendiri ASEAN: Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Brunei Darussalam. “ASEAN-CLMV” ditujukan untuk negara yang baru bergabung kedalam ASEAN dan tertinggal perkembangannya: Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.

⁵ S.F. Naya, and P. Imada, *The Long and Winding Road Ahead for AFTA*, dalam: Imada & Naya (Eds.) (1992), *AFTA: The Way Ahead*, ISEAS, Singapore, hal. 53-66. S.F. Naya, (2004), *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal. 1-16.

⁶ G.O. Pasadilla, *East Asian Co-operation: The ASEAN View*, Philippine Institute for Development Studies, Discussion Paper Series, No. 2004-27, August 2004.

ASEAN menjadi suatu basis produksi tunggal dan secara bersamaan akan menciptakan pasar regional dari 500 juta konsumen. Perjanjian AFTA merupakan sebuah liberalisasi perdagangan bertahap, mengurangi tingkat tarif yang dikenakan pada impor intra-ASEAN tidak lebih dari lima persen selama 15 tahun. Pengurangan tarif hanya berlaku untuk produk yang sesuai dengan konten persyaratan ASEAN. Ini berarti bahwa paling tidak 40% dari nilai suatu produk harus berasal dari negara-negara ASEAN.⁷

Menurut rencana awal, AFTA akan sepenuhnya diterapkan pada tahun 2008. Namun, pada tahun 1994, Menteri Ekonomi ASEAN memutuskan untuk mempercepat proses, memajukan waktu penyelesaian hingga 2003. Pada tahun 1995, waktu target dimajukan lagi menjadi tahun 2002. Pada saat yang bersamaan, diputuskan bahwa tarif pada impor intra-ASEAN sepenuhnya harus dihapuskan pada tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan tahun 2015 untuk ASEAN CLMV.⁸

4.2.2 The Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Dalam prakteknya, skema *The Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) diperkenalkan untuk mengimplementasikan Perjanjian AFTA. Skema CEPT mencakup produksi produk manufaktur dan semi manufaktur, termasuk barang modal dan proses produk pertanian. Proses liberalisasi dilakukan pada kecepatan yang berbeda sesuai dengan kelompok produk: dibedakan berdasarkan skema “fast track” (jalur cepat) dan “normal track” (jalur normal). Produk dalam *Inclusion List* (IL) harus segera diliberalisasi melalui pengurangan tarif CEPT maksimal 5% pada tahun 2002. Negara-negara CLMV ASEAN diperbolehkan untuk menerapkan hal ini dengan tenggat waktu yang berbeda: Vietnam telah memenuhi tujuan ini pada tahun 2006, Laos dan Myanmar pada 2008 dan Kamboja pada tahun 2010. Kesepakatan

⁷ ASEAN Secretariat, *Agreement on the Common Effective Preferential Tariff Scheme for the ASEAN Free Trade Area*, Singapore, 28 January 1992. (<http://www.aseansec.org/12375.htm>)

⁸ *Ibid.*

AFTA juga memungkinkan untuk pengecualian pada beberapa produk yang sensitif terhadap pengurangan tarif di bawah skema jalur cepat atau normal. Oleh karena itu, *Temporary Exclusion Lists* (TEL), *Sensitive Lists* (SL) dan *General Exception Lists* (GE) disusun oleh semua anggota ASEAN.⁹ *Temporary Exclusion List* (TEL) dapat dikecualikan dari liberalisasi perdagangan untuk jangka waktu terbatas. Pada akhirnya, semua produk dalam TEL harus ditransfer ke *Inclusion List* (IL) untuk diterapkan ke tarif maksimal 5%. *Sensitive Lists* (SL) utamanya berisi produk pertanian mentah (belum diolah). Perdagangan produk-produk ini harus diliberalisasi pada tahun 2010 untuk ASEAN-6, sedangkan anggota baru mendapatkan kerangka waktu yang lebih lama. *General Exception Lists* (GE) secara permanen dikecualikan dari liberalisasi perdagangan dengan alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kesehatan masyarakat, perlindungan lingkungan dan perlindungan barang artistik, nilai sejarah atau arkeologi.¹⁰

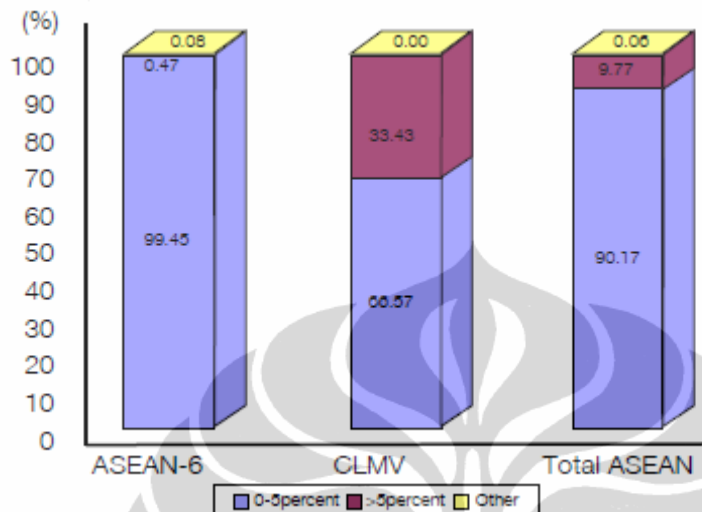
Lebih dari 99% dari produk dalam *Inclusion List* (IL) CEPT ASEAN-6 memiliki tarif yang tidak lebih dari 5% (Gambar 1). pada tahun 2003, Sejumlah kecil produk yang masih memiliki tarif di atas 5%, terutama produk yang telah dialihkan dari *Sensitive Lists* (SL) dan *General Exception Lists* (GE). Selain itu, hampir semua produk yang diperdagangkan oleh ASEAN-6 di kawasan adalah bagian dari IL. Untuk ASEAN CLMV, tarif sebesar 66,57% dari produk dalam IL telah diturunkan menjadi maksimal 5%. Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa tidak lebih dari 80% dari produk yang diperdagangkan oleh negara-negara di kawasan merupakan bagian dari IL. Ini semua berarti, bahwa ASEAN IL-10 (total ASEAN) sekarang terdapat sekitar 90% dari total tarif baris dan bahwa 90,17% dari tarif dalam IL baris memiliki tarif berkisar antara 0-5%.¹¹

⁹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, an update, Jakarta, November 1999. (www.aseansec.org/10881.htm)

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ ASEAN Secretariat, *ASEAN Annual Report 2003-2004*, Chapter 2: *Economic Integration and Cooperation*, Jakarta, 2004. (<http://www.aseansec.org/ar04.htm>), dan AFTA Council, *The Seventeenth*

Grafik 4.1
 Persentase Tarif Baris pada 0-5 percent dalam Paket Tentatif CEPT 2004



Catatan: "Lainnya" mewakili tarif baris dengan tugas khusus berdasarkan data sebelum aplikasi Tarif Harmonised Nomenklatur ASEAN (AHTN)

Grafik 4.1 menunjukkan skema reproduksi yang diterapkan untuk pengurangan bertahap dari tarif CEPT rata-rata. Tingkat tarif rata-rata di bawah Skema CEPT untuk ASEAN-10 berada di 2,63% pada tahun 2003, dan berkisar dari 0% di Singapura menjadi 7,96% di Kamboja, negara anggota ASEAN yang paling muda. Pada tahun 2004, tarif rata-rata untuk ASEAN-6 lebih jauh menurun menjadi 1,51%, dibandingkan 12,76% pada tahun 1993 ketika AFTA dimulai.¹²

Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement, Jakarta, 1 September 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>)

¹² *Ibid.*

Tabel 4.1
Rata-rata AFTA / Harga Tarif CEPT oleh Negara (%)

Tahun	2000	2001	2002	2003
Brunei	1.26	1.17	0.96	0.96
Cambodia	10.40	10.40	8.93	7.96
Indonesia	4.77	4.36	3.73	2.16
Laos	7.07	6.58	6.15	5.66
Malaysia	2.85	2.59	2.45	2.07
Philippines	4.97	4.17	4.07	3.77
Singapore	0.00	0.00	0.00	0.00
Thailand	6.07	5.59	5.17	4.63
Vietnam	7.09	7.09	N/A	N/A
ASEAN	3.74	3.54	3.17	2.63

Note: Tingkat tarif rata-rata CEPT untuk ASEAN secara keseluruhan adalah rata-rata tertimbang, dengan jumlah baris tarif di Daftar Inklusi (IL) tahun 1999 digunakan sebagai ukuran.

Meskipun Sekretariat ASEAN mengklaim bahwa AFTA sekarang hampir didirikan, pernyataan ini mungkin agak menyamarkan kebenaran. Beras, dianggap sebagai produk yang sangat sensitif bagi kawasan, masih dikecualikan dari perjanjian AFTA. Selain itu, beberapa anggota masih sangat tidak responsif ketika mereka harus menerapkan tarif lebih rendah pada produk kelompok kritis tertentu. Malaysia, misalnya, menolak untuk mematuhi tenggat waktu AFTA dan terus memungut tarif atas biaya perakitan (CBUs) dan unit otomotif (CKDs). Dengan demikian, Malaysia pasti ingin melindungi produsen mobil negara Proton. Hanya baru-baru ini, CBU otomotif dan CKDs akhirnya telah ditransfer ke IL Malaysia. Bisa dikatakan bahwa Thailand yang memiliki

pertumbuhan industri otomotif yang pesat, tidak terlalu senang dengan keterlambatan yang signifikan terhadap upaya proses liberalisasi Malaysia.¹³

Masalah yang paling krusial adalah sangat terbatasnya penggunaan dari Skema CEPT. Perhitungan menunjukkan bahwa hanya 5% dari total perdagangan intra-ASEAN dilakukan dengan menggunakan tarif CEPT.¹⁴ Pemimpin ASEAN berusaha keras untuk menyebarkan penggunaan Skema CEPT kepada sektor bisnis lokal. Aturan awal CEPT dan prosedur sertifikasi operasional baru-baru ini telah direvisi untuk disesuaikan lebih baik sesuai tuntutan lingkungan bisnis. Perubahan meliputi pengenalan terhadap:¹⁵

- a. Standar metode penghitungan lokal / konten ASEAN
- b. Seperangkat prinsip-prinsip untuk menentukan biaya tarif untuk anggota asli ASEAN dan pedoman untuk biaya metodologi
- c. Perawatan khusus dan jelas terhadap pengadaan bahan lokal
- d. Perbaikan proses verifikasi

Sampai sekarang, metode "nilai tambah" (value added) digunakan untuk menentukan asal dari produk yang termasuk dalam Skema CEPT. Nilai tambah menetapkan aturan bahwa setidaknya 40% dari nilai produk harus berasal dari negara-negara asal ASEAN. *Task Force* pada Aturan Asal CEPT saat ini bekerja pada praktek implementasi alternatif dalam menentukan kriteria. Yang disebut "CTH-Change in Tariff Heading Rule (Aturan Perubahan Tarif Pos)" atau "substantial transformation rule (aturan transformasi substansial)" akan menjadi berlaku untuk produk yang tidak dapat memenuhi 40% lokal / persyaratan konten ASEAN.¹⁶ Pengenalan terhadap aturan transformasi substansial akan membuat aturan CEPT dari asal lebih fleksibel, terutama bagi

¹³ Economist, *Free Trade in Southeast Asia, More Effort Needed*, The Economist, 29 July 2004 dan AFTA Council, *The Eighteenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 2 September 2004. (<http://www.aseansec.org/16349.htm>)

¹⁴ R.A. Reyes, *The ASEAN Model of Economic Integration*, The Jakarta Post, 19 July 2004.

¹⁵ ASEAN Secretariat, Trade, Jakarta, 2004. (www.aseansec.org/12021.htm)

¹⁶ AFTA Council, *The Seventeenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 1 September 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>)

negara-negara anggota yang lebih miskin, dimana produsen di sektor-sektor tertentu mengalami kesulitan untuk memenuhi 40% persyaratan nilai tambah.¹⁷

Para pemimpin ASEAN juga menyadari bahwa hambatan non-tarif akan tetap menjadi kendala utama dalam proses kedatangan aliran bebas barang di kawasan. Kemajuan dalam penghapusan tindakan-tindakan non-tarif (Non-Tariff Measures/NTMs) yang *indefensible* akan sangat memperlambat, meskipun terdapat prioritas tinggi yang ditetapkan Menteri-menteri ASEAN untuk masalah tersebut. Baru-baru ini, sebuah database NTMs ASEAN telah di *set up* untuk mendapatkan gambaran yang lebih baik tentang hambatan yang tersisa. Pemimpin ASEAN juga mengundang sektor swasta untuk memberitahu semua NTMs yang terdaftar atau tidak terdaftar sehingga mereka dapat dihilangkan kemudian. Kendala lain yang mungkin jadi penghambat dalam pergerakan bebas barang adalah perbedaan standar produk dan regulasi teknis. Oleh karena itu, Komite Koordinasi ASEAN tentang Standar dan Mutu (ASEAN Coordinating Committee on Standards and Quality /ACCSQ) telah dibuat untuk bertanggung jawab atas pelaksanaan Perjanjian tentang *ASEAN Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements and for the harmonization of technical regulations and product standards*. Akhirnya, semua negara anggota didorong untuk memenuhi Perjanjian Perizinan Impor WTO secepat mungkin.¹⁸

Menurut Dewan AFTA, sasaran utama dari setiap FTA adalah mencapai tingkat tarif nol dan pasar bebas yang terintegrasi dengan sirkulasi barang. Negara ASEAN-6 harus mencapai target pada tahun 2010 dan negara-negara CLMV ASEAN pada tahun 2015.¹⁹ Namun, seperti saat ini, pengenaan tarif

¹⁷ P. Brenton, *Notes on Rules of Origin with Implications for Regional Integration in South East Asia*, Paper prepared for the PECC Trade Forum, 22-23 April 2003, Washington DC, hal. 16.

¹⁸ *Op.cit.*, AFTA Council, 2003. (<http://www.aseansec.org/15070.htm>), dan dalam AFTA Council, *The Eighteenth Meeting of the ASEAN Free Trade Area (AFTA) Council Joint Media Statement*, Jakarta, 2 September 2004. (<http://www.aseansec.org/16349.htm>), ASEAN Sekretariat, *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16659.htm>)

¹⁹ ASEAN Sekretariat, *Southeast Asia, a Free Trade Area*, ASEAN Sekretariat, Jakarta, 2002. (www.aseansec.org/1205.htm)

terhadap 64,12% produk dalam IL ASEAN-6 telah dieliminasi secara penuh.²⁰ Hal ini sangat jelas bahwa itu akan memakan banyak waktu dan usaha, sebelum arus bebas barang di kawasan ASEAN terlaksana.

Terlepas dari masalah apakah liberalisasi di kawasan ini dilakukan dengan cukup cepat, pertanyaan juga dapat diajukan mengenai kontribusi AFTA bagi kesejahteraan umum. Meskipun sebagian besar penulis setuju pada dampak positif ASEAN terhadap kohesi dan stabilitas politik di kawasan, namun terdapat sedikit konsensus dalam bidang ekonomi pada pembentukan perjanjian perdagangan bebas di Asia Tenggara. Krugman menyarankan bahwa FTA antara "mitra dagang alami" lebih mungkin dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan, dari pada perjanjian antara negara-negara yang terletak tersebar. Jika bias dari pengaturan perdagangan kawasan terlalu besar, akan menyebabkan terjadinya pengalihan perdagangan, termasuk penciptaan perdagangan, sehingga mengurangi kesejahteraan.²¹ AFTA merupakan contoh yang baik dari blok perdagangan alami, tetapi juga harus disebutkan bahwa negara-negara anggota ASEAN secara tradisional telah melakukan peningkatan ekonomi keluar kawasan (outward-looking economies). Elliot dan Ikemoto mencatat bahwa daripada perdagangan intra regional, perdagangan antar regional telah banyak berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN selama tiga dekade terakhir atau lebih. Secara teoritis, AFTA bisa dengan mudah memiliki efek pengalihan perdagangan.²²

Beberapa penelitian empiris baru-baru ini telah menganalisa dampak AFTA pada perdagangan gabungan internasional. Hasil dari studi ini: studi oleh Elliot dan Ikemoto (2004), Gosh dan Yamarik (2002) dan Cernat (2001) menemukan bahwa AFTA menyebabkan terbentuknya jaringan penciptaan perdagangan, sementara Dee dan Gali (2003) dan Soloaga dan Winters (2000)

²⁰ ASEAN Secretariat, ASEAN Annual Report 2003-2004, Chapter 2: *Economic Integration and Cooperation*, Jakarta, 2004. Hal, 17. (<http://www.aseansec.org/ar04.htm>)

²¹ P.R. Krugman, *Is Bilateralism bad?*, 1991. In: E. Helpman, and A. Razin, *International Trade and Policy*, MIT Press, Cambridge/London, 1991.

²² R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, *AFTA and the Asian Crisis: Help or Hindrance to ASEAN Intra-Regional Trade?*, Asian Economic Journal, Vol. 18, No. 1, March 2004, hal, 2.

menunjukkan bahwa AFTA menyebabkan terjadinya pengalihan perdagangan.²³ Harapan teoritis bahwa AFTA akan memiliki efek pengalihan perdagangan yang penting tidak sepenuhnya dikonfirmasi oleh studi-studi sebelumnya. Elliot dan Ikemoto beranggapan bahwa signifikansi dari proporsi perdagangan total antar regional ASEAN dapat dipertahankan. Bahkan krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 tidak menyebabkan perubahan besar terhadap kegiatan perdagangan yang berorientasi ke dalam negara-negara anggota ASEAN.²⁴

Ekspor Intra-ASEAN sebagai persentase dari total ekspor ASEAN meningkat dari 18% pada 1985 menjadi 23,16% pada tahun 2003, sedangkan pangsa impor intra ASEAN dalam total impor ASEAN naik dari 16% pada 1985 menjadi 20,73% pada tahun 2003. Perdagangan intra ASEAN tampaknya tumbuh pada tingkat yang hanya sedikit di atas laju pertumbuhan perdagangan global ASEAN.

Selain itu, perdagangan intra ASEAN telah meningkat dengan kecepatan jauh lebih lambat dibandingkan dengan perdagangan di antara negara-negara berkembang Asia Timur pada umumnya. Peningkatan PDB yang kuat di negara-negara berkembang dan gerakan global menuju liberalisasi perdagangan, merupakan faktor utama untuk menjelaskan tren ini. Akibatnya, ASEAN masih kalah jauh dibandingkan dengan kawasan Asia Timur. Maka, jadi tidak mengejutkan jika ASEAN berpaling ke negara tetangganya untuk merevitalisasi kinerja perdagangan.²⁵ Dan berharap bahwa pengaturan perdagangan bebas akan memberikan dampak positif terhadap daya saing global ASEAN dalam jangka panjang.²⁶

²³ Hasil dari studi ini dilakukan oleh S. Coulibaly, *On the Assessment of Trade Creation and Trade Diversion Effects of Developing RTAs*, Unpublished Working Paper, 15 November 2004, hal, 2.

²⁴ *Op.cit*, R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, hal, 16-17.

²⁵ *Op.cit*, AFTA Council, 2004 dan S.F. Naya, *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal, 13-14.

²⁶ *Op.cit*, R.J.R. Elliot, dan K. Ikemoto, hal, 17.

4.3 Dari AFTA Menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN

Asia tidak berbeda dengan kawasan lain di dunia. Peningkatan regionalisme di Asia harus dilihat dari perspektif dengan kecenderungan mengarah ke arah inisiatif kolaborasi regional dalam skala dunia. Lambatnya proses liberalisasi dalam kerangka-WTO dan gagasan bahwa perjanjian integrasi regional adalah upaya untuk mewujudkan perdagangan bebas global,²⁷ telah menyebabkan terhadap suatu proliferasi dalam jumlah perjanjian FTA regional. Banyak FTA regional terwujud seperti apa telah yang ditetapkan oleh WTO dan oleh karena itu dilambangkan sebagai perjanjian WTO-plus.²⁸ Perlu dicatat bahwa gerakan menuju regionalisme telah berjalan di Eropa dan Amerika, tapi untuk Asia baru di mulai baru-baru ini.²⁹ Bahkan sebelum AFTA secara resmi dilaksanakan pada tahun 2003, negara anggota ASEAN baru mulai berbicara lebih lanjut tentang inisiatif integrasi ekonomi.

Krisis keuangan Asia tahun 1997-1998 sering dianggap sebagai penyebab langsung bagi peningkatan regionalisme di Asia. Krisis yang terjadi menunjukkan bahwa ekonomi Asia Timur terkait erat dan secara *de facto* integrasi di kawasan itu sudah mulai jauh lebih awal: sejak paruh kedua tahun 1980-an, jaringan produksi telah muncul di kawasan Asia Timur, dengan perusahaan multinasional menyebarkan produksi mereka kepada negara yang berbeda di kawasan ini. Perusahaan multinasional dari Jepang, dan kemudian juga dari negara-negara industri baru (NIC), memindahkan beberapa kegiatan produksi mereka ke Asia Tenggara untuk mengambil keuntungan dari penawaran tenaga kerja murah.³⁰

Terlepas dari kesadaran bahwa ekonomi mereka sangat saling ketergantungan, para pemimpin Asia Timur juga berpikiran bahwa tidak lagi terdapat dukungan dari lembaga-lembaga internasional (khususnya IMF) dan mitra dagang utama (Amerika

²⁷ J. Bhagwati, *The World Trading System at Risk*, Harvester Wheatsheaf, Hertfordshire, 1991, hal. 77.

²⁸ G.P. Sampson, and S. Woolcock, (Eds.), *Regionalism, multilateralism, and economic integration: the recent experience*, United Nations University Press, Tokyo, 2003.

²⁹ S.F. Naya, *Japan in Emerging East Asian Regionalism*, East Asian Economic Perspectives, Vol. 15, No. 2, August 2004, hal 4-5.

³⁰ S.Y. Chia, *Economic Co-operation and Integration in East Asia*, Asia-Pacific Review, Vol. 11, No. 1, May 2004, hal, 2 dan *Op.cit*, G.O. Pasadilla, hal, 5

Serikat khususnya) pada kurun waktu krisis keuangan yang terjadi di kawasan selama tahun 1997-1998. Akibatnya, para pemimpin Asia Timur mulai mencari cara untuk mewujudkan perjanjian kerjasama formal dan integrasi ekonomi yang lebih dalam di kawasan di akhir tahun 1990-an.³¹

Meskipun krisis keuangan telah menjadi penyebab langsung, ada hal yang juga harus diperhatikan dalam melihat perkembangan dan memahami kemunculan regionalisme di Asia Timur. Akhir Perang Dingin sangat penting dalam proses pemulihan hubungan dengan negara-negara bekas komunis di kawasan, yang sekarang semuanya menjadi anggota ASEAN. Hal ini menjelaskan kenapa selama beberapa tahun terakhir, China menjadi lebih dekat dengan ASEAN. Baik China dan ASEAN memiliki alasan yang baik untuk pertumbuhan kemitraan mereka.³²

Semua kekuatan ini bersama-sama membuat momentum baik untuk memperdalam dan memperluas integrasi ekonomi di Asia Timur. Pada bulan Desember 1997, para pemimpin ASEAN mengadopsi Visi ASEAN 2020, yang dapat dianggap sebagai *road map* jangka panjang untuk ASEAN. Rencana mewujudkan pembentukan Masyarakat ASEAN pada tahun 2020, terdiri dari tiga pilar yang berbeda: *Komunitas Ekonomi ASEAN* (AEC), *Komunitas Keamanan ASEAN* (ASC) dan *Komunitas Sosial-budaya ASEAN* (ASCC). Dalam Bali Concord II, yang dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2003 selama KTT ASEAN ke-sembilan, para pemimpin ASEAN secara resmi menyatakan keinginan mereka untuk mewujudkan *ASEAN Economic Community* (AEC). AEC dimaksudkan untuk menjadi pasar tunggal dan basis produksi, dengan pergerakan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal lebih bebas. The AEC juga dapat membantu perkembangan ekonomi yang merata di kawasan dan mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2020.³³

³¹ Op.cit, S.F Naya, hal. 7 dan H. Soesastro, *An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How do they fit together?*, Australia-Japan Research Centre at the Asia Pacific School of Economics and Government, Pacific Economic Paper, No. 338, 2003, hal, 3.

³² *Op, cit*, S.Y. Chia, hal, 2-3.

³³ ASEAN Secretariat, *ASEAN Vision 2020*, ASEAN Secretariat, Jakarta, 15 December 1997. (www.aseansec.org/2357.htm)

Dengan membuat AEC, ASEAN bermaksud untuk menanggapi blok perdagangan regional lainnya, seperti Uni Eropa dan NAFTA. Perluasan dari Uni Eropa misalnya, terdapat ketakutan dengan akan adanya pengalihan FDI, yaitu meningkatnya pangsa investasi langsung luar negeri Eropa yang mengalir ke negara-negara anggota baru daripada ke kawasan ASEAN. Bahkan yang lebih menantang adalah persaingan dari produsen biaya rendah lain di Asia, seperti China dan India. Raksasa ekonomi baru ini tidak hanya memiliki pasokan tenaga kerja murah yang berlimpah, tetapi juga memiliki konsumen pasar domestik yang sangat besar. Dengan membentuk komunitas ekonomi, para pemimpin ASEAN berharap untuk dapat mengintegrasikan pasar nasional dari negara-negara anggota. Proses integrasi harus sepenuhnya memanfaatkan keberagaman di daerah untuk lebih terspesialisasi, untuk dapat lebih efisien dan mewujudkan skala ekonomi yang diperlukan. Diharapkan bahwa setiap anggota ASEAN akan dapat sepenuhnya memanfaatkan keunggulan komparatif, sehingga kawasan lebih berdaya saing secara keseluruhan.³⁴

The original Hanoi Plan of Action, dibuat di tahun 1998 untuk menjadi pedoman sebagai tujuan akhir dari AEC (baru-baru ini telah diganti dengan *Vientiane Plan of Action*, lanjutan rencana enam tahun yang berfokus untuk mempersempit kesenjangan pembangunan di ASEAN dan sebagai langkah lebih lanjut memperdalam integrasi ekonomi regional. Salah satu unsur rencananya adalah pembentukan Dana Pembangunan ASEAN, yang akan dapat mendorong pembangunan negara-negara ASEAN-CLMV.³⁵

Integrasi ekonomi yang lebih mendalam akan dilakukan dengan cara percepatan integrasi 11 sektor prioritas sebagai berikut: (i) produk berbasis agro, (ii) perjalanan udara, (iii) otomotif, (iv) e-ASEAN, (v) elektronik, (vi) perikanan, (vii) kesehatan,

³⁴ R.A. Reyes, *The ASEAN Model of Economic Integration*, The Jakarta Post, 19 July 2004 dan D. Hew, *Towards an ASEAN Economic Community by 2020: Vision or Reality?*, Institute of South East Asian Studies (ISEAS) Viewpoints, 16 June 2003.

³⁵ ASEAN Secretariat, Chairman's Statement of the 10th ASEAN Summit, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16631.htm>)

(viii) produk berbasis karet, (ix) tekstil dan pakaian jadi, (x) pariwisata, dan (xi) produk berbasis kayu.³⁶

Untuk masing-masing 11 sektor prioritas, spesifik *road map* (Protokol Integrasi Sektoral ASEAN) telah dikembangkan bersama dengan sektor swasta. *Road map* ini menunjukkan jangka waktu proses liberalisasi dan jadwal spesifik yang harus dilaksanakan sampai tahun 2010 dalam rangka memfasilitasi percepatan integrasi 11 sektor tersebut di ASEAN. Tarif Impor pada produk di bawah sektor prioritas harus benar-benar dihapuskan pada tahun 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk ASEAN-CLMV. Perlu dicatat bahwa target pelaksanaan lebih cepat 3 tahun yang diramalkan di bawah perjanjian AFTA. Mirip dengan proses liberalisasi perdagangan di bawah AFTA, skema *fast track* telah dikembangkan untuk mempercepat integrasi menuju AEC, termasuk sekitar 40% dari total tarif baris di ASEAN. Keputusan untuk mempercepat pelaksanaan integrasi ekonomi di sektor-sektor tertentu dianggap berani, karena 11 sektor prioritas bersama merupakan lebih dari 50% dari perdagangan intra-ASEAN pada tahun 2003.³⁷

Dengan penurunan tarif yang dilakukan secara bertahap dan berbeda bertahap diantara ASEAN-6 dan ASEAN-CLMV (negara-negara terakhir ini selalu diizinkan untuk mengajukan jadwal waktu yang kurang ketat), dapat dijelaskan bahwa masalah fleksibilitas merupakan properti yang berbeda dalam proses integrasi ekonomi ASEAN. Masalah fleksibilitas baru-baru ini telah diatur dalam pendekatan "ASEAN minus X", yang berarti bahwa semua anggota ASEAN harus setuju pada target spesifik yang harus dicapai, akan tetapi anggota individu dapat memutuskan untuk bergabung kemudian, atau pada saat yang sama.³⁸

Tujuan ASEAN ingin mencapai AEC, tidak cukup dengan hanya meliberalisasi perdagangan barang dan jasa. Tantangan terbesar sebelum ASEAN memenuhi tujuan lain adalah pergerakan bebas investasi dan tenaga kerja terampil, dan aliran modal

³⁶ ASEAN Secretariat, *ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors*, Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16659.htm>)

³⁷ ASEAN Secretariat, Media Release "ASEAN Accelerates Integration of Priority Sectors", Vientiane, 29 November 2004. (<http://www.aseansec.org/16620.htm>)

³⁸ *Ibid*, R. A. Reyes, 2004 dan D. Hew, 2003.

lebih bebas. Investor asing yang ingin membangun sebuah bisnis yang sukses dan akibatnya ingin repatriasi keuntungan mereka, masih banyak dirugikan oleh hukum nasional di negara-negara anggota ASEAN yang lebih mendukung investor domestik. Harus diperhatikan bahwa negara-negara lain seperti China berkeinginan untuk menerima para investor asing. Oleh karena itu perubahan mendasar dalam pola pikir masyarakat dalam kawasan ASEAN sangat dibutuhkan, dimana investasi asing akan menguntungkan konsumen ASEAN yang dalam jangka panjang. Begitu juga dengan pergerakan bebas tenaga kerja terampil, para pemimpin ASEAN harus bisa menjabarkan dengan jelas definisi tentang tenaga kerja terampil untuk masing-masing 11 sektor prioritas. Jika hanya menggunakan kriteria umum, batas-batas nasional untuk tenaga kerja terampil akan hilang dalam ASEAN.³⁹

Meskipun terdengar sama, perbedaan struktural antara Masyarakat Ekonomi ASEAN yang diusulkan (AEC) dengan Masyarakat Ekonomi Eropa, yang berkembang menjadi Uni Eropa (UE), tidak boleh diabaikan. Sebagai individu negara-negara ASEAN menolak untuk menyerahkan kebijakan ekonomi nasional vis-a-vis non-anggota, *set up* AEC tidak akan termasuk tarif eksternal umum. Hal ini menjadi tidak terlalu mengherankan, karena disadari terdapat perbedaan besar antara negara anggota di tingkat tarif rata-rata eksternal.⁴⁰ Singapura misalnya, pada dasarnya adalah pelabuhan bebas dan tidak melakukan pungutan tarif impor. Untuk sampai pada suatu tarif eksternal umum, Singapura harus melakukan pemungutan tariff atau sembilan anggota negara ASEAN lainnya harus menghapuskan tarif yang mereka terapkan.⁴¹ Selain itu, konvergensi paksa penerapan tarif eksternal dalam jangka pendek tidak akan bijaksana sebagai terdapat kesenjangan pembangunan yang masih terlalu besar antara ASEAN-6 dan ASEAN-CLMV. Dalam jangka panjang konvergensi tampaknya diinginkan, tetapi terhambat oleh kurang seriusnya mekanisme kelembagaan dan struktural supranasional.⁴²

³⁹ *Ibid*, R. A Reyes, 2004.

⁴⁰ *Op.cit*, Economist, 2004.

⁴¹ *Op.cit*, R. A Reyes, 2004.

⁴² L. Cuyvers, *Contrasting the European Union and ASEAN Integration and Solidarity*, Paper presented at the Fourth EU-ASEAN Think Tank Dialogue "EU and ASEAN – Integration and Solidarity", Brussels, 25-26 November 2002.

Semua ini berarti bahwa ASEAN tidak mengikuti contoh Uni Eropa dan agak berusaha untuk mendirikan sebuah pasar tunggal tanpa harus menginstall sebuah kesatuan pabean atau menciptakan beberapa otoritas supranasional. Ini sebenarnya tidak mengherankan sebagaimana anggota ASEAN selalu menolak untuk mendelegasikan kekuasaan kepada suatu badan supranasional. Dalam hal ini menarik untuk dicatat bahwa ASEAN didirikan oleh suatu pernyataan dan bukan dengan perjanjian, yang berarti bahwa ASEAN benar-benar tidak memiliki kepribadian hukum (legal personality). Uni Eropa di sisi lain, tidak memiliki kepribadian hukum dan membuang Komisi yang mendominasi untuk menerapkan dan menegakkan keputusan.⁴³ Sekretariat ASEAN pada gilirannya, baru didirikan sepuluh tahun setelah pendiri ASEAN dan telah berada di bawah tekanan sejak itu. Akibatnya, keraguan tetap muncul apakah Sekretariat ASEAN akan mampu merampingkan proses integrasi menuju AEC.⁴⁴ Dan yang harus dilihat adalah apakah dalam prakteknya pemerintah nasional akan menegakkan langkah-langkah yang sesuai dengan *road map* untuk 11 sektor prioritas, diberi wewenang terbatas oleh Sekretariat ASEAN.⁴⁵

4.4 Evolusi Dari Integrasi Ekonomi ASEAN Dalam Konteks Regional

ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara anggota asli (ASEAN-5), yaitu, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 8 Januari 1984, Vietnam pada tanggal 28 Juli 1995, Laos dan Myanmar pada tanggal 23 tahun 1997, dan Kamboja pada tanggal 30 Juli April 1999. Dengan tujuan, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi ASEAN, adalah: (i) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan budaya di kawasan, dan (ii) untuk mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional melalui rasa hormat mematuhi keadilan dan supremasi hukum dalam hubungan antara negara-negara di kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Op.cit.*, Economist, 2004 dan Naya, 2004, hal, 11-12

⁴⁵ *Op.cit.*, R. A. Reyes, 2004.

4.4.1 Komunitas Ekonomi ASEAN: Tujuan Akhir Di Tahun 2015

Pada bulan November 2002, para Kepala Pemerintahan ASEAN merekomendasikan pembentukan ASEAN Economic Community (AEC) pada tahun 2020; yang kemudian dipercepat menjadi 2015. Proposal ini didukung oleh berbagai pertimbangan, termasuk: (i) keinginan untuk menciptakan agenda pasca AFTA, (ii) kebutuhan untuk memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ini dalam upaya peningkatan kawasan perdagangan bebas (FTA), (iii) kemungkinan bahwa FTA bilateral, yang anggota bebas untuk terlibat, akan membahayakan integrasi ASEAN, dan (iv) pasca-1997, pelajaran krisis keuangan Asia yang mengakui pentingnya kerjasama baik dalam sektor riil dan keuangan, dan arus bebas tenaga kerja terampil.⁴⁶

Tahun berikutnya, pada tahun 2003, ASEAN memutuskan untuk mengejar integrasi yang lebih komprehensif terhadap pembentukan Komunitas ASEAN pada tahun 2015, dengan didirikan tiga pilar komunitas politik dan keamanan, integrasi ekonomi, dan sosial-budaya kerjasama, untuk membentuk Komunitas Keamanan ASEAN (ASC), Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial-Budaya ASEAN (ASCC). ASC bertujuan untuk memastikan bahwa negara-negara di kawasan itu hidup damai satu sama lain dan dengan dunia pada umumnya, demokratis dan harmonis lingkungan saja. AEC merupakan realisasi dari tujuan akhir integrasi ekonomi untuk menciptakan stabilitas, kemakmuran dan ekonomi yang berdaya saing tinggi di kawasan ASEAN dengan berupa aliran bebas barang dan jasa, investasi, aliran modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi-sosial pada tahun 2015. ASCC dibayangkan untuk menciptakan kawasan bersama yang berikat dalam kemitraan sebagai komunitas masyarakat yang peduli terhadap masalah sosial dan budaya. *The Vientiane Action Program* (November 2004) menggambarkan bagaimana ketiga pilar terjalin erat:

⁴⁶ Michael. Plummer, "The ASEAN Economic Community and the European Experience", ADB Working Paper Series on Regional Economic Integration No.1, Asian Development Bank, July 2006.

"Karena pertumbuhan ekonomi dapat terancam oleh ketidakadilan sosial yang pada gilirannya merusak stabilitas politik, aksi program sosial-budaya ASEAN terkait erat dengan pilar ekonomi dan keamanan dalam Komunitas ASEAN. Pembentukan ASCC berasal dari premis bahwa integrasi ekonomi dan keamanan saja tidak akan cukup untuk mewujudkan visi dari sebuah Komunitas ASEAN."

Dimensi keempat bisa ditambahkan ke tiga pilar menuju pencapaian tujuan mewujudkan Komunitas ASEAN pada tahun 2015. Meskipun diakui bahwa integrasi ekonomi regional dapat meningkatkan konvergensi pendapatan di negara-negara di kawasan, akan tetapi ASEAN prihatin tentang risiko mengingat potensi kesenjangan yang ada dalam dimensi pendapatan dan pembangunan manusia di antara negara-negara anggotanya. Untuk mempersempit kesenjangan pembangunan (NDG), diperkenalkan pada bulan Juli 2001, ASEAN mengeluarkan Deklarasi Hanoi untuk Mempersempit Gap Pembangunan menuju Integrasi ASEAN yang lebih mendalam, dan kemudian ditegaskan kembali dalam Bali Concord II pada tahun 2003.

AEC akan membentuk ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, mengubah keragaman yang mencirikan daerah menjadi kesempatan bagi komplementasi bisnis dan membuat ASEAN lebih dinamis dan segmen kuat dari rantai pasokan global. ASEAN telah sepakat pada hal berikut: (i) mekanisme lembaga baru dan langkah-langkah untuk memperkuat pelaksanaan prakarsa ekonomi yang ada seperti AFTA, ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan AIA; (ii) mempercepat integrasi regional pada tahun 2010 dalam 11 sektor prioritas, yaitu, perjalanan udara, produk berbasis agro, otomotif, e-commerce, elektronik, perikanan, kesehatan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, pariwisata, dan produk berbasis kayu; (iii) memfasilitasi pergerakan bisnis masyarakat, tenaga kerja terampil dan berbakat, dan (iv) memperkuat mekanisme kelembagaan ASEAN, termasuk perbaikan Mekanisme Penyelesaian Sengketa ASEAN untuk menjamin dan mengikat secara hukum-resolusi yang cepat dari setiap sengketa ekonomi.

4.4.2 Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN

Cetak biru Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC), yang secara resmi disepakati dalam KTT ASEAN pada bulan November 2007, adalah perkembangan yang sangat signifikan dalam upaya ASEAN, berdasarkan realisasi substansial ASEAN Free Trade Area (AFTA), terhadap AEC. Cetak Biru AEC adalah titik awal bagi ASEAN. Dengan menerapkan Cetak Biru, ASEAN telah bergerak dari proses integrasi menuju pelaksanaan integrasi dengan terdapat batas waktu dan tujuan akhir yang didefinisikan secara jelas. Cetak Biru AEC juga merupakan dokumen yang mengikat komitmen seluruh anggota.⁴⁷

Terdapat empat karakteristik utama dalam Cetak Biru AEC, yaitu: (a) pasar tunggal dan basis produksi, (b) kawasan ekonomi yang sangat kompetitif; (c) kawasan pengembangan ekonomi yang seimbang; dan (d) kawasan yang terintegrasi ke dalam ekonomi global. Ciri keempat menunjukkan “sifat terbuka” ASEAN yang ingin mengejar integrasi ekonomi regional (regionalisme terbuka). Dari sudut pandang Geografi Ekonomi Baru dan teori perdagangan fragmentasi, Cetak Biru AEC merupakan sebuah paket kebijakan, dirancang untuk mengurangi link layanan dan set-up biaya jaringan, untuk mengejar integrasi ekonomi yang lebih mendalam dan mempersempit kesenjangan pembangunan di kawasan Asia Timur.

Cetak Biru ini mengidentifikasi “17 unsur inti” dari AEC dan menggambarkan 176 tindakan prioritas yang harus dilakukan dalam jadwal strategis pelaksanaan empat periode (2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, dan 2014-2015). Perlu dicatat bahwa beberapa gol dalam Cetak Biru tetap samar-samar ditetapkan dan "tonggak" masih hilang. Dengan demikian, implementasi yang efektif sangat penting untuk mewujudkan AEC.⁴⁸

⁴⁷ Op.cit, Hadi Soesastro, *Implementing the ASEAN Economic Community Blueprint*, hal. 33.

⁴⁸ Lihat, *Deepening Economic Integration: The Asean Economic Community And Beyond*, hal. 28-29.

Komunitas Ekonomi ASEAN merupakan salah satu dari pilar-pilar impian Masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Artinya, sebelum tahun 2015, pergerakan barang, jasa, investasi, dan buruh terampil di ASEAN akan dibuka dan diliberalisasi sepenuhnya, sementara aliran modal akan dikurangi hambatannya. Masih ada kekeluasaan, pengecualian dan hambatan-hambatan (khususnya dalam aliran uang dan modal) dalam liberalisasi ini, dan para anggota yang belum siap untuk meliberalisasi sektor jasa mereka dapat memilih menunda pembukaan sektor tersebut (Formula ASEAN minus X). Namun, tujuan strategis dan komitmennya adalah menyingkirkan semua hambatan dan pengecualian ini, serta seluruh Anggota harus memiliki komitmen yang sama.

Sebuah pasar tunggal dan basis produksi pada dasarnya adalah sebuah kawasan yang secara keseluruhan dilihat oleh negara-negara anggota ASEAN, bukannya sekedar pasar dan sumber daya yang berada dalam batas-batas nasional dan hanya melibatkan para pelaku ekonomi di tingkat nasional. Hal ini berarti sebuah negara anggota akan memperlakukan barang dan jasa yang berasal dari mana saja di ASEAN secara setara sebagaimana perlakuan mereka atas barang (produk) nasional mereka. Hal ini akan memberi keistimewaan dan akses yang sama kepada investor-investor ASEAN seperti halnya investor nasional mereka, buruh terampil dan para profesional akan bebas melakukan pekerjaan mereka di mana saja di ASEAN.

Untuk memfasilitasi integrasi ke pasar tunggal dan basis produksi dengan lebih cepat, Komunitas Ekonomi ASEAN memfokuskan dua wilayah khusus, yaitu: sektor-sektor integrasi prioritas, pangan, pertanian dan kehutanan. Ada 12 sektor integrasi prioritas, yaitu: produk-produk berbasis pertanian, otomotif, elektronik, perikanan, produk berbasis karet, tekstil dan pakaian, produk berbasis kayu, perjalanan udara, e-ASEAN, kesehatan, pariwisata, dan logistik. Inilah sektor-sektor yang paling diminati anggota ASEAN, dan menjadi tempat

mereka berkompetisi satu sama lain. Gagasannya adalah jika sektor-sektor ini diliberalisasi penuh, sektor-sektor ini akan berintegrasi (menyatu), anggota ASEAN akan mengembangkan keunggulan wilayah di sektor-sektor ini dengan menarik investasi dan perdagangan di dalam ASEAN (contohnya dengan saling melakukan outsourcing), serta membantu mengembangkan produk-produk “buatan ASEAN”.

Fokus khusus pada pangan, pertanian dan kehutanan berkaitan dengan bagaimana mengembangkan sebuah sektor yang dipertimbangkan paling sensitif oleh anggota ASEAN. Karena hal ini akan diintegrasikan dalam sebuah pasar tunggal, Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN melihat bagaimana liberalisasi perdagangan di wilayah ini akan dilaksanakan, dan bagaimana standard-standard umum dikembangkan. Selain itu, kerja sama dan alih teknologi dengan bantuan organisasi-organisasi internasional/regional (seperti Food and Agricultural Organization/FAO) dan sektor swasta juga menjadi perhatian ASEAN. Hal ini juga mengundang produsen pertanian melalui promosi dan berjaringan kerja sama pertanian.

Selain pasar tunggal, Komunitas Ekonomi ASEAN juga melihat sebuah kawasan ekonomi dengan semangat kompetisi yang tinggi, pembangunan ekonomi yang setara, dan integrasi penuh dalam ekonomi global. Pembangunan kawasan kompetitif ini akan dilakukan dengan membuat beberapa kebijakan bersama dan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan. Untuk itu, ASEAN akan menyelaraskan kebijakan-kebijakan kompetisi, perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pajak dan e-commerce. ASEAN akan mendirikan sebuah jaringan transportasi yang terintegrasi (udara, laut, dan darat); mengembangkan sistem ICT yang dapat dihubungkan dan digunakan oleh semua negara di kawasan ini; mencari proyek-proyek untuk jaringan listrik dan pipa gas yang terintegrasi; mempromosikan sektor penambangan; dan menarik sektor swasta untuk mendanai upaya-upaya tersebut. Soal kesetaraan akan tercapai terutama melalui pengembangan perusahaan kecil dan medium (small and medium enterprises); dan dengan

mengatasi kesenjangan pembangunan antara negara-negara ASEAN yang kaya/besar dengan yang miskin/kecil, dan antara ASEAN dengan kawasan lainnya melalui Initiative for ASEAN Integration (IAI). IAI adalah sebuah proyek yang mengupayakan bantuan teknis dan pengembangan kapasitas yang diperlukan oleh negara-negara ASEAN agar mampu berpartisipasi penuh dalam integrasi kawasan. Akhirnya, Komunitas Ekonomi ASEAN mengusahakan keselarasan kesepakatan ASEAN dengan peraturan dan undang-undang multilateral, dan membuat kebijakan yang akan lebih jauh mengintegrasikan kawasan tersebut dengan dunia.

Tabel 4.2
Unsur Penting Cetak Biru Komunitas Ekonomi ASEAN⁴⁹

Ciri-ciri	Unsur Penting
A. Pasar Tunggal dan Basis Produksi	
<i>Aliran bebas barang-barang</i>	<p><u>Penghapusan Tarif</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-6 dan sebelum tahun 2015 untuk CLMV (dengan kelonggaran bagi produk-produk sensitif sebelum tahun 2018) - Sektor-sektor Integrasi Prioritas: sebelum 2007 untuk ASEAN-6 dan tahun 2012 untuk CLMV - Tarif Daftar Sensitif (SL) sebesar 0-5% sebelum 1 Januari 2010 untuk ASEAN-6, 1 Januari 2013 untuk Viet Nam, 1 Januari 2015 untuk Republik Demokratik Rakyat Laos dan Myanmar, serta sebelum 1

⁴⁹ <http://www.asianfarmers.org/wp-content/uploads/2008/07/indonesia-bahasa.pdf>, download tanggal 20 Mei 2010, jam 02.43.

	<p>Januari 2017 untuk Kamboja</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fase produk-produk dalam Daftar Pengecualian Umum (<i>General Exceptions List</i>) <p><u>Penghapusan Hambatan-hambatan Non Tarif</u></p> <p>Sebelum tahun 2010 untuk ASEAN-5 (ASEAN-6 minus Filipina), tahun 2012 untuk Filipina, dan tahun 2015 dengan kelonggaran sampai tahun 2018 untuk CLMV</p> <p>Menghapus transaksi-transaksi perdagangan melalui: Fasilitasi perdagangan, integrasi bea cukai, Jendela Tunggal ASEAN</p>
<i>Aliran bebas jasa-jasa</i>	<ul style="list-style-type: none"> o Menyingkirkan semua hambatan perdagangan dalam jasa sebelum tahun 2015 o Meliberalisasi jasa keuangan secara progresif sebelum tahun 2020 o Liberalisasi melalui rumusan/formula ASEAN Minus X o Pengaturan-pengaturan Pengakuan yang Setara (<i>Mutual recognition arrangements/MRAs</i>)
<i>Aliran bebas investasi</i>	<p>Kawasan Investasi ASEAN (<i>ASEAN Investment Area/AIA</i>) diwujudkan sebelum tahun 2015 (membuka semua industri dan perlakuan nasional yang diberikan kepada semua investor, dengan beberapa pengecualian)</p> <p>Pembentukan Kesepakatan Investasi Komprehensif ASEAN (<i>ASEAN Comprehensive Investment Agreement/ACIA</i>)</p>
<i>Aliran modal yang lebih bebas</i>	<p>Memperkuat Pembangunan dan Integrasi Pasar Modal ASEAN, dan mempromosikan pergerakan modal yang lebih besar.</p>
	<p>Fasilitasi pergerakan dan pengkayaan</p>

<i>Aliran bebas buruh terampil</i>	buruh profesional dan terampil dalam perdagangan lintas batas dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan investasi.
<i>Sektor-sektor Integrasi Prioritas</i>	Integrasi yang menyeluruh pada 12 sektor prioritas untuk mempercepat keseluruhan integrasi ekonomi.
<i>Pangan, Pertanian, dan Kehutanan</i>	<p>Perdagangan di dalam dan di luar ASEAN dan persaingan jangka panjang produk/komoditas pangan, pertanian, dan kehutanan ASEAN melalui perdagangan pertanian dan kehutanan yang diliberalisasi, pembangunan dan penerapan sistem dan aturan dalam perikanan, penggunaan pestisida, sertifikasi hutan dan keamanan hayati, penerapan standard-standard yang ditingkatkan untuk keselamatan dan kualitas.</p> <p>Kerja sama dengan organisasi-organisasi internasional, regional, dan sektor swasta.</p> <p>Mempromosikan kerja sama pertanian ASEAN.</p>
B. Kawasan Ekonomi Kompetitif	
	<p>Pembangunan dan penerapan kebijakan kompetisi/persaingan, perlindungan konsumen, dan hak kekayaan intelektual.</p> <p><u>Pembangunan Infrastruktur</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; Pasar Aviiasi/Penerbangan Tunggal ASEAN; Pasar Perkapalan Tunggal ASEAN - Interkonektifitas dan interoperasional teknis di antara sistem-sistem ICT, perjanjian dalam e-commerce - Kerja sama energi dalam bio-fuel (bahan bakar hayati), dan interkoneksi jaringan listrik serta pipa gas (Jaringan Listrik Trans-ASEAN atau ASEAN Power Grid/APG)

	<ul style="list-style-type: none"> - Perdagangan dan investasi geologi dan sektor mineral (tambang) - Menarik keterlibatan yang lebih besar sektor swasta <p>Pengembangan kebijakan-kebijakan untuk menghapus pajak ganda, dan meningkatkan e-commerce</p>
C. Pembangunan Ekonomi yang Setara	
	<p>Cetak Biru kebijakan ASEAN untuk Pengembangan Ekonomi Kecil Menengah 2004-2014</p> <p>Inisiatif untuk Integrasi ASEAN (IAI) – yaitu kendaraan untuk mempersempit jurang pembangunan di dalam ASEAN dan antara ASEAN dan dengan dunia</p>
D. Integrasi ke dalam Ekonomi Global	
	<p>Pendekatan yang menyatu untuk tercapainya Hubungan Ekonomi Eksternal (diberlakukannya aturan dan regulasi eksternal dalam pembangunan kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN)</p> <p>Meningkatkan partisipasi dalam jaringan pasokan global</p>
IMPLEMENTASI	
Mekanisme Implementasi/Penerapan	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dalam pemberitahuan • Ratifikasi perangkat hukum dalam 6 bulan • Konsensus • Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa • Rumusan ASEAN-X • Kelonggaran/fleksibilitas
Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> • Rencana komunikasi • Rancangan kawasan untuk didiskusikan terbuka • Mekanisme tingkat nasional untuk pelaporan • Website Masyarakat Ekonomi ASEAN
	<ul style="list-style-type: none"> • Dana Pembangunan ASEAN (ADF) • Studi-studi teknis

Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> • Menerjemahkan sasaran Masyarakat Ekonomi ASEAN ke dalam sasaran nasional • Partisipasi ADB, Bank Dunia/IFC, mitra dialog, sektor swasta • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan Sekretariat ASEAN • Memperkuat kemampuan penelitian dan perencanaan negara-negara anggota • Pengembangan kapasitas untuk anggota baru
Tinjauan	Tinjauan secara berkala Masyarakat Ekonomi ASEAN

- ❖ ASEAN-6 terdiri dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
- ❖ CLMV meliputi Kamboja, RDR Laos, Myanmar, dan Viet Nam.

4.5 Open Regionalism

Masih belum jelas bagaimana bentuk AEC yang akan diterapkan. Salah satu bentuk yang bisa digunakan adalah pengaturan "FTA-plus", yang meliputi beberapa unsur pasar umum, misalnya, aliran bebas modal, aliran bebas tenaga kerja terampil, nol tarif perdagangan intra-regional, tetapi tidak termasuk tarif eksternal umum. Bentuk lain adalah pengaturan "common market minus" yang bertujuan untuk menciptakan pasar yang terintegrasi secara penuh tetapi memiliki area di mana anggota ASEAN akan terintegrasi lebih dalam untuk tahap selanjutnya.

Yang jelas adalah kenyataan bahwa tidak seperti integrasi ekonomi Eropa yang tampak sebagai pendekatan *inward-looking* dalam regionalisme, integrasi ekonomi ASEAN telah terarah pada "open regionalism (regionalisme terbuka)" mengingat bahwa betapa pentingnya menjalin mitra ekonomi di luar kawasan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya proliferasi FTA baru-baru ini di kawasan, terutama dengan Cina, Jepang dan Republik Korea, yang secara kolektif disebut ASEAN +3.

Tabel 4.3
FTA ASEAN dengan China-India

Negara	Status	Realisasi
China	Perjanjian Perdagangan Barang, Perjanjian Mekanisme Penyelesaian Sengketa diselesaikan; negosiasi mengenai layanan dan investasi (akan dilaksanakan berlangsung)	2010-ASEAN 6 2015-CLMV
India	Negosiasi modalitas untuk pengurangan tarif dan penghapusan selesai; program panen awal (early harvest program) diharapkan akan dilaksanakan pada bulan April 2005	2011-Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore, dan Thailand

Sumber: ASEANONE, *FTAs with dialogue partners: Compatible with ASEAN integration?*, January 2005.

AEC adalah jelas sebuah inisiatif ambisius, dalam arti bahwa membayangkan ASEAN untuk mendirikan sebuah komunitas ekonomi dengan 10 negara heterogen dalam jangka waktu yang relatif singkat. Walaupun mungkin terdengar paradoks, untuk memaksimalkan manfaat dari pembentukan AEC, ASEAN tidak dianjurkan untuk membatasi diri ke AEC. Setidaknya ada dua arah yang harus diperhatikan ASEAN untuk mewujudkan AEC, cakupan geografis dan kedalaman integrasi ekonomi.⁵⁰

ASEAN juga dibayangi oleh China dan India dari segi produk domestik bruto dan jumlah penduduk. Ukuran sebenarnya tidak menjadi masalah, karena negara-negara ASEAN secara kolektif lebih kuat dan lebih tangguh daripada mereka secara individual, namun terdapat batasan dalam kekuatan ekonomi yang dimiliki ASEAN. Oleh sebab itu, ASEAN tidak bisa bersikap autarki atau eksklusif. ASEAN perlu menjangkau batas luar regionalnya. Untungnya, sebagai kelompok ekonomi yang berorientasi ekspor, ASEAN selalu menjadi entitas yang *outward-looking*. Memang,

⁵⁰ *Op.cit.*, Lihat, *Deepening Economic Integration: The Asean Economic Community And Beyond*, hal 37-38

hubungan eksternal ASEAN jauh lebih kuat dibanding hubungan internal, seperti yang dimanifestasikan dalam perdagangan dan jaringan investasi. Arus masuk FDI ekstra-regional ke ASEAN jauh lebih penting bagi negara-negara anggotanya dari daerah aliran FDI-intra.

ASEAN diharapkan menjadi puncak arsitektur regional yang lebih luas dengan AEC sebagai komunitas ekonomi regional, sebuah pasar tunggal tanpa batas, memastikan alokasi sumber daya yang efisien ASEAN dengan spesialisasi intra-ASEAN dan pembagian kerja. Untuk koordinasi kebijakan makroekonomi, moneter dan kerja sama keuangan yang efektif dan berarti, ASEAN perlu bekerjasama dengan China, Jepang dan Korea di bawah payung APT. APT akhirnya akan berevolusi untuk memasukkan Taiwan dan Utara Korea. Sedangkan India sudah menjadi anggota EAS dan sangat mungkin bahwa APEC juga dapat diperluas untuk mencakup India.

4.6 FTA ASEAN Dengan China-India

Efektifitas pelaksanaan AFTA yang melibatkan beberapa FTA-ASEAN juga sangat penting, karena di Asia Timur sejumlah FTA bilateral/plurilateral sudah dilaksanakan, atau dalam proses negosiasi, termasuk yang dilakukan oleh masing-masing negara-negara anggota ASEAN.

4.6.1 FTA ASEAN Dengan China (ACFTA)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak

ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.⁵¹

Dalam membentuk ACFTA, para Kepala Negara Anggota ASEAN dan China telah menandatangani *ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation* pada tanggal 6 Nopember 2001 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam.

Sebagai titik awal proses pembentukan ACFTA para Kepala Negara kedua pihak menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China* di Phnom Penh, Kamboja pada tanggal 4 Nopember 2002. Protokol perubahan Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 6 Oktober 2003, di Bali, Indonesia. Protokol perubahan kedua Framework Agreement ditandatangani pada tanggal 8 Desember 2006.⁵²

4.6.1.1 TUJUAN FTA ASEAN-CHINA

- Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara negara-negara anggota.
- Meliberalisasi secara progresif dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa serta menciptakan suatu sistem yang transparan dan untuk mempermudah investasi.
- Menggali bidang-bidang kerjasama yang baru dan mengembangkan kebijaksanaan yang tepat dalam rangka kerjasama ekonomi antara negara-negara anggota.
- Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dari para anggota ASEAN baru (Cambodia, Laos, Myanmar, dan Vietnam –CLMV) dan

⁵¹ Lihat, *ASEAN-China Free Trade Area*, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kerjasama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.

⁵² Ibid, hal. 2

menjembatani kesenjangan pembangunan ekonomi diantara negara-negara anggota.⁵³

4.6.1.2 PERSETUJUAN PERDAGANGAN BARANG

Dalam ACFTA disepakati akan dilaksanakan liberalisasi penuh pada tahun 2010 bagi ASEAN 6 dan China, serta tahun 2015 untuk serta Kamboja, Laos, Vietnam, dan Myanmar.

Penurunan Tarif dalam kerangka kerjasama ACFTA dilaksanakan dalam tiga tahap, yaitu:

1. Early Harvest Program (EHP)

- Produk-produk dalam EHP antara lain:

Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan (SK Menkeu No 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam kerangka EHP ACFTA).

Kesepakatan Bilateral (Produk Spesifik) antara lain kopi, minyak kelapa/CPO, Coklat, Barang dari karet, dan perabotan (SK Menkeu No 356/KMK.01/2004 tanggal 21 juli 2004 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Dalam Kerangka EHP Bilateral Indonesia-China FTA.

- Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006.

2. Normal Track

- Threshold :

40% at 0-5% in 2005

100% at 0% in 2010 (Tariff on some products, no more than 150 tariff lines will be eliminated by 2012)

3. Sensitive Track

- Sensitive List (SL) :

(a) Tahun 2012 = 20%

(b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.

(c) Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat

⁵³ Ibid, hal, 2.

Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik.

- Highly Sensitive List (HSL)
 - (a) Tahun 2015 = 50%
 - (b) Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.⁵⁴

4.6.1.3 PERSETUJUAN PERDAGANGAN JASA

Persetujuan Jasa ACFTA telah berlaku efektif sejak Juli 2007. Dengan adanya Persetujuan ini para penyedia jasa di kedua wilayah akan mendapatkan manfaat perluasan akses pasar jasa sekaligus national treatment untuk sektor dan subsektor yang dikomitmenkan oleh masing-masing Pihak ACFTA.

Paket Pertama Persetujuan Jasa ACFTA mencakup kurang lebih 60 subsektor tambahan dari komitmen para Pihak di GATS/WTO. Dari sudut pandang tingkat ambisi liberalisasi, Paket Pertama tersebut mencerminkan tingkat komitmen yang cukup tinggi dari seluruh 4 moda penyediaan jasa baik cross-border supply, consumption abroad, commercial presence, dan movement of natural persons.

Disamping memberikan manfaat dari meningkatnya arus perdagangan jasa antara kedua wilayah, Persetujuan Jasa diharapkan akan mendorong peningkatan investasi khususnya pada sektor-sektor yang telah dikomitmenkan oleh para Pihak seperti: (a) business services such as computer related services, real estate services, market research, management consulting; (b) construction and engineering related services; (c) tourism and travel related services; (d) transport services; educational services; (e) telecommunication services; (f) health-related and social services; (g) recreational, cultural and sporting services; (h) environmental services; dan (i) energy services.⁵⁵

⁵⁴ Ibid, hal. 3-4.

⁵⁵ Ibid, hal. 5

4.6.1.4 PERSETUJUAN INVESTASI

Melalui Persetujuan Investasi tersebut, pemerintah Negara-negara Anggota ASEAN dan China secara kolektif sepakat untuk mendorong peningkatan fasilitasi, transparansi dan rezim investasi yang kompetitif dengan menciptakan kondisi investasi yang positif, disertai berbagai upaya untuk mendorong promosi arus investasi dan kerjasama bidang investasi. Disamping itu kedua pihak juga secara bersama-sama akan memperbaiki aturan investasi menjadi lebih transparan dan kondusif demi peningkatan arus investasi. Selain itu hal terpenting lainnya adalah ASEAN dan China sepakat untuk saling memberikan perlindungan investasi.

Kegiatan sosialisasi ini akan memaparkan kebijakan, peraturan, ketentuan, dan prosedur investasi. Satu hal lagi yang sangat penting, kedua pihak sepakat mendirikan one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan.

Dari sudut pandang investor, Persetujuan Investasi ASEAN – China memberikan berbagai manfaat nyata seperti: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal China ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.⁵⁶

4.6.1.5 KERJASAMA EKONOMI

Didalam *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*, kedua pihak

⁵⁶ Ibid, hal. 6.

sepakat akan melakukan kerjasama yang lebih intensif di beberapa bidang seperti: Pertanian; Teknologi Informasi; Pengembangan SDM; Investasi; Pengembangan Sungai Mekong; Perbankan; Keuangan; Transportasi; Industri; Telekomunikasi; Pertambangan; Energi; Perikanan; Kehutanan; Produk-Produk Hutan dan sebagainya.

Pemerintah China telah mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah *China-ASEAN Investment Cooperation Fund* untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, teknologi komunikasi dan informasi dan bidang-bidang lainnya sekaligus menyediakan fasilitas kredit sebesar USD 15 juta untuk mendukung proses integrasi ASEAN dan kerjasama ekonomi dibawah ACFTA untuk lima tahun kedepan.⁵⁷

4.6.2 FTA ASEAN Dengan India (AIFTA)

India merupakan mitra dagang ketujuh terbesar bagi ASEAN. Dari sisi investasi, FDI dari India ke ASEAN pada tahun 2007 mencatat nilai USD 641 juta—tertinggi sejak tahun 2000.⁵⁸

Perdagangan ASEAN-India cenderung meningkat belakangan ini. Dari tahun 2005 s/d tahun 2007, perdagangan ASEAN-India meningkat sebesar 28% per tahun. Ekspor ASEAN ke India antara 2005-2007 meningkat sebesar 31%--peningkatan terbesar yang dialami ASEAN dengan mitra dagangnya.

Para Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN dan India telah menandatangani *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between ASEAN dan India* pada bulan Oktober 2003.

Setelah pernah dihentikan 2 kali, perundingan perdagangan barang telah dapat diselesaikan pada bulan Agustus 2008. Persetujuan Perdagangan Barang AIFTA ditandatangani pada Pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi

⁵⁷ Ibid, hal. 6.

⁵⁸ Lihat, *ASEAN-India Free Trade Area*, yang dikeluarkan oleh Direktorat Kerjasama Regional-Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional, Februari 2010.

ASEAN pada 13 Agustus 2009 di Bangkok. Sementara itu, perundingan perdagangan jasa dan investasi akan dimulai kembali pada bulan Oktober 2009 dan ditargetkan untuk dituntaskan pada akhir tahun 2010 sebagai sebuah Single Undertaking.

Tingkat liberalisasi perdagangan barang dalam AIFTA tidak setinggi liberalisasi perdagangan barang yang dicapai antara ASEAN dengan mitra FTA lainnya. Namun kedua pihak sepakat untuk meningkatkan komitmen liberalisasi melalui proses “review” setelah perjanjian diimplementasikan.⁵⁹

4.6.2.1 PERDAGANGAN BARANG

1. Modalitas Penurunan/Penghapusan Tarif

Modalitas yang disepakati bersama oleh ASEAN dan India adalah menjadwalkan penurunan dan penghapusan tarif terhadap 85% pos tarif atau 75% nilai impor yang tercakup dalam Normal Track (NT) dan 10% pos tarif dalam Sensitive Track (ST) dengan rincian sebagai berikut:

- NT-1 : mencakup penghapusan bea masuk atas 71% pos tarif atau 71,71% nilai impor pada 31 Des 2012 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2017 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2017 untuk CLMV.
- NT-2 : terdiri dari sejumlah 9% pos tarif, dimana tarif bea masuk dan produk-produknya akan dihapus pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.
- ST : terdiri dari 10% pos tarif yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu :
 - Penurunan bea masuk menjadi 5% pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.
 - Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2021 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2023 untuk ASEAN 6 dan India.
 - Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat tarif 5%. Selebihnya akan diturunkan menjadi 4.5% pada saat Entry

⁵⁹ Ibid, hal. 1.

into Force, dan akan menjadi 4% pada 31 Des 2015 for ASEAN 6 dan India.

- Spesial Products, terdiri dari:
 - Palm Oil, end rates 37.5% - CPO dan 45% - RPO dengan batas akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
 - Kopi, teh hitam dan lada, end rates 45%, 45%, dan 50% dengan batas akhir India sampai dengan 31 Des 2018.
 - Crude Petroleum (berlaku untuk Brunei) dengan penurunan bea masuk bertahap sampai menjadi 0% pada 1 Januari 2012.
- Highly Sensitive List (HSL), mencakup 3 kategori yang berbeda yaitu (i) penurunan bea masuk menjadi 50%, (ii) penurunan bea masuk 50%, serta (iii) penurunan bea masuk 25%, pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5, 31 Des 2021 untuk Philipina serta 31 Des 2023 untuk CLMV.
- Exclusion List (EL): terdiri dari 489 pos tariff dalam 6 digit dan mencakup 5% nilai impor perdagangan.⁶⁰

Tabel 4.4
Matriks Perbandingan Kesepakatan FTA ASEAN dengan China-India

China	India
Persetujuan Barang	
1. Early Harvest Program (EHP) <ul style="list-style-type: none"> • Produk-produk dalam EHP antara lain: Chapter 01 s.d 08 : Binatang hidup, ikan, dairy products, tumbuhan, sayuran, dan buah-buahan • Kesepakatan Bilateral Penurunan tarif dimulai 1 Januari 2004 secara bertahap dan akan menjadi 0% pada 1 Januari 2006. 2. Normal Track <ul style="list-style-type: none"> • Threshold : 40% at 0-5% in 2005 100% at 0% in 2010 (Setidaknya 150 tarif pada beberapa produk akan dihapuskan pada tahun 2012) 3. Sensitive Track <ul style="list-style-type: none"> • Sensitive List (SL) : 	1. Modalitas Penurunan / Penghapusan Tarif terhadap 85% pos tarif atau 75% nilai impor yang tercakup dalam Normal Track (NT) dan 10% pos tarif dalam Sensitive Track (ST) dengan rincian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> • NT-1 : mencakup penghapusan bea masuk atas 71% pos tarif atau 71,71% nilai impor pada 31 Des 2012 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2017 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2017 untuk CLMV. • NT-2 : terdiri dari sejumlah 9% pos tarif, dimana tarif bea masuk dan produk-produknya akan dihapus pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018

⁶⁰ Ibid, hal. 3-4

<p>a) Tahun 2012 = 20%</p> <p>b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.</p> <p>c) Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit: tas, dompet; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Highly Sensitive List (HSL) <ul style="list-style-type: none"> a) Tahun 2015 = 50% b) Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware. 	<p>untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ST : terdiri dari 10% pos tarif yang dibagi kedalam tiga kategori yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penurunan bea masuk menjadi 5% pada 31 Des 2015 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2018 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2020 untuk CLMV. 2. Penghapusan bea masuk (4% pos tarif dalam ST) pada 31 Des 2018 untuk ASEAN 5 dan India, 31 Des 2021 untuk Philipina dan India, serta 31 Des 2023 untuk ASEAN 6 dan India. 3. Standstill, yaitu 50 pos tarif pada tingkat tarif 5%. Selebihnya akan diturunkan menjadi 4.5% pada saat Entry into Force, dan akan menjadi 4% pada 31 Des 2015 for ASEAN 6 dan India.
Jasa	
<p>Berlaku efektif pada Juli 2007 pada 4 modal penyediaan jasa yaitu: pasokan lintas-perbatasan, konsumsi luar negeri, komersial, pergerakan laju individu.</p>	<p>Perdagangan ASEAN-India di layanan jasa saat ini masih dalam tahap negoisasi.</p>
Investasi	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan Investasi ASEAN-China dimana terdapat one stop centre untuk memberikan jasa konsultasi bagi sektor bisnis termasuk fasilitasi pengajuan perijinan. 2. Pemerintah China mengalokasikan dana sebesar USD 10 miliar dibawah <i>China-ASEAN Investment Cooperation Fund</i> untuk membiayai proyek-proyek kerjasama investasi utama seperti infrastruktur, energi dan sumberdaya, IPTEK. 	<p>Perdagangan ASEAN-India di perjanjian investasi saat ini masih dalam tahap negoisasi.</p>

Kesimpulan

Sebagai dampak dari perkembangan regionalism di kawasan mengakibatkan ASEAN harus menyelaraskan diri mereka dengan perkembangan yang terjadi diluar kawasan. Untuk itu ASEAN harus bersikap membuka diri untuk membangun kerjasama guna menghadapi persaingan dan berupaya untuk membuka pasar yang lebih luas serta untuk mendapatkan FDI guna mendukung upaya pembangunan di negara-negara ASEAN.

Sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh ASEAN, selain melakukan integrasi (ekonomi) yang lebih mendalam adalah dengan cara membuka hubungan kerjasama (FTA) dengan negara-negara lain diantaranya China-India, dua negara yang sedang mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat mengesankan. Langkah terbaik bagi ASEAN dalam menghadapi kebangkitan China-India sebagai kekuatan besar (ekonomi) yang mempunyai kepentingan strategis di kawasan adalah dengan mengembangkan regionalisme multilateral melalui berbagai forum seperti ARF, ASEAN Plus Three (APT), dan East ASEAN Summit. Langkah ini dimaksudkan untuk membentuk suatu regionalisme terbuka-*inklusif* (*open regionalism*) atas kerjasama fungsional.

BAB V

KESIMPULAN

Perkembangan ekonomi dunia bergerak cepat. Siapa cepat dia yang dapat. Negara yang cepat menyesuaikan diri dengan dinamika ekonomi, dialah yang akan memperoleh keuntungan besar dari ekonomi dunia. Sebaliknya, yang lambat menyesuaikan diri, akan tergulung.

Siapa yang saat ini dengan segera tanggap terhadap dinamika ekonomi dunia? Di kawasan Asia terdapat dua negara 'yang terbangun dari tidurnya', yakni China dan India. Dua negara dengan wilayah yang sangat luas dan memiliki jumlah penduduk di atas satu miliar jiwa itu, kini sedang menggeliat pertumbuhan ekonominya.

China sejak melakukan 'open door policy' pada 1978, telah membuka perdagangan dan investasi asing, perusahaan bebas bergerak, mekanisme pasar ala kapitalisme juga diperkenalkan. Hasilnya, industri dan ekonomi China melesat. Pertumbuhan ekonomi rata-rata bisa mencapai 9-10 persen. Saat ini China telah menjadi aktor baru di bidang ekonomi dan disegani di seluruh dunia

Sedangkan India, negara demokrasi terbesar di dunia ini terbilang terlambat dalam membuka diri terhadap pasar. Meski negara demokratis, tapi pada awalnya sektor ekonomi dan pasar dikendalikan negara sehingga tak ada persaingan, kebijakan substitusi impor juga membuat pasar terkendali menjadi tidak efisien. Kini, India sadar dan mulai membuka diri. Berakhirnya 'Perang Dingin' pada awal 1990, telah mengakselerasi proses globalisasi, dan ditambah dengan bangkitnya China, maka India pun merasa terpacu untuk bangkit. Reformasi di bidang ekonomi selanjutnya membuat perekonomian India tumbuh di atas 6 persen.

Dalam konteks regional di Asia, bagaimana sikap ASEAN dalam menghadapi kekuatan baru China dan India? Bagaimanapun juga kedua negara tersebut adalah pesaing ASEAN. Bahwa ASEAN membina hubungan dagang dan investasi dengan

mereka, itu sudah jamak. Tetapi dalam mengakses ekonomi global, dua negara tersebut adalah pesaing.

1. Secara internal ASEAN, kebangkitan ekonomi China-India dan persaingan yang lebih intensif dengan kekuatan ekstra regional yang lain, mendorong ASEAN untuk secara serius melakukan konsolidasi (*deepening*) ke dalam antara lain dengan membentuk *ASEAN Community* dan *ASEAN Charter*.

Pada 5 April 2007, dilakukan Pertemuan ke-11 Menteri Keuangan Se-ASEAN di Thailand. Hasilnya, 10 negara ASEAN sepakat mempercepat integrasi ekonomi dari 2020 menjadi 2015 karena ingin mengimbangi China dan India. Percepatan (integrasi) harus dilakukan agar bias terus kompetitif dengan China dan India. Dalam integrasi ini, penurunan tarif akan segera dilakukan, dan diharapkan mampu mendorong perdagangan yang makin intensif di antara negara anggota ASEAN. Jika tidak segera dilakukan, China akan makin merajai dengan produk-produknya yang murah dan semakin berkualitas.

“Tidak ada jalan lain bagi kita, ASEAN harus melakukan integrasi ekonomi. Pesaing kita sangat berat, yaitu China dan India,” kata Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Lim Hong Kiang, kepada wartawan *Indoesia* di Singapura akhir Maret 2007. Keunggulan komparatif, akan menjadi kunci keberhasilan ASEAN.

2. Pada tataran yang lebih luas, adanya *ASEAN Economic Community* atau komunitas ekonomi ASEAN akan menjadi tonggak keberhasilan bersama negara anggota. Tinggal bagaimana masing-masing negara bisa menyepakati dan menjadwalkan kapan bisa dilaksanakan dengan konsisten sebagaimana jadwal percepatan integrasi.

Beberapa hal yang diungkapkan Lim Hong Kiang dalam integrasi itu misalnya adanya aliran bebas barang, perdagangan bebas, pergerakan bebas aliran dana dan sumber daya manusia. Selain itu juga terbukanya sektor jasa bagi semua negara. Jika itu dilakukan, minimal sudah menjadi modal bagi ASEAN untuk bersaing dengan China dan India.

Menurut kajian *Singapore Institute of International Affair* (SIIA), dengan jumlah penduduk China dan India diatas 1 milyar jiwa, maka dalam 10-25 tahun mendatang mereka akan masih dominan di industri yang mengandalkan tenaga kerja yang murah, seperti dibidang pemanfaatan produk masal dan manufaktur. Ini secara langsung akan bersaing dengan ASEAN yang sebagian juga mengandalkan tenaga kerja murah. Tak terkecuali dalam menarik investasi asing langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI). Karena area kompetisi industrinya sama, maka masing-masing harus bersaing untuk memperoleh FDI sebanyak-banyaknya. Mau tidak mau ASEAN harus `head to head' dengan China dalam mendatangkan modal dari luar.

Dalam hal ini, maka penulis melihat bahwa kemajuan ekonomi China-India merupakan peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ASEAN. Peluang, karena jikalau ASEAN bisa memanfaatkan setiap peluang kerjasama yang dibangun dengan China-India, maka akan terjadi peningkatan *economic skills* oleh negara-negara ASEAN. Dan juga merupakan tantangan, karena jikalau tidak ada penguatan dalam internal ASEAN terhadap berbagai sektor, maka perekonomian negara-negara ASEAN akan mengalami stagnasi atau bahkan mengalami kemunduran.

Di sisi lain, meski persaingan dengan China dan India tak terhindarkan, kerjasama dengan mereka tak bisa ditepikan. Justru kemajuan ekonomi mereka menjadi daya tarik tersendiri untuk saling bekerjasama. Karena itu adanya ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) dan rencana ASEAN-India Vision 2020, tak bisa dipandang sebelah mata. Maka dalam hal ini bisa dijadikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian dalam tesis ini.

Disamping itu, integrasi ekonomi merupakan suatu upaya yang harus dilakukan negara-negara ASEAN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan volume perdagangan, meningkatkan efisiensi produksi, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, mempercepat pertumbuhan output serta meningkatkan mobilitas faktor produksi, melalui kesepakatan penurunan atau menghilangkan semua jenis hambatan perdagangan diantara negara-negara anggota ASEAN dan menjadikan ASEAN sebagai *the driving force* dalam mengembangkan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bennett, Andrew. "Case Study Methods: Design, Use, and Comparative Advantages". *Models, Numbers, and Cases: Methods for Studying International Relations*. Eds. Detlef F. Sprinz and Yael Wolinsky-Nahmias. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.
- Bryman, Alan. *Social Research Methods* (2nd ed.). New York: Oxford University Press, 2004.
- China's *Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACCS) Vietnam, 2006.
- Engardio, Pete. "*CHINDIA: Strategi China dan India menguasai Bisnis Global*", Penerbit PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Farrel, Marry. "*The Global Politics of Regionalism: An Introduction*", dalam Marry Farrel dan Bjorn Hettne (eds), *Global Politics of Regionalism* (London: Pluto Press, 2005).
- India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons*, Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India, 2004.
- Ispriyahadi, Heri. *Kemajuan Iptek Mendongkrak Kebangkitan Ekonomi India*; dalam India, Bangkitnya Raksasa Baru Asia (Calon Pemain Utama Dunia di Era Globalisasi), Editor; Irwan Suhanda, PT Kompas Media Nusantara, 2007.
- Kallgren, Joyce K., Noordin Sopiee, and Soedjati Djiwandono, eds., *ASEAN and China: An Evolving Relationship*, Berkeley, California: Institute of East Asian Studies, University of California at Berkeley, 1988.

Tulisan

- Albar, Syed Hamid. "ASEAN-India Partnership: Opportunities and Challenges," *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization*. New Delhi: Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries. 2002.

- Anderson, Kym. dan Richard Blackhurst, "Introduction and Summary" dalam Kym Anderson dan Richard Blackhurst, *Regional Integration and The Global Trading System* (Harvester Wheatsheaf, 1993).
- Abduraxmonovich, Abdurahim Okhunov. *Economic Cooperation between India and Central Asian Republics with Special Reference to Uzbekistan*, RIS DISCUSSION PAPERS, RIS-DP # 53/2003, June 2003.
- Ayoob, Mohammad. *India and Southeast Asia: Indian Perceptions and Policies*. London: Rutledge, 1990.
- Balassa, Bela. *The Theory of Economic Integration* (Homewood, Illinois: Richard D. Irwin Inc., 1961).
- Bergsten, C. Fred. "Open Regionalism" Working Paper 97-3 (Washington D.C.: Institute for International Economics, 1997), online: <http://www.iie.com/publications/wp/wp.cfm?ResearchID=152>.
- Danyang, Qiu. "Zhongguo-dongmeng ziyu maoyiqu: zhongguo heping jueqi de diyuan jingjixue sikao" ["China-ASEAN FTA: On the Geo-Economics of China's Peaceful Rise"], *Dangdai yatai* [Contemporary Asia-Pacific Studies], No. 1, January 2005.
- Gungwu, Wang. "China and Southeast Asia: The Context of a New Beginning," in David Shambaugh, ed., *Power Shift: China and Asia's New Dynamics*, Berkeley, CA: University of California Press, 2005.
- GuWaosong, Prof. *China's Peaceful Development and ASEAN-China Relations*; dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACs) Vietnam.
- Hassan, Mohamed Jahwar. *The Resurgence of China and India, major Power Rivalry and The Response of ASEAN*, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds.), *The Inklusif Regionalist*, Centre For Strategic And International Studies, Jakarta, Indonesia, 2007.
- Hew, Denis. *Realizing The ASEAN Economic Community by 2015*, dalam Hadi Soesastro dan Clara Joewono (eds), *The Inclusive Regionalist*, Centre For Strategic And International Studies (CSIS), Jakarta, Indonesia, 2007.
- Hew, Denis. *Toward an ASEAN Economic by 2015*, dalam *The ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2008.

- Hew, D. & Das, S. B., *ASEAN Economic Community and CLMV Countries*. Workshop on *Production Networks, Industrial Clustering's and Industrialization Strategy in Less Developed Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 2008.
- Kangping, Wu. "Three major characteristics and challenges of the contemporary world economy", *Globe Times*, April 2005, Beijing.
- Lamberte, Mario B. "An Overview of Economic Cooperation and Integration in Asia" in Asian Development Bank, *Asian Economic Cooperation and Integration: Progress, Prospects, and Challenges* (Manila: Asian Development Bank, 2005).
- Lijun, Sheng. "China-ASEAN Free Trade Area: Origins, Developments and Strategic Motivations," ISEAS Working Paper: International Politics & Security Issues Series No. 1, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.
- Nien, Nguyen Dy. *ASEAN-India Dialogue Relations: Present and Prospects*, dalam *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization: Reflections by Eminent Persons*, Research and Information System for the Non-Aligned and Other Developing Countries (RIS), India, 2002.
- Mattoo, Amitabh. "ASEAN in India's Foreign Policy," in Frédéric Grare and Amitabh Mattoo (eds.), *India and ASEAN: the politics of India's look east policy*. New Delhi: Manohar. 2001.
- Mondejar, Reuben. and Wai Lung Chu, "ASEAN-China Relations: Legacies and Future Directions," in Ho Khai Leong and Samuel C. Y. Ku, eds., *China and Southeast Asia: Global Changes and Regional Challenges*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2005.
- Pangestu, Mari. "China's Economic Rise and the Responses of ASEAN," in Kokubun Ryosei and Wang Jisi, eds., *The Rise of China and a Changing East Asian Order*, Tokyo and New York: Japan Center for International Exchange, 2004.
- Plummer, Michael G. "*Creating an ASEAN Economic Community: Lesson from the EU and Reflections on the Roadmap*" dalam Denis Hew," *Roadmap to an ASEAN Economic Community*". Institute of Southeast Asian Studies, Singapore. 2005.
- Prasad, Malla VSV. "Political and Security Cooperation between India and ASEAN," in Kumar, Sen and Mukul Asher (eds.), *India-ASEAN Economic Relations: Meeting the Challenges of Globalization*. Singapore: Institute of Southeast Asian Countries. 2006.

Ravenhill, J. "Is China an Economic Threat to Southeast Asia?" In Asian Survey, Vol. 46, Issue 5, University of California, 2006.

Savanphet, Thongphane. *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*, dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations (Summary Record of the Regional Seminar)*, by The Gioi Publishers, Vietnam, 2006.

Savanphet, Thongphane. (ASEAN Secretariat), *ASEAN-China Dialogue Relations: Present and Future*; dalam *China's Development and Prospect of ASEAN-China Relations*, published by Vietnamese Academy of Social Sciences Centre for ASEAN and China Studies (CACs) Vietnam, 2006.

Soesastro, Hadi. *Implementing the ASEAN Economic Community Blueprint*, dalam *The ASEAN Community: Unblocking the Roadblocks*, Institute of Southeast Asian Studies (ISEAS), Singapore, 2008.

Shuxian, Jiang. and Sheng Lijun, "The Communist Party of China and Political Parties in Southeast Asia," Trends in Southeast Asia Series, Vol. 14, 2005, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, December 2005.

Srithirath, Sobanh. *ASEAN-India Partnership Towards the Next Millennium*; dalam *India-ASEAN Partnership in an Era of Globalization; Reflection by Eminent Persons, Research and Information System for the Non-Aligned and Others Developing Countries (RIS) India*, 2004.

Stein, Charles. "The Rise of China Inc", Boston Globe (August 19, 2003).

Suryadinata, Leo. *China and the ASEAN States: The Ethnic Chinese Dimension*, Singapore: Singapore University Press, 1985.

Yusuf, Edi. dalam seminar *Komunitas Ekonomi Asean 2015 dan Implikasinya bagi Indonesia*, Departemen Luar Negeri RI, di Universitas Indonesia, Jakarta, 12 Februari 2009.

Jurnal dan Paper

Arnold, Wayne. "China Rise Not Doom for Others," International Herald Tribune, February 28, 2006. www.iht.com/articles/2006/02/28/business/asiaecon.php.

Ba, Alice D. "China and ASEAN: Renavigating Relations for a 21st Century Asia," Asian Survey, Vol. 43, No. 4, September/October 2003.

- Beeson, Mark. "ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 25, No. 2, August 2003.
- Cheng, Joseph Yu-Shek. "The ASEAN-China Free Trade Area: Genesis and Implications," *Australian Journal of International Affairs*, Vol. 58, No. 2, June 2004.
- Ganesan, N. "ASEAN's Relations with Major External Powers," *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 22, No. 2, August 2000, hal, 264.
- Haacke, Jürgen. "Seeking Influence: China's Diplomacy Toward ASEAN after the Asian Crisis," *Asian Perspective*, Vol. 26, No. 4, 2002.
- Haibing, Zhang. "Zhongguo-dongmeng quyue jingji hezuo de xinjinzhan yu wenti" ["Progress and Problems in China-ASEAN Regional Economic Cooperation"], *Guoji wenti luntan* [International Review], No. 38, Spring 2005. www.sis.org.cn/gjwlt/2005/zhanghaibin.htm.
- Hong, Zhao. "India's Changing Relations with ASEAN: From China's Perspective," *East Asian Institute Working Paper No. 133*, October 2006.
- Kaul, Man Mohini. "Time for a Great Leap Eastwards," *The Indian Express*. 20 November 2002. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/20o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010).
- Laurenceson, James. "Economic Integration between China and the ASEAN-5," *ASEAN Economic Bulletin*, Vol. 20, No. 2, August 2003.
- Ludo, Chuyers dan Wisarn Puppavesa. *From ASEAN to AFTA*, CAS Discussion Paper No. 46, 1996.
- Medeiros, Evan S. and M. Taylor Fravel, "China's New Diplomacy," *Foreign Affairs*, Vol. 82, No. 6, November/December 2003.
- S, Naya Dan Imada P. (eds). 1992. *AFTA The Way Ahead*, ISEAS, Singapore.
- Parthasarathy. "The Gains of Looking East," *The Pioneer*, 21 November 2002. <http://www.mea.gov.in/opinion/2002/11/21o03.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010)
- Schwartz, A. dan R. Villinger, "*Integrating Southeast Asian Economies*", *The McKinsey Quarterly*, No. 1 (2004).
- Winters, Alan. "*Regionalism versus Multilateralism*", World Bank Policy Research Working Paper 1687 (Washington D.C.: The World Bank, 1996).

Wattanapruttipaisan, Thitapha. "ASEAN-China Free Trade Area: Advantages, Challenges, and Implications for the Newer ASEAN Member Countries," ASEAN Economic Bulletin, Vol. 20, No. 1, April 2003.

Wong, John. and Sarah Chan, "China-ASEAN Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations," Asian Survey, Vol. 43, No. 3, May/June 2003

Publikasi

ASEAN Declaration, Bangkok, 8 Agustus 1967.

ASEAN Document Series 1967-1985, ASEAN Secretariat, Jakarta, 1985.

ASEAN Secretariat, ASEAN Baseline Report: *Measurements to Monitor Progress Towards The ASEAN Community*, Jakarta: ASEAN Secretariat, 2005

China's Statistics Department-General: "*Official gazette on the statistics on the national socio-economic development of the People's Republic of China in 2004*", released on 28 February 2005 (People's Daily) Beijing.

Financial Times, dikutip oleh Chalmers Johnsons. "*No Longer the 'Lone' Superpower: Coming to Terms with China*". Japan Policy Research Institute Working Paper No.105, Maret 2005. http://www.jpri.org/publications/working_papers/wp_105.

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Republic of India and the Association of Southeast Asian Nations" ASEAN Official Website, <http://www.aseansec.org/15278.htm>, accessed on 16 November 2009.

Lihat *Cetak Biru Komunitas ekonomi ASEAN*, yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN-DEPLU RI, 2009

Lihat *framework Agreement on Enchanging economic Cooperation*, Singapore, 1992

McKinsey & Company, ASEAN Competitiveness Study, McKinsey & Company, 2003.

National Bureau of Statistic, "*Statistical Communiqué of the People's Republic of China on National Economic and Social Development in 2004*" (in Chinese), February 28, 2005. "China now second most wired nation on the globe", China Daily (July 21, 2004).

National Bureau of Statistics, data 28 Februari 2007

The ASEAN Community; Unblocking the Roadblocks; ASEAN Study Centre report series, no. 1, Institute of Southeast Asian Studies Singapore, 2008.

“The Talk of the Town at Davos; China”, International Herald Tribune, January 26, 2004.

Tong, Sarah Y. *Comparing Trade Performance Of China And India*, EAI Background Brief No. 398, Date Of Publication: 20 August 2008.

Xinhua. “China-ASEAN Trade Soaring,” January 17, 2006, english.sina.com/business/1/2006/0117/62228.html.

Vajpayee, AB. “India’s Perspectives on ASEAN and the Asia Pacific Region”, 9 April 2002. India’s Ministry of External Affairs Website, <http://www.mea.gov.in/sshome.htm> (diakses pada tanggal 5 April 2010).

Internet

WTO Secretariat, “Scope of RTAs”, online: www.wto.org/english/tratop_e/region_e/scope_rta_e.htm.

“Summary Report of the ARF ISG on Confidence Building Measures, Beijing, 6-8 March 1997,” www.aseansec.org/3605.htm.

The text of the Bali Concord II is available online at <http://www.aseansec.org/15159.htm>.

Koran

Business Times Singapore, “*Asean seen on track for economic integration*”, 5 September 2008.

Kompas, 3 September 2003.

Kompas, 3 Januari 2004.

Kompas, Selasa 17 November 2009.

The Straits Times, “*Asia’s next crisis: ‘Made in China’*”, (Singapore, August 2, 2001).

